

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Kabupaten Tebo Tahun 2023

Maju Bersama Agribisnis



Pemerintah Kabupaten Tebo

" Seentak Galah Serengkuh Dayung "



BUPATI TEBO

KATA PENGANTAR



Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan ridho-Nya semata, penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun untuk memenuhi amanah Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan LPPD Kabupaten Tebo Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD Kabupaten Tebo memuat Capaian Kinerja Makro, Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tugas Pembantuan serta dilengkapi dengan Indikator Kinerja kunci (IKK) Output dan Outcome.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan rangkuman kegiatan Bupati Tebo serta kegiatan dari seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tebo, disamping sebagai pertanggungjawaban kepada publik, juga diharapkan dapat memberi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, berdaya guna, berhasil guna, transparan dan bertanggung jawab.

Dengan disusunnya Laporan ini, maka tersedia bahan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tebo, sehingga kedepan diharapkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien serta terwujudnya *Kabupaten Tebo Maju Bersama Agribisnis* .

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, baik secara penyajian maupun substansi materi yang disajikan. Oleh karena itu berbagai kritik saran kami harapkan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih menyempurnakan laporan ini pada khususnya dan pada akhirnya bagi kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tebo, segala kekurangan dalam penyampaian, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulusnya.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023, saya berharap semoga segala upaya kita dalam berkiprah membangun Kabupaten Tebo senantiasa memperoleh petunjuk serta Ridho Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Muara Tebo, Maret 2024 M
Sya'ban 1445 H

Pj. BUPATI TEBO,



H.ASRAN, ST

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1	Latar Belakang	1
1.1.1	Penjelasan Umum.....	1
a.	Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	1
b.	Data Geografis Wilayah	1
c.	Jumlah Penduduk	4
d.	Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	5
e.	Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai P emerintah	8
f.	Realisari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	11
1.1.2	Perencanaan Pembangunan Daerah	56
1.1.2.1	Latar Belakang	56
1.1.2.2	Tujuan dan Sasaran	58
1.1.3	Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	89
BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..	91
2.1	Capaian Kinerja Makro	91
2.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	91
2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	92
2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil	125
2.2.3	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	132
2.3	Perjanjian Kinerja	135
2.4	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	143
2.3.1..	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Kepala Daerah.....	143
2.3.2..	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	152
2.3.3..	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Capaian Terhadap Akhir RPD Tahun 2026	156
2.3.4..	Analisis Capaian Kinerja Pemerintahan Kabupaten Tebo Tahun 2023	159
2.3.5..	Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023	170
2.3.6..	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai	175
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	178
3.1	Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Tebo	178
3.1.1	Target Kinerja	178
3.1.2	Realisasi.....	176
3.2	Permasalahan dan Kendala	180



3.3	Saran dan Tindak Lanjut.....	180
3.4	Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Tebo	181
3.4.1	Target Kinerja.....	181
3.4.2	Realisasi	182
3.5	Permasalahan dan Kendala	210
3.6	Saran dan Tindak Lanjut.....	211

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.. 212

4.1	Urusan Pendidikan.....	212
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	212
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah ...	212
4.1.3	Realisasi	212
4.1.4	Alokasi Anggaran.....	213
4.1.5	Dukungan Personil.....	213
4.1.6	Permasalahan dan Solusi	213
4.2	Urusan Kesehatan	214
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	214
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah ...	214
4.2.3	Realisasi	215
4.2.4	Alokasi Anggaran.....	216
4.2.5	Dukungan Personil.....	216
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	217
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	219
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	219
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah ...	219
4.3.3	Realisasi	219
4.3.4	Alokasi Anggaran.....	219
4.3.5	Dukungan Personil.....	219
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	220
4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	221
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	221
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah ...	222
4.4.3	Realisasi	222
4.4.4	Alokasi Anggaran.....	222
4.4.5	Dukungan Personil.....	222
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	223
4.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	222
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	222
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah ...	224
4.5.3	Realisasi	224
4.5.4	Alokasi Anggaran.....	225
4.5.5	Dukungan Personil.....	226
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	226
4.6	Urusan Sosial	228
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	228
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah ...	228
4.6.3	Realisasi	229



4.6.4	Alokasi Anggaran.....	229
4.6.5	Dukungan Personil.....	230
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	230
4.7	Program dan Kegiatan	231
4.7.1	Bidang Urusan Pendidikan.....	231
4.7.2	Bidang Urusan Kesehatan	236
4.7.3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	241
4.7.4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	242
4.7.5	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	243
4.7.6	Bidang Urusan Sosial	244
BAB V	PENUTUP	248
	Lampiran Perhitungan Indikator Kinerja Kunci Output dan Outcome	249



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Persentase Luas Wilayah Kabupaten Tebo	2
Tabel I.2	Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Tebo	4
Tabel I.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Tebo menurut jenis kelamin per Kecamatan.....	5
Tabel I.4	Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam Kabupaten Tebo...	6
Tabel I.5	Daftar Perangkat Daerah Kabupaten Tebo	9
Tabel I.6	Jumlah Pegawai berdasarkan Perangkat Daerah.....	9
Tabel II.1	Capaian Kinerja Makro	91
Tabel II.2	Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	92
Tabel II.3	Indikator Kinerja Kunci Hasil	125
Tabel II.4	Indikator Kinerja Fungsi Penunjang.....	132
Tabel II.5	Skala Pengukuran Ordinal	144
Tabel II.6	Pengukuran Indikator Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023.....	146
Tabel II.7	Pencapaian Indikator Sasaran	150
Tabel II.8	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Pelayanan Masyarakat Tahun 2023	169
Tabel II.9	Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023	170
Tabel II.10	Hasil Analisis Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran dan Persentase Penyerapan Anggaran	176
Tabel III.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat	178
Tabel III.2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi/Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Kota/Tahun 2023	182
Tabel IV.1	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	212
Tabel IV.2	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	212
Tabel IV.3	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan.....	214
Tabel IV.4	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan.....	215
Tabel IV.5	Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	216
Tabel IV.6	Jumlah Pegawai RSUD	217
Tabel IV.7	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum.....	219
Tabel IV.8	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum.....	219
Tabel IV.9	Jumlah Pegawai Bidang Cipta Karya	220
Tabel IV.10	Komposisi Pegawai Bidang Cipta Karya berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	220
Tabel IV.11	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	222
Tabel IV.12	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	222
Tabel IV.13	Jumlah Pegawai	222
Tabel IV.14	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja	224
Tabel IV.15	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daeah.....	224



Tabel IV.16	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	224
Tabel IV.17	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja	224
Tabel IV.18	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	225
Tabel IV.19	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	225
Tabel IV.20	Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja	226
Tabel IV.21	Jumlah Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	226
Tabel IV.22	Jumlah Personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan .	226
Tabel IV.23	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	228
Tabel IV.24	Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.	229
Tabel IV.25	Program Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan.....	232
Tabel IV.26	Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan.....	236
Tabel IV.27	Program Kegiatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum.....	241
Tabel IV.28	Program Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	242
Tabel IV.29	Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	243
Tabel IV.30	Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	243
Tabel IV.31	Program Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	243
Tabel IV.32	Program Kegiatan Bidang Urusan Sosial	244



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Kabupaten Tebo	2
------------	---------------------------	---



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Sejak berlakunya Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sampai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) hingga Bulan Desember 2023 telah terbentuk 514 Kabupaten/Kota dan 38 Provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Tebo yang dibentuk berdasarkan Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969).

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Tebo terletak pada arah Barat Provinsi Jambi, dengan jarak 210 km. Secara geografis Kabupaten Tebo terletak dengan posisi pada titik koordinat antara 0'52'32" – 1'54'50" Lintang Selatan dan 101'48'57' – 102'49'17" Bujur Timur dengan derajat elevasi berada pada ketinggian 70-100 meter dari permukaan laut, dengan batas-batas wilayah:

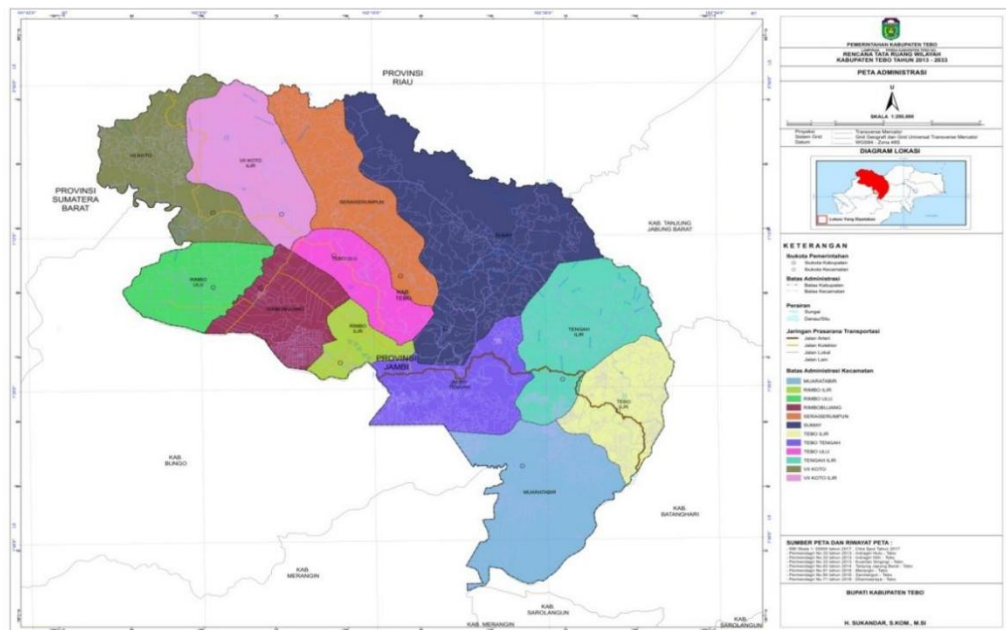
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Ulu Provinsi Riau, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta Kabupaten Batang Hari.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batang Hari.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batang Hari.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.

Luas Wilayah Kabupaten Tebo secara keseluruhan seluas± 6.427 Km² atau 11,86% dari luas Provinsi Jambi dimana Kabupaten Tebo pada sampai dengan Tahun 2022 secara administrasi sudah memiliki 12 Kecamatan, 122 Desa, dan 7 (tujuh) Kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Sumay 19,63% dari luas wilayah Kab. Tebo disusul dengan Kecamatan Tebo Tengah 15, 22%, Kecamatan Tebo Ilir 10,97%, Kecamatan VII Koto 10,20%, Muara Tabir 7,88%, Kecamatan VII Koto Ilir 7,25%, Kecamatan Tebo Ulu 6,35%, Rimbo Bujang 6,30%, Kecamatan Serai 4,89%, Kecamatan Rimbo Ulu 4,58%, Kecamatan Tengah Ilir 3,43% dan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Rimbo Ilir 3,32% dari luas wilayah Kabupaten Tebo.

Adapun Peta Kabupaten Tebo dan Data Kecamatan, Kelurahan dan Desa serta Diagram Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Tebo dapat dilihat pada Gambar dan Tabel di bawah ini :

Gambar. I.1. Peta Kabupaten Tebo



Sumber : Peta Imajiner Kabupaten Tebo

Tabel I.1 Persentase Luas Wilayah Kabupaten Tebo

No	Kecamatan	Nama Ibu Kota	Luas	
			Km ²	%
1	Tebollir	Sungai Bengkal	691,7	10,97
2	Muara Tabir	PintasTuo	495,3	7,88
3	Tebo Tengah	Muara Tebo	983,56	15,22
4	Sumay	TelukSingkawang	1.268,00	19,63
5	Tengah Ilir	Mengupeh	221,44	3,43
6	RimboBujang	Wirotho Agung	406,92	6,30
7	Rimbo Ulu	SukaDamai	293,74	4,58



8	Rimbollir	KarangDadi	213,34	3,32
9	Tebo Ulu	PulauTemiang	410,3	6,35
10	VII Koto	Sungai Abang	658,79	10,20
11	Serai Serumpun	Sekutur Jaya	315,7	4,89
12	VII Koto Ilir	BalaiRajo	468,21	7,25
Jumlah			6.427,00	100,00

Sumber Data: BappedaLitbang Kabupaten Tebo

Wilayah Kabupaten Tebo memiliki topografi yang bervariasi meliputi dataran rendah dan sedikit berbukit-bukit dan rawa-rawa dengan kemiringan bervariasi. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah. Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut kawasan Kabupaten Tebo dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. < 99 M dpl : 84.96%
2. 100 – 499 M dpl : 14.98%
3. 500 – 999 M dpl : 0.06%

Berdasarkan keadaan alam, wilayah Kabupaten Tebo merupakan wilayah datar, bergelombang dan terdapat sedikit wilayah berbukit dan rawa-rawa. Wilayah dataran terdapat di sebagian Kecamatan Tebo Tengah dan Kecamatan VII Koto. Rawa-rawa tersebar terutama disepanjang aliran Sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Tabir, Batang Sumay dan Batang Pelepat.

Kabupaten Tebo beriklim tropis dengan suhu rata-rata 25,80°C – 28,7°C dengan rata-rata curah hujan 300 MM pertahun dan tingkat kelembaban lebih kurang antara 56% - 85%. Suhu. Ditinjau dari fisiografis wilayah KabupatenTebo termasuk jalur Zone 11 Bukit Barisan. Pada umumnya Kabupaten Tebo mempunyai iklim tropis basah dengan beberapa variasi kecil curah hujan yang hampir merata disetiap tahun, sedangkan perbedaan terjadi antara musim kemarau (Bulan Februari – Bulan Agustus) dan musim hujan (Bulan September – Bulan Januari) tidak terlalu bervariasi besar. Jenis tanah di wilayah Kabupaten Tebo terdapat 4 (empat) jenis tanah, yaitu :

1. Podzolik 438.000 Ha (67.79%)
2. Latosol 204.600 Ha (31.67%)
3. Aluvial 2.200 Ha (0.034%)
4. Organosol 1.300 Ha (0.020%)

Dengan rincian penyebarannya sebagaimana tabel di bawah ini :



Tabel I.2 Penyebaran Jenis Tanah di Kabupaten Tebo

No	Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
		PMK	Latosol	Alluvial	Organosol	
1	Tebo Tengah	80.789	3.537	13.747	283	98.356
2	Tebollir	32.246	24.096	-	14.528	70.870
3	Sumay	56.566	49.991	6.722	13.521	126.800
4	Tebo Ulu	34.920	819	2.035	3.256	41.030
5	VII Koto	44.301	18.828	2.350	400	65.879
6	RimboBujang	32.563	2.641	3.252	2.236	40.692
7	Rimbollir	20.944	220	152	118	21.434
8	Rimbo Ulu	26.900	650	-	2.024	29.574
9	Tengah Ilir	12.456	9.688	-	-	22.144
10	VII Koto Ilir	26.358	18.114	2.349	-	46.821
11	Serai Serumpun	18.981	12.589	-	-	31.570
12	Muara Tabir	50.930	-	-	-	50.930
Jumlah		437.954	141.173	30.607	36.366	646.100
% Kabupaten		67,78	21,85	4,74	5,63	100

Sumber :Bappedalitbang Kabupaten Tebo

c. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tebo pada Tahun 2023 sebanyak 362.946 jiwa yang terdiri dari 186.517 jiwa laki-laki (51,39%) dan 176.429 jiwa perempuan (48,61%) dengan total keluarga sebanyak 114.309 Kepala Keluarga, untuk lebih jelasnya dapat dirinci per Kecamatan pada tabel berikut :

Tabel I.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Tebo menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan

No.	KECAMATAN	Jumlah KK	PENDUDUK		JUMLAH PENDUDUK (L+P)
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5	6
1	Tebo Tengah	12.988	21.808	20.991	42.799
2	Tebo Ilir	9.613	15.461	14.805	30.266
3	Tebo Ulu	11.298	17.544	16.995	34.539
4	Rimbo Bujang	20.757	33.888	32.158	66.046



5	Sumay	8.080	13.719	12.522	26.241
6	VII Koto	6.335	10.476	9.962	20.438
7	Rimbo Ulu	12.576	20.021	19.023	39.044
8	Rimbo Ilir	7.856	12.143	11664	23.807
9	Tengah Ilir	8.846	15.103	13.864	28.967
10	Serai Serumpun	3.494	5.792	5.356	11.148
11	VII Koto Ilir	6.428	10.802	10.002	20.804
12	Muara Tabir	6.038	9.760	9.087	18.847
Jumlah		114.309	186.517	176.429	362.946

Sumber : SIAK Semester II Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo Tahun 2023

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan (untuk Kabupaten/Kota)

Sejak awal pembentukan, Kabupaten Tebo terdiri dari 4 (empat) Kecamatan definitif yaitu:

1. Kecamatan Tebo Tengah terdiri dari 2 Kelurahan dan 14 Desa.
2. Kecamatan Tebo Ilir terdiri dari 1 Kelurahan dan 17 Desa.
3. Kecamatan Tebo Ulu terdiri dari 1 Kelurahan dan 16 Desa, dan
4. Kecamatan Rimbo Bujang terdiri dari 3 Kelurahan dan 13 Desa.

Serta ada 2 (dua) Kecamatan Pembantu yaitu:

1. Kecamatan Pembantu Sumay terdiri dari 12 Desa, dan
2. Kecamatan Pembantu VII Koto terdiri dari 10 Desa.

Dalam kurun waktu 25 Tahun Kabupaten Tebo pada saat ini telah memiliki 12 Kecamatan yang telah definitif, 122 Desa dan 7 Kelurahan.

Tabel I.4 Nama Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam Kabupaten Tebo

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
1	2	3	4
I.	TEBO TENGAH	1. Muara Tebo 2. Tebing Tinggi	1. Bedaro Rampak 2. Mengun Jayo 3. Teluk Pandak 4. Tengah Ulu 5. Semabu 6. Kandang 7. Pelayang 8. Sungai Keruh 9. Amburan Batang Tebo 10. Sungai Alai
II.	TEBO ILIR	1. Sungai Bengkal	1. Sungai Aro 2. Teluk Rendah Pasar 3. Teluk Rendah Ulu 4. Teluk Rendah Ilir 5. Tuo Ilir 6. Betung Bedarah Timur



			<ol style="list-style-type: none"> 7. Betung Bedarah Barat 8. Kunangan 9. Muara Ketalo 10. Sungai Bengkal 11. Kemantan
III.	TEBO ULU	1. Pulau Temiang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Rambai 2. Pagar Puding 3. Teluk Kembang Jambu 4. Teluk Kasai Rambahan 5. Rantau Langkap 6. Tanjung Aur 7. Bungo Tanjung 8. Pulau Panjang 9. Lubuk Benteng 10. Teluk Kuali 11. Melako Intan 12. Jambu 13. Medan Seri Rambahan 14. UlakBanjirRambahan 15. TelukPandanRambahan 16. PulauJelmu
IV.	RIMBO BUJANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wirotho Agung 2. Mandiri Agung 3. Sarana Agung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perintis 2. Rimbo Mulyo 3. Purwoharjo 4. Tegal Arum 5. Tirta Kencana 6. Sapta Mulya 7. Pematang Sapat 8. Perintis Jaya 9. Jaya Mulya 10. Purwo Dadi 11. Tegal Asri 12. Mekar Kencana
V.	SUMAY		<ol style="list-style-type: none"> 1. Teluk Singkawang 2. Lembak Bungur 3. Teluk Langkap 4. Tambun Arang 5. Punt Kalo 6. Jati Belarik 7. Tuo Sumay 8. Teriti 9. Suo-Suo 10. Muara Sekalo 11. Semambu 12. Pelayungan
VI.	VII KOTO		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanjung Pucuk Jambi 2. Kuamang 3. Teluk Kayu Putih 4. Sungai Abang 5. Aur Cino



			<ol style="list-style-type: none"> 6. Dusun Baru 7. Muara Niro 8. Tabun 9. Muara Tabun 10. Teluk Lancang
VII.	RIMBO ULU		<ol style="list-style-type: none"> 1. Suka Damai 2. Wanareja 3. Sumber Sari 4. Sido Rukun 5. Sungai Pandan 6. Suka Maju 7. Mekar Sari 8. Wana Arum 9. Wana Mulya 10. Damai Makmur 11. Suka Jaya 12. Sido Mulyo
VIII.	RIMBO ILIR		<ol style="list-style-type: none"> 1. Giriwinangun 2. Sidorejo 3. Pulungrejo 4. Karang Dadi 5. Giri Purno 6. Sumber Agung 7. Sari Mulya 8. Sepakat Bersatu 9. Rantau Kembang 10. Giri Mulyo
IX.	TENGAH ILIR		<ol style="list-style-type: none"> 1. Muara Kilis 2. Penapalan 3. Mengupeh 4. Rantau Api 5. Lubuk Mandarsah 6. Lubuk Mandarsah Ulu
X.	SERAI SERUMPUN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pinang Belai 2. Sekutur Jaya 3. Bukit Pemuatan 4. Napal Putih 5. Sako Makmur 6. Pagar Puding Lamo 7. Tanjung Aur Seberang 8. Teluk Melintang
XI.	VII KOTO ILIR		<ol style="list-style-type: none"> 1. Teluk Kepayang Pulau Indah 2. Balai Rajo 3. Cermin Alam 4. Sungai Karang 5. Paseban 6. PasirMayang



XII.	MUARA TABIR		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Garo 2. Pintas Tuo 3. Embacang Gedang 4. Bangun Seranten 5. Tambun Arang 6. Sungai Jernih 7. Bangko Pintas 8. OlakKemang
	12 Kecamatan	12 Kelurahan	122 Desa

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupatenTebo

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 20231 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tebo memiliki 13 (tiga belas) Perangkat Daerah dengan Tipe A, 7 (tujuh) Perangkat Daerah dengan Tipe B, 2 (dua) Dinas dengan Tipe C, 2 (Badan) Badan dengan Tipe A dan 1 (satu) Badan dengan Tipe B, 1 (satu) Kantor, 1 (satu) RSUD dan 12 Kecamatan sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel I.5 Daftar Perangkat Daerah KabupatenTebo

	DINAS DAERAH	BADAN	KECAMATAN
TIPE A			
<ol style="list-style-type: none"> 1. SEKRETARIAT DAERAH 2. INSPEKTORAT DAERAH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2. DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA 3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 4. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5. DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN 6. DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN 7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN 8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN 2. BADAN KEUANGAN DAERAH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. TEBO TENGAH 2. TEBO ILIR 3. TEBO ULU 4. RIMBO BUJANG 5. SUMAY 6. VII KOTO 7. RIMBO ULU 8. RIMBO ILIR 9. TENGAH ILIR 10. VII KOTO ILIR 11. SERAI SERUMPUN 12. MUARA TABIR
TIPE B			



3. SEKRETARIAT DPRD	10. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 13. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA 13. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 14. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA		
TIPE C			
	15. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 16. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
NOMENKLATUR LAMA			
1. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDIN			

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Tebo

Tabel. I.6. Jumlah Pegawai Berdasarkan Perangkat Daerah

No.	Nomenklatur	Tipe	Jumlah Pegawai	Ket
1.	Sekretariat Daerah	A	86	
2.	Sekretariat DPRD	B	23	
3.	Inspektorat	A	43	
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A	1644	
5.	Dinas Kesehatan & KB	A	622	
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	A	57	
7.	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	A	30	
8.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura & Ketahanan Pangan	A	61	
9.	Dinas Lingkungan Hidup & Perhubungan	A	48	
10.	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	A	22	
11.	Dinas Perkebunan, Perikanan & Peternakan	A	39	
12.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	A	15	
13.	Satua Polisi Pamong Praja	B	28	
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	B	19	
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	B	25	
16.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B	19	
17.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	B	20	
18.	Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan	C	22	
19.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	C	17	



20.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & Penelitian Pengembangan	A	33	
21.	Badan Keuangan Daerah	A	46	
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	17	
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B	28	
24.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	-	16	
26.	Rumah Sakit Umum Daerah STS	-	208	
27.	Kecamatan	A	222	12 Kec

Sumber Data: BKPSDM Kab. Tebo

f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.



PEMERINTAHAN KAB. TEBO



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1,227,708,230,805	1,213,289,128,831.33	98.83	1,175,441,007,742.31
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	96,873,289,659	91,814,758,855.33	94.78	86,173,512,980.31
4.1.01	Pajak Daerah	22,094,310,000	24,324,467,710.02	110.09	23,343,449,484.64
4.1.01.06	Pajak Hotel	45,000,000	87,718,500.00	194.93	42,518,500.00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	45,000,000	87,718,500.00	194.93	42,518,500.00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	45,000,000	87,718,500.00	194.93	42,518,500.00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1,222,810,000	2,009,755,878.02	164.36	1,899,013,784.64
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1,222,810,000	2,009,755,878.02	164.36	1,899,013,784.64
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1,222,810,000	2,009,755,878.02	164.36	1,899,013,784.64
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2,000,000	2,400,000.00	120	2,943,350.00

4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	2,000,000	2,400,000.00	120	2,943,350.00
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	2,000,000	2,400,000.00	120	2,943,350.00
4.1.01.09	Pajak Reklame	400,000,000	549,183,323.00	137.3	478,883,804.00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	400,000,000	549,183,323.00	137.3	478,883,804.00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	400,000,000	549,183,323.00	137.3	478,883,804.00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	16,000,000,000	17,030,991,771.00	106.44	16,170,889,499.00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	16,000,000,000	17,030,991,771.00	106.44	16,170,889,499.00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	16,000,000,000	17,030,991,771.00	106.44	16,170,889,499.00
4.1.01.11	Pajak Parkir	110,000,000	125,096,997.00	113.72	107,352,000.00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	110,000,000	125,096,997.00	113.72	107,352,000.00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	110,000,000	125,096,997.00	113.72	107,352,000.00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2,500,000	2,914,411.00	116.58	2,516,163.00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2,500,000	2,914,411.00	116.58	2,516,163.00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	2,500,000	2,914,411.00	116.58	2,516,163.00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	12,000,000	13,978,000.00	116.48	12,835,000.00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	12,000,000	13,978,000.00	116.48	12,835,000.00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	12,000,000	13,978,000.00	116.48	12,835,000.00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500,000,000	299,305,629.00	59.86	460,458,243.00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500,000,000	299,305,629.00	59.86	460,458,243.00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500,000,000	299,305,629.00	59.86	460,458,243.00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2,600,000,000	2,241,388,401.00	86.21	2,261,737,973.00
4.1.01.15.01	PBBP2	2,600,000,000	2,241,388,401.00	86.21	2,261,737,973.00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2,600,000,000	2,241,388,401.00	86.21	2,261,737,973.00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1,200,000,000	1,961,734,800.00	163.48	1,904,301,168.00

4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1,200,000,000	1,961,734,800.00	163.48	1,904,301,168.00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1,200,000,000	1,961,734,800.00	163.48	1,904,301,168.00
4.1.02	Retribusi Daerah	2,555,190,000	4,383,576,451.00	171.56	3,071,828,524.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	941,000,000	3,850,074,260.00	409.15	2,409,094,790.00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0	3,245,261,260.00	0	1,780,384,790.00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0	3,245,261,260.00	0	1,780,384,790.00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	125,000,000	120,707,000.00	96.57	114,816,000.00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	125,000,000	120,707,000.00	96.57	114,816,000.00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	65,000,000	67,732,000.00	104.2	59,350,000.00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	65,000,000	67,732,000.00	104.2	59,350,000.00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	541,000,000	332,958,000.00	61.54	360,565,000.00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	217,000,000	198,200,000.00	91.34	168,425,000.00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	324,000,000	134,758,000.00	41.59	192,140,000.00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	165,000,000	39,153,000.00	23.73	61,174,000.00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	165,000,000	39,153,000.00	23.73	61,174,000.00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10,000,000	6,363,000.00	63.63	2,000,000.00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10,000,000	6,363,000.00	63.63	2,000,000.00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	35,000,000	37,900,000.00	108.29	30,805,000.00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	35,000,000	37,900,000.00	108.29	30,805,000.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1,414,190,000	319,588,898.00	22.6	565,243,450.00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1,134,190,000	237,395,898.00	20.93	493,223,450.00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	803,190,000	151,375,000.00	18.85	303,590,000.00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	25,000,000	23,379,600.00	93.52	15,131,400.00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	306,000,000	62,641,298.00	20.47	174,502,050.00

4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	200,000,000	20,683,000.00	10.34	13,170,000.00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	200,000,000	20,683,000.00	10.34	13,170,000.00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	50,000,000	38,410,000.00	76.82	35,000,000.00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	50,000,000	38,410,000.00	76.82	35,000,000.00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	30,000,000	23,100,000.00	77	23,850,000.00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	30,000,000	23,100,000.00	77	23,850,000.00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200,000,000	213,913,293.00	106.96	97,490,284.00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200,000,000	213,913,293.00	106.96	97,490,284.00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200,000,000	213,913,293.00	106.96	97,490,284.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,139,646,829	11,139,646,829.24	100	10,693,391,104.03
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	11,139,646,829	11,139,646,829.24	100	10,693,391,104.03
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11,139,646,829	11,139,646,829.24	100	10,693,391,104.03
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	11,139,646,829	11,139,646,829.24	100	10,693,391,104.03
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	61,084,142,830	51,967,067,865.07	85.07	49,064,843,867.64
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	382,997,000	277,897,500.00	72.56	287,125,800.00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	370,000,000	257,382,500.00	69.56	169,300,000.00
4.1.04.01.05.0003	Hasil Penjualan Hewan	90,000,000	23,000,000.00	25.56	19,800,000.00
4.1.04.01.05.0004	Hasil Penjualan Biota Perairan	80,000,000	16,000,000.00	20	6,000,000.00
4.1.04.01.05.0005	Hasil Penjualan Tanaman	0	0	0	143,500,000.00
4.1.04.01.05.0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	200,000,000	218,382,500.00	109.19	0
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	12,997,000	20,515,000.00	157.84	117,825,800.00
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	12,997,000	20,515,000.00	157.84	117,825,800.00
4.1.04.02	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0	0	0	-103,316.84

4.1.04.02.07	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud	0	0	0	-103,316.84
4.1.04.02.07.0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	0	0	0	-103,316.84
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1,000,000	0	0	400,000.00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	1,000,000	0	0	400,000.00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	1,000,000	0	0	400,000.00
4.1.04.05	Jasa Giro	1,800,000,000	1,069,359,828.06	59.41	2,421,589,013.93
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1,500,000,000	966,223,784.70	64.41	2,378,333,946.06
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1,500,000,000	966,223,784.70	64.41	2,378,333,946.06
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	300,000,000	103,136,043.36	34.38	43,332,392.77
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	300,000,000	103,136,043.36	34.38	43,332,392.77
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0	0	0	-77,324.90
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0	0	0	-77,324.90
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	192,000,000	4,800,201.00	2.5	0
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	192,000,000	4,800,201.00	2.5	0
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	192,000,000	4,800,201.00	2.5	0
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	10,000,000,000	3,772,794,636.74	37.73	2,431,052,126.72
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10,000,000,000	3,772,794,636.74	37.73	2,431,052,126.72
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10,000,000,000	3,772,794,636.74	37.73	2,431,052,126.72
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3,000,000,000	3,908,310,983.71	130.28	8,338,834,577.11
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3,000,000,000	3,908,310,983.71	130.28	8,338,834,577.11
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3,000,000,000	3,908,310,983.71	130.28	8,338,834,577.11
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450,000,000	404,900,340.44	89.98	1,542,200,088.54
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450,000,000	404,900,340.44	89.98	1,542,200,088.54

4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450,000,000	404,900,340.44	89.98	1,542,200,088.54
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2,730,000,000	701,811,167.08	25.71	1,191,130,265.28
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2,730,000,000	671,056,886.08	24.58	1,191,130,265.28
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2,730,000,000	671,056,886.08	24.58	1,191,130,265.28
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0	30,754,281.00	0	0
4.1.04.15.15.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	0	30,754,281.00	0	0
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	31,477,839,000	32,409,512,025.04	102.96	25,821,133,886.90
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	31,477,839,000	32,409,512,025.04	102.96	25,821,133,886.90
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	31,477,839,000	32,409,512,025.04	102.96	25,821,133,886.90
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	11,050,306,830	9,417,681,183.00	85.23	7,029,671,426.00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11,050,306,830	9,417,681,183.00	85.23	7,029,671,426.00
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11,050,306,830	9,417,681,183.00	85.23	7,029,671,426.00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0	0	0	1,810,000.00
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0	0	0	1,810,000.00
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0	0	0	1,810,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	96,873,289,659	91,814,758,855.33	94.78	86,173,512,980.31
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,114,340,941,146	1,107,752,193,166.00	99.41	1,075,614,494,762.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,024,706,773,344	1,018,118,025,364.00	99.36	999,828,814,233.00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	912,096,955,344	905,508,220,888.00	99.28	879,361,933,533.00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	188,002,558,344	182,505,316,144.00	97.08	112,313,366,709.00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	27,976,575,964	27,976,575,964.00	100	39,347,994,864.00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5,130,249,866	4,975,819,866.00	96.99	4,487,609,000.00

4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0	154,430,000.00	0	168,836,000.00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	69,608,849	24,091,649.00	34.61	8,978,890.00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	82,801,147,665	58,854,054,915.00	71.08	21,626,115,388.00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0	4,345,894,750.00	0	20,151,220,567.00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	65,384,542,304	65,384,542,304.00	100	21,018,471,000.00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5,115,124,485	5,115,124,485.00	100	0
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	0	14,149,473,000.00	0	0
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	0	0	0	3,545,830,000.00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1,525,309,211	1,525,309,211.00	100	1,958,311,000.00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	547,188,354,000	551,261,872,000.00	100.74	528,751,803,682.00
4.2.01.01.02.0001	DAU	512,744,866,000	516,818,384,000.00	100.79	528,751,803,682.00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1,400,000,000	1,400,000,000.00	100	0
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	33,043,488,000	33,043,488,000.00	100	0
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	36,169,036,000	35,400,776,583.00	97.88	119,661,886,924.00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	606,485,000	599,264,720.00	98.81	748,239,427.00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7,463,129,000	6,787,560,816.00	90.95	21,415,581,108.00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3,862,345,000	3,733,666,647.00	96.67	11,418,643,740.00
4.2.01.01.03.0007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD	0	348,376,000.00	0	0
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0	0	0	4,410,615,822.00
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0	0	0	2,083,698,653.00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0	0	0	11,358,593,829.00
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0	0	0	1,573,175,189.00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0	0	0	824,910,880.00

4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0	0	0	236,872,000.00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	20,365,032,000	20,163,810,000.00	99.01	7,470,121,000.00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0	0	0	9,334,921,700.00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0	0	0	5,079,329,000.00
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	3,872,045,000	3,768,098,400.00	97.32	43,707,184,576.00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	140,737,007,000	136,340,256,161.00	96.88	118,634,876,218.00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	47,890,740,000	47,887,478,475.00	99.99	47,647,103,904.00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2,655,000,000	2,655,000,000.00	100	1,580,000,000.00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	50,272,352,000	50,616,788,500.00	100.69	46,849,154,839.00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1,377,750,000	1,033,312,500.00	75	1,383,000,000.00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4,879,800,000	4,851,451,160.00	99.42	4,570,057,000.00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2,427,700,000	2,335,500,000.00	96.2	1,294,500,000.00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8,053,593,000	5,566,975,390.00	69.12	1,275,332,000.00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	402,648,000	201,324,000.00	50	0
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	17,141,005,000	16,911,272,800.00	98.66	10,146,724,311.00
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0	0	0	185,775,079.00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4,457,594,000	3,160,943,586.00	70.91	2,873,525,621.00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	459,100,000	402,888,750.00	87.76	249,144,464.00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0	0	0	385,479,000.00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	719,725,000	717,321,000.00	99.67	195,080,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	912,096,955,344	905,508,220,888.00	99.28	879,361,933,533.00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0	19,781,555,000.00
4.2.01.02.01	DID	0	0	0	19,781,555,000.00

4.2.01.02.01.0001	DID	0	0	0	19,781,555,000.00
4.2.01.05	Dana Desa	101,057,374,000	101,057,360,476.00	100	100,685,325,700.00
4.2.01.05.01	Dana Desa	101,057,374,000	101,057,360,476.00	100	100,685,325,700.00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	101,057,374,000	101,057,360,476.00	100	100,685,325,700.00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	11,552,444,000	11,552,444,000.00	100	0
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	11,552,444,000	11,552,444,000.00	100	0
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	11,552,444,000	11,552,444,000.00	100	0
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	112,609,818,000	112,609,804,476.00	100	120,466,880,700.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	89,634,167,802	89,634,167,802.00	100	75,785,680,529.00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	76,134,167,802	76,134,167,802.00	100	64,385,680,529.00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	76,134,167,802	76,134,167,802.00	100	64,385,680,529.00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	15,946,348,238	16,376,189,241.00	102.7	13,317,684,019.00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9,502,358,073	13,206,744,429.00	138.98	11,260,640,462.00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30,567,026,332	28,213,702,212.00	92.3	22,100,740,491.00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	21,247,236	20,527,568.00	96.61	14,025,508.00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20,097,187,923	18,317,004,352.00	91.14	17,692,590,049.00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	13,500,000,000	13,500,000,000.00	100	11,400,000,000.00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	13,500,000,000	13,500,000,000.00	100	11,400,000,000.00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	13,500,000,000	13,500,000,000.00	100	11,400,000,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	89,634,167,802	89,634,167,802.00	100	75,785,680,529.00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1,114,340,941,146	1,107,752,193,166.00	99.41	1,075,614,494,762.00

4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16,494,000,000	13,722,176,810.00	83.19	13,653,000,000.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	16,494,000,000	13,722,176,810.00	83.19	13,653,000,000.00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	16,494,000,000	13,722,176,810.00	83.19	13,653,000,000.00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	16,494,000,000	13,722,176,810.00	83.19	13,653,000,000.00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	16,494,000,000	13,722,176,810.00	83.19	13,653,000,000.00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16,494,000,000	13,722,176,810.00	83.19	13,653,000,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,227,708,230,805	1,213,289,128,831.33	98.83	1,175,441,007,742.31
			0.00		
5	BELANJA DAERAH	1,317,005,678,373	1,224,015,148,415.55	92.94	1,338,826,631,206.07
5.1	BELANJA OPERASI	876,569,999,915	792,011,129,138.55	90.35	774,488,457,062.07
5.1.01	Belanja Pegawai	433,090,437,908	379,921,213,818.20	87.72	380,310,681,385.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	280,376,466,571	235,706,104,913.00	84.07	237,177,863,062.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	215,294,065,498	176,176,452,453.00	81.83	177,154,495,765.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	183,399,302,914	172,168,710,953.00	93.88	177,154,495,765.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	31,894,762,584	4,007,741,500.00	12.57	0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17,846,873,344	16,938,455,083.00	94.91	17,005,541,814.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17,460,402,174	16,557,378,493.00	94.83	17,005,541,814.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	386,471,170	381,076,590.00	98.6	0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6,008,421,902	5,349,885,000.00	89.04	5,404,225,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6,008,421,902	5,349,885,000.00	89.04	5,404,225,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12,025,564,076	11,217,251,400.00	93.28	11,781,429,600.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12,025,564,076	11,217,251,400.00	93.28	11,781,429,600.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2,918,419,250	2,630,710,000.00	90.14	2,476,130,000.00

5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2,664,738,000	2,380,775,000.00	89.34	2,476,130,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	253,681,250	249,935,000.00	98.52	0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10,908,218,935	10,341,141,480.00	94.8	10,495,613,340.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10,627,079,064	10,063,193,520.00	94.69	10,495,613,340.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	281,139,871	277,947,960.00	98.86	0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	695,296,943	629,657,675.00	90.56	242,628,901.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	695,296,943	629,657,675.00	90.56	242,628,901.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5,185,352	2,561,386.00	49.4	2,530,977.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5,122,372	2,499,129.00	48.79	2,530,977.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	62,980	62,257.00	98.85	0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12,893,619,952	10,966,489,283.00	85.05	11,145,339,816.00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12,705,301,636	10,780,939,462.00	84.85	11,145,339,816.00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	188,318,316	185,549,821.00	98.53	0
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	468,285,728	363,375,553.00	77.6	374,803,046.00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	458,522,428	353,756,433.00	77.15	363,953,046.00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	9,763,300	9,619,120.00	98.52	10,850,000.00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1,312,515,591	1,090,125,600.00	83.06	1,095,124,803.00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1,283,227,062	1,061,269,591.00	82.7	1,095,124,803.00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	29,288,529	28,856,009.00	98.52	0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	61,335,149,342	58,203,214,296.00	94.89	59,584,095,453.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	29,353,140,761	27,858,528,120.00	94.91	28,999,838,353.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	29,353,140,761	27,858,528,120.00	94.91	28,999,838,353.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4,136,813,932	3,926,425,440.00	94.91	4,000,764,229.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4,136,813,932	3,926,425,440.00	94.91	4,000,764,229.00

5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	880,440,625	841,475,000.00	95.57	774,250,000.00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	880,440,625	841,475,000.00	95.57	774,250,000.00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	26,964,754,024	25,576,785,736.00	94.85	25,809,242,871.00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	26,964,754,024	25,576,785,736.00	94.85	25,809,242,871.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	66,009,192,320	63,565,876,649.20	96.3	64,941,206,348.00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	793,230,000	659,845,808.00	83.18	622,963,068.00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1,400,000	1,365,817.00	97.56	1,134,939.00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	44,250,000	44,005,167.00	99.45	36,209,949.00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	80,000	78,230.00	97.79	59,759.00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	16,000,000	15,400,209.00	96.25	11,999,656.00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	560,000,000	552,489,167.00	98.66	529,865,383.00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	3,000,000	2,933,500.00	97.78	799,951.00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	100,000	49,044.00	49.04	49,221.00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	400,000	196,050.00	49.01	97,113.00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20,000,000	0	0	1,942,266.00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	104,000,000	0	0	0
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	44,000,000	43,328,624.00	98.47	40,804,831.00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	50,272,352,000	48,556,459,400.00	96.59	50,601,310,700.00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	50,272,352,000	48,556,459,400.00	96.59	50,601,310,700.00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	150,000,000	139,320,000.00	92.88	142,317,600.00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	150,000,000	139,320,000.00	92.88	142,317,600.00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1,377,750,000	1,362,000,000.00	98.86	1,317,000,000.00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1,377,750,000	1,362,000,000.00	98.86	1,317,000,000.00

5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6,475,171,820	6,027,494,441.20	93.09	5,606,751,580.00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6,475,171,820	6,027,494,441.20	93.09	5,606,751,580.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6,129,128,500	6,014,857,000.00	98.14	5,882,699,400.00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5,465,168,500	5,383,867,000.00	98.51	5,181,338,400.00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	588,960,000	555,990,000.00	94.4	641,361,000.00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	75,000,000	75,000,000.00	100	60,000,000.00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	811,560,000	805,900,000.00	99.3	768,164,000.00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	811,560,000	805,900,000.00	99.3	768,164,000.00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17,953,151,951	17,803,090,060.00	99.16	17,866,488,905.00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782,040,000	782,040,000.00	100	782,040,000.00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782,040,000	782,040,000.00	100	782,040,000.00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	89,434,800	89,434,800.00	100	89,434,800.00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	89,434,800	89,434,800.00	100	89,434,800.00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	112,313,600	112,313,600.00	100	104,291,200.00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	112,313,600	112,313,600.00	100	104,291,200.00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67,032,000	67,032,000.00	100	67,032,000.00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67,032,000	67,032,000.00	100	67,032,000.00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,133,958,000	1,133,958,000.00	100	1,133,958,000.00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,133,958,000	1,133,958,000.00	100	1,133,958,000.00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	101,946,600	101,946,600.00	100	101,946,600.00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	101,946,600	101,946,600.00	100	101,946,600.00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19,183,500	19,183,500.00	100	17,539,200.00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19,183,500	19,183,500.00	100	17,539,200.00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4,410,000,000	4,410,000,000.00	100	4,410,000,000.00

5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4,410,000,000	4,410,000,000.00	100	4,410,000,000.00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1,102,500,000	1,102,500,000.00	100	1,102,500,000.00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1,102,500,000	1,102,500,000.00	100	1,102,500,000.00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	363,749,064	357,165,192.00	98.19	355,715,187.00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	363,749,064	357,165,192.00	98.19	355,715,187.00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4,453,947,968	4,361,676,368.00	97.93	4,436,191,918.00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	118,757,696	68,757,696.00	57.9	101,001,646.00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1,608,768	1,608,768.00	100	1,608,768.00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4,826,304	4,826,304.00	100	4,826,304.00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4,328,755,200	4,286,483,600.00	99.02	4,328,755,200.00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5,265,840,000	5,265,840,000.00	100	5,265,840,000.00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5,265,840,000	5,265,840,000.00	100	5,265,840,000.00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	51,206,419	0	0	0
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	51,206,419	0	0	0
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	214,145,000	176,221,900.00	82.29	232,927,617.00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0	0	0	23,400,000.00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0	0	0	23,400,000.00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0	0	0	1,764,000.00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0	0	0	1,764,000.00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	9,800,000	7,441,200.00	75.93	45,830,000.00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	9,800,000	7,441,200.00	75.93	45,830,000.00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0	0	0	1,810,500.00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0	0	0	1,810,500.00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0	0	0	300,119.00

5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0	0	0	300,119.00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0	0	0	800
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0	0	0	800
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4,200,000	233,200.00	5.55	2,370,000.00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4,200,000	233,200.00	5.55	2,370,000.00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0	0	0	46,800.00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0	0	0	46,800.00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0	0	0	140,400.00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0	0	0	140,400.00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	200,145,000	168,547,500.00	84.21	157,264,998.00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	350,000	350,000.00	100	337,500.00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	11,300,000	11,250,000.00	99.56	9,125,000.00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	20,000	20,000.00	100	15,000.00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	4,000,000	3,812,500.00	95.31	3,000,000.00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	141,500,000	141,250,000.00	99.82	133,750,000.00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	750,000	725,000.00	96.67	200,000.00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	25,000	12,500.00	50	12,498.00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	100,000	50,000.00	50	25,000.00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5,000,000	0	0	500,000.00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	26,000,000	0	0	0
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	11,100,000	11,077,500.00	99.8	10,300,000.00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	441,600,000	441,600,000.00	100	508,100,000.00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201,600,000	201,600,000.00	100	201,600,000.00

5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201,600,000	201,600,000.00	100	201,600,000.00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	240,000,000	240,000,000.00	100	306,500,000.00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	240,000,000	240,000,000.00	100	306,500,000.00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	6,760,732,724	4,025,106,000.00	59.54	0
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	6,760,732,724	4,025,106,000.00	59.54	0
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	6,760,732,724	4,025,106,000.00	59.54	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404,993,010,952	373,699,624,849.35	92.27	379,865,428,669.07
5.1.02.01	Belanja Barang	101,675,313,905	97,760,364,979.00	96.15	100,490,280,770.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	101,561,165,805	97,647,068,379.00	96.15	100,430,524,160.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2,150,502,981	2,139,140,961.00	99.47	2,428,705,499.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	769,443,124	715,752,177.00	93.02	1,426,605,071.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,430,711,819	1,330,134,329.00	92.97	890,697,879.00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	87,506,700	85,855,000.00	98.11	149,970,650.00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	234,993,400	216,558,000.00	92.15	563,418,158.00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	64,624,200	57,237,000.00	88.57	65,670,000.00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	739,660,000	699,620,000.00	94.59	810,621,556.00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	116,584,000	106,776,000.00	91.59	111,201,760.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	994,586,140	950,801,232.00	95.6	688,639,884.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15,257,100	15,151,550.00	99.31	45,663,450.00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	5,035,510,288	4,830,556,203.00	95.93	4,392,158,291.00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1,422,324,463	1,256,651,143.00	88.35	2,433,141,969.00
5.1.02.01.01.0017	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	1,000,000	1,000,000.00	100	10,000,000.00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	2,410,000	2,410,000.00	100	3,370,000.00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	37,568,742	37,568,742.00	100	599,600,975.00

5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	71,451,300	71,365,200.00	99.88	24,763,160.00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	52,989,900	51,177,500.00	96.58	9,589,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6,563,511,809	6,437,489,274.00	98.08	5,652,208,656.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,897,129,380	1,841,783,015.00	97.08	1,480,971,079.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,525,458,623	7,358,644,767.00	97.78	8,135,333,107.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	380,570,650	358,608,000.00	94.23	373,634,500.00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	45,000,000	40,000,000.00	88.89	40,290,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,662,904,764	2,536,224,031.00	95.24	2,985,588,684.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1,474,137,407	1,461,937,757.00	99.17	597,538,320.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2,174,604,628	2,136,253,876.00	98.24	1,804,590,883.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3,625,724,500	3,621,282,750.00	99.88	1,716,583,220.00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	957,120,650	957,120,650.00	100	916,337,125.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	309,282,900	308,660,500.00	99.8	91,225,200.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,003,951,463	992,271,525.00	98.84	1,470,013,165.00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3,632,977,671	3,623,443,270.00	99.74	5,765,891,262.00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2,682,834,410	2,582,718,302.00	96.27	67,023,080.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	27,233,906,723	27,054,059,203.00	99.34	33,808,372,429.00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0	0	0	748,885,779.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5,445,793,900	3,872,620,000.00	71.11	1,106,120,735.00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	657,830,000	657,830,000.00	100	491,172,150.00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	11,250,000	11,000,000.00	97.78	170,323,570.00
5.1.02.01.01.0048	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	3,809,100	3,304,800.00	86.76	0

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,116,991,400	10,388,775,202.00	93.45	9,907,074,290.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3,938,144,500	3,913,082,900.00	99.36	3,808,709,914.00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	30,800,000	30,800,000.00	100	30,800,000.00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1,261,762,670	1,260,846,220.00	99.93	790,768,700.00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0	0	0	2,000,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3,454,550,000	3,386,562,800.00	98.03	2,739,706,500.00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	39,000,000	39,000,000.00	100	24,000,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3,450,000	3,450,000.00	100	147,380,000.00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	0	0	0	4,750,000.00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	0	0	0	9,000,000.00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	400,000	400,000.00	100	2,000,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	133,515,500	133,515,500.00	100	328,510,550.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6,990,000	6,990,000.00	100	332,812,860.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	48,739,000	48,739,000.00	100	227,091,100.00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	11,900,000	11,900,000.00	100	0
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	114,148,100	113,296,600.00	99.25	59,756,610.00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	79,906,800	79,906,800.00	100	46,666,500.00
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	0	0	0	5,700,000.00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	34,241,300	33,389,800.00	97.51	7,390,110.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	136,476,774,437	129,215,468,964.90	94.68	124,087,341,407.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	90,596,057,560	85,880,429,105.90	94.79	85,564,781,969.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,237,282,500	2,696,152,500.00	83.28	2,462,077,500.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4,555,545,000	4,390,615,000.00	96.38	4,661,864,000.00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	120,000,000	120,000,000.00	100	64,000,000.00

5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	983,300,000	960,190,000.00	97.65	918,810,000.00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	161,600,000	118,600,000.00	73.39	97,772,000.00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	64,900,000	64,900,000.00	100	71,500,064.00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	1,580,000	1,580,000.00	100	52,303,076.00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	207,640,000	131,140,000.00	63.16	545,755,000.00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	414,600,000	414,600,000.00	100	433,900,000.00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	18,066,419,450	17,922,069,450.00	99.2	17,221,612,740.00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4,693,456,000	4,033,600,527.00	85.94	4,067,509,162.00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	233,100,000	55,538,498.00	23.83	33,955,000.00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	541,190,650	541,170,650.00	100	552,830,000.00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1,381,000,000	1,381,000,000.00	100	81,750,000.00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1,794,120,000	1,791,680,000.00	99.86	1,579,720,000.00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1,259,450,000	1,223,340,000.00	97.13	1,232,820,000.00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	549,800,000	549,300,000.00	99.91	789,550,000.00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	399,400,000	399,400,000.00	100	399,400,000.00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	72,000,000	72,000,000.00	100	0
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	117,320,000	117,320,000.00	100	419,340,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6,505,306,000	6,414,306,000.00	98.6	6,129,466,500.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	981,820,000	896,620,000.00	91.32	606,150,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5,051,800,000	5,027,555,600.00	99.52	6,418,585,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6,360,338,600	6,057,229,900.00	95.23	4,540,689,500.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7,247,266,000	7,207,407,069.90	99.45	6,783,186,168.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2,338,645,000	2,314,477,618.00	98.97	1,930,361,800.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	454,800,000	430,450,000.00	94.65	444,800,000.00

5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5,820,000	5,820,000.00	100	3,785,000.00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveilliance ISO	1,183,160,000	1,179,640,000.00	99.7	1,382,397,000.00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	122,340,000	119,440,000.00	97.63	162,203,220.00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	3,300,000	3,300,000.00	100	2,240,000.00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	13,000,000	13,000,000.00	100	13,000,000.00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	48,330,000	48,294,500.00	99.93	30,931,308.00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	268,145,828	268,145,828.00	100	1,729,246,908.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1,000,000	1,000,000.00	100	0
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	10,820,000	10,820,000.00	100	5,945,000.00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	19,866,000	18,062,255.00	90.92	0
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	9,590,000	9,590,000.00	100	13,340,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1,458,791,750	1,303,421,704.00	89.35	1,519,560,886.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	80,872,000	76,172,000.00	94.19	137,218,787.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	536,643,568	339,916,200.00	63.34	374,292,336.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	12,197,791,529	11,342,922,827.00	92.99	10,213,679,157.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2,542,104,500	2,417,390,682.00	95.09	2,584,863,900.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3,385,014,985	2,872,500,865.00	84.86	2,871,813,462.00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	33,775,000	13,049,379.00	38.64	857,500.00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	123,387,200	93,415,700.00	75.71	33,391,782.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	758,386,000	412,044,353.00	54.33	486,725,323.00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	0	0	0	1,446,892,890.00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	240,000	240,000.00	100	12,690,000.00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	12,505,902,985	12,385,972,998.00	99.04	12,315,480,526.00
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	178,285,968	160,675,200.00	90.12	234,212,828.00

5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	727,739,600	701,349,000.00	96.37	11,499,527,200.00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10,882,730,532	10,882,730,400.00	100	0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	171,683,680	159,414,104.00	92.85	154,382,385.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	212,394,768	195,272,912.00	91.94	124,829,452.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	333,068,437	286,531,382.00	86.03	302,528,661.00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	0	0	0	24,581,634.00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0	0	0	24,581,634.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2,469,196,300	2,416,335,728.00	97.86	1,927,240,320.00
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	0	0	0	1,550,000.00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	60,890,000	60,890,000.00	100	0
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	10,000,000	10,000,000.00	100	4,000,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	967,468,600	938,441,328.00	97	569,908,220.00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	162,182,900	161,932,900.00	99.85	71,292,600.00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	500,000	500,000.00	100	5,850,000.00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	50,600,000	50,600,000.00	100	18,400,000.00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	33,459,000	33,450,000.00	99.97	33,450,000.00
5.1.02.02.04.0102	Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya	33,000,000	33,000,000.00	100	0
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	982,523,300	972,908,000.00	99.02	1,014,237,500.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	93,912,500	82,377,500.00	87.72	97,130,000.00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5,000,000	5,000,000.00	100	14,985,000.00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0	0	0	33,500,000.00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	7,150,000	7,150,000.00	100	2,150,000.00
5.1.02.02.04.0192	Belanja Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	42,000,000	39,576,000.00	94.23	0
5.1.02.02.04.0310	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0	0	0	2,000,000.00

5.1.02.02.04.0317	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	3,610,000	3,610,000.00	100	320,000.00
5.1.02.02.04.0318	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0	0	0	12,730,000.00
5.1.02.02.04.0319	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	1,500,000	1,500,000.00	100	0
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	9,400,000	9,400,000.00	100	15,035,000.00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	0	0	0	19,922,000.00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	6,000,000	6,000,000.00	100	10,780,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	847,750,000	771,971,000.00	91.06	638,737,240.00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	10,000,000	10,000,000.00	100	0
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	0	0	0	1,500,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	455,000,000	445,800,000.00	97.98	608,310,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	382,750,000	316,171,000.00	82.61	28,927,240.00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	592,000,000	577,400,000.00	97.53	416,750,000.00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	52,000,000	48,000,000.00	92.31	18,700,000.00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	458,000,000	447,400,000.00	97.69	366,400,000.00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	82,000,000	82,000,000.00	100	31,650,000.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	25,303,378,092	23,398,556,775.00	92.47	21,980,483,618.00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	7,750,000	4,560,000.00	58.84	57,600,000.00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	9,953,432,680	9,513,520,312.00	95.58	10,487,484,762.00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	2,187,362,150	2,164,383,272.00	98.95	268,383,570.00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0	0	0	988,577,500.00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	902,202,188	401,357,866.00	44.49	0
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0	0	0	4,370,000.00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	12,218,891,074	11,281,739,825.00	92.33	10,069,471,636.00

5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0	0	0	3,291,150.00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0	0	0	99,715,000.00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	33,740,000	32,995,500.00	97.79	1,590,000.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7,000,000	0	0	0
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	7,000,000	0	0	0
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	50,000,000	50,000,000.00	100	130,000,000.00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0	0	0	30,000,000.00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	50,000,000	50,000,000.00	100	100,000,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4,091,577,000	3,720,891,358.00	90.94	1,089,286,100.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3,783,626,000	3,483,310,358.00	92.06	628,561,100.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	0	0	0	55,349,750.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0	0	0	318,430,250.00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	307,951,000	237,581,000.00	77.15	86,945,000.00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	13,912,500	13,912,000.00	100	0
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	13,912,500	13,912,000.00	100	0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	45,655,858,243	43,304,796,267.00	94.85	49,850,431,826.00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0	0	0	349,311,408.00
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	0	0	0	349,311,408.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11,979,283,551	11,519,436,766.00	96.16	11,579,502,469.00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	0	0	0	80,879,934.00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0	0	0	28,883,140.00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	0	0	0	142,174,780.00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	0	0	0	7,008,000.00

5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4,608,902,600	4,418,807,536.00	95.88	8,590,571,973.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1,900,000	1,900,000.00	100	4,100,000.00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0	0	0	7,000,000.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2,013,000,000	1,953,656,359.00	97.05	0
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	189,955,584	189,914,000.00	99.98	0
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	2,471,831,797	2,418,508,828.00	97.84	0
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	16,000,000	15,960,000.00	99.75	0
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	10,000,000	9,000,000.00	90	0
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	154,000,000	151,919,000.00	98.65	0
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0	0	0	22,750,000.00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	7,885,000	7,885,000.00	100	26,982,137.00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	44,257,300	44,257,300.00	100	82,879,100.00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6,108,000	6,108,000.00	100	13,704,400.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	146,408,000	142,458,000.00	97.3	132,519,100.00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	37,410,000	37,410,000.00	100	83,731,000.00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	576,029,890	555,581,050.00	96.45	805,874,305.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat	637,355,000	627,539,300.00	98.46	557,809,800.00

	Pendingin				
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	36,427,225	36,193,950.00	99.36	11,409,000.00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0	0	0	350,000.00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	15,550,000	15,550,000.00	100	44,925,400.00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0	0	0	4,722,500.00
5.1.02.03.02.0146	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	0	0	0	7,000,000.00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	175,000,000	84,780,000.00	48.45	0
5.1.02.03.02.0309	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	350,000	350,000.00	100	0
5.1.02.03.02.0312	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	0	0	0	1,611,000.00
5.1.02.03.02.0317	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0	0	0	400,000.00
5.1.02.03.02.0318	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	4,384,000	4,384,000.00	100	10,000,000.00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	14,800,000	12,030,000.00	81.28	900,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	372,241,800	359,863,838.00	96.67	551,956,100.00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	172,320,000	158,213,250.00	91.81	41,395,000.00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	100,000	100,000.00	100	1,250,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	24,625,000	24,625,000.00	100	13,570,000.00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	94,416,500	94,416,500.00	100	97,014,600.00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	120,150,855	120,150,855.00	100	188,765,200.00
5.1.02.03.02.0453	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	11,500,000	11,500,000.00	100	0

5.1.02.03.02.0463	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	300,000	300,000.00	100	0
5.1.02.03.02.0504	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	0	0	0	8,531,000.00
5.1.02.03.02.0505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	8,575,000	8,575,000.00	100	8,835,000.00
5.1.02.03.02.0506	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	7,500,000	7,500,000.00	100	0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13,229,754,260	13,130,751,433.00	99.25	4,190,742,640.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	11,313,592,260	11,248,425,918.00	99.42	2,367,185,625.00
5.1.02.03.03.0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	0	0	0	3,104,000.00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0	0	0	375,000.00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0	0	0	600,000.00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6,450,000	6,450,000.00	100	56,870,000.00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1,664,175,500	1,630,648,466.00	97.99	805,096,000.00
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0	0	0	107,948,327.00
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	100,000	100,000.00	100	0
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	22,070,000	21,970,000.00	99.55	623,301,075.00
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0	0	0	8,350,000.00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	24,714,000	24,714,000.00	100	45,065,000.00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	198,652,500	198,443,049.00	99.89	0

5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0	0	0	28,000,000.00
5.1.02.03.03.0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	0	0	0	144,847,613.00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20,067,990,832	18,275,985,868.00	91.07	33,345,105,347.00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	19,829,715,312	18,056,105,988.00	91.06	33,230,242,597.00
5.1.02.03.04.0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	1,575,000	1,575,000.00	100	3,085,000.00
5.1.02.03.04.0076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	16,732,800	16,732,800.00	100	5,920,000.00
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	49,637,720	48,360,360.00	97.43	0
5.1.02.03.04.0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	170,330,000	153,211,720.00	89.95	105,857,750.00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40,329,600	40,329,600.00	100	385,769,962.00
5.1.02.03.05.0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	25,599,600	25,599,600.00	100	369,663,412.00
5.1.02.03.05.0021	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya	950,000	950,000.00	100	6,000,000.00
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	9,780,000	9,780,000.00	100	1,800,000.00
5.1.02.03.05.0030	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	4,000,000	4,000,000.00	100	8,306,550.00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	338,500,000	338,292,600.00	99.94	0
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	329,500,000	329,292,600.00	99.94	0
5.1.02.03.06.0009	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	9,000,000	9,000,000.00	100	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	74,516,628,787	71,135,998,447.00	95.46	70,695,772,900.66
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	74,516,628,787	71,135,998,447.00	95.46	70,695,772,900.66
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50,559,464,001	49,573,771,956.00	98.05	46,525,067,200.66
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	18,200,000	3,500,000.00	19.23	13,200,000.00

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,978,713,575	19,341,370,588.00	92.2	19,972,059,135.00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,564,784,640	851,229,200.00	54.4	771,988,400.00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,395,466,571	1,366,126,703.00	97.9	3,413,458,165.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4,916,391,500	4,813,490,900.00	97.91	2,144,433,650.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2,369,886,000	2,336,914,000.00	98.61	878,051,150.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	549,636,000	517,064,000.00	94.07	836,051,150.00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	838,250,000	838,250,000.00	100	12,000,000.00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	882,000,000	881,600,000.00	99.95	0
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	100,000,000	100,000,000.00	100	30,000,000.00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2,546,505,500	2,476,576,900.00	97.25	1,266,382,500.00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2,035,897,500	1,992,822,500.00	97.88	1,030,382,500.00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	510,608,000	483,754,400.00	94.74	236,000,000.00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	41,752,044,080	27,469,505,291.45	65.79	32,597,168,115.41
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	41,752,044,080	27,469,505,291.45	65.79	32,597,168,115.41
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	41,752,044,080	27,469,505,291.45	65.79	32,597,168,115.41
5.1.03	Belanja Bunga	8,616,514,260	8,616,514,260.00	100	0
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	8,616,514,260	8,616,514,260.00	100	0
5.1.03.01.06	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	8,616,514,260	8,616,514,260.00	100	0
5.1.03.01.06.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	8,616,514,260	8,616,514,260.00	100	0
5.1.04	Belanja Subsidi	1,070,513,315	1,069,500,079.00	99.91	1,055,683,730.00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1,070,513,315	1,069,500,079.00	99.91	1,055,683,730.00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1,070,513,315	1,069,500,079.00	99.91	1,055,683,730.00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1,070,513,315	1,069,500,079.00	99.91	1,055,683,730.00

5.1.05	Belanja Hibah	28,799,523,480	28,704,276,132.00	99.67	13,096,663,278.00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0	0	0	300,000,000.00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0	0	0	300,000,000.00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0	0	0	300,000,000.00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	780,000,000.00
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	780,000,000.00
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	780,000,000.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25,020,573,029	24,880,208,000.00	99.44	8,473,625,155.00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21,555,676,229	21,442,892,000.00	99.48	6,332,657,000.00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	21,555,676,229	21,442,892,000.00	99.48	6,332,657,000.00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	54,496,800	54,216,000.00	99.48	1,224,968,155.00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0	0	0	1,168,500,000.00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	54,496,800	54,216,000.00	99.48	56,468,155.00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3,310,400,000	3,283,100,000.00	99.18	916,000,000.00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3,300,400,000	3,273,200,000.00	99.18	916,000,000.00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10,000,000	9,900,000.00	99	0
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100,000,000	100,000,000.00	100	0
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100,000,000	100,000,000.00	100	0
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2,758,582,319	2,803,700,000.00	101.64	2,522,670,000.00

5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2,758,582,319	2,803,700,000.00	101.64	2,522,670,000.00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2,758,582,319	2,803,700,000.00	101.64	2,522,670,000.00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,020,368,132	1,020,368,132.00	100	1,020,368,123.00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,020,368,132	1,020,368,132.00	100	1,020,368,123.00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,020,368,132	1,020,368,132.00	100	1,020,368,123.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	160,000,000.00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0	0	0	160,000,000.00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0	0	0	160,000,000.00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0	0	0	160,000,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	876,569,999,915	792,011,129,138.55	90.35	774,488,457,062.07
5.2	BELANJA MODAL	250,517,685,422	242,656,273,135.00	96.86	387,530,343,306.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36,753,851,791	31,585,364,498.00	85.94	71,223,599,340.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	151,370,252	149,040,000.00	98.46	3,926,770,800.00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	35,439,250	35,439,000.00	100	3,731,766,000.00
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Tractor	35,439,250	35,439,000.00	100	2,710,566,000.00
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	0	0	0	1,021,200,000.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	115,931,002	113,601,000.00	97.99	195,004,800.00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0	0	0	8,593,000.00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	115,931,002	113,601,000.00	97.99	186,411,800.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4,643,932,440	4,475,102,500.00	96.36	4,083,885,580.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4,565,628,540	4,396,819,000.00	96.3	4,029,364,570.00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,898,651,100	1,885,560,000.00	99.31	2,100,865,000.00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	692,942,800	644,100,000.00	92.95	92,700,000.00

5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1,176,166,740	1,080,391,000.00	91.86	558,457,100.00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	111,167,900	106,665,000.00	95.95	0
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	349,200,000	342,603,000.00	98.11	49,500,000.00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	337,500,000	337,500,000.00	100	1,227,842,470.00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	9,403,500	9,403,500.00	100	6,626,010.00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	9,403,500	9,403,500.00	100	6,626,010.00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0	0	0	47,895,000.00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0	0	0	47,895,000.00
5.2.02.02.05	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	68,900,400	68,880,000.00	99.97	0
5.2.02.02.05.0001	Belanja Modal Kapal Terbang	68,900,400	68,880,000.00	99.97	0
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1,626,324,816	1,626,074,555.00	99.98	38,543,196.00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0	0	0	4,394,700.00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0	0	0	4,394,700.00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6,691,650	6,514,055.00	97.35	9,237,000.00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	0	0	0	1,033,200.00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	4,828,250	4,814,100.00	99.71	545,500.00
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	0	0	0	1,027,500.00
5.2.02.03.02.0011	Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	1,863,400	1,699,955.00	91.23	0
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	0	0	0	6,630,800.00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1,619,633,166	1,619,560,500.00	100	24,911,496.00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	19,962,563	19,960,500.00	99.99	0
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	3,010,000	3,010,000.00	100	8,953,046.00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	1,581,250,000	1,581,250,000.00	100	0
5.2.02.03.03.0017	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam	0	0	0	7,863,450.00

5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	15,410,603	15,340,000.00	99.54	8,095,000.00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	782,547,760	761,377,500.00	97.29	183,440,230.00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	782,547,760	761,377,500.00	97.29	183,440,230.00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	460,389,864	441,960,000.00	96	157,039,140.00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	44,437,900	41,725,500.00	93.9	7,011,090.00
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	277,719,996	277,692,000.00	99.99	18,750,000.00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0	0	0	640,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7,285,858,943	7,234,842,424.00	99.3	14,180,476,408.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1,431,123,350	1,425,919,612.00	99.64	1,530,120,559.00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2,299,200	2,297,800.00	99.94	1,102,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	493,312,970	492,671,870.00	99.87	124,548,420.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	935,511,180	930,949,942.00	99.51	1,404,470,139.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5,848,098,655	5,802,285,874.00	99.22	12,637,087,849.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4,459,218,765	4,421,951,793.00	99.16	10,979,355,009.00
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	2,740,000	2,740,000.00	100	7,616,000.00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	10,727,400	10,727,400.00	100	65,093,020.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	620,013,536	619,223,608.00	99.87	555,746,952.00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	176,663,100	176,414,400.00	99.86	42,686,686.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	402,142,354	394,795,173.00	98.17	873,203,682.00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	176,593,500	176,433,500.00	99.91	113,386,500.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6,636,938	6,636,938.00	100	13,268,000.00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	6,636,938	6,636,938.00	100	0
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0	0	0	13,268,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	484,460,704	483,435,838.00	99.79	579,789,066.00

5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	414,528,554	413,511,463.00	99.75	570,249,066.00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	248,180,803	247,560,725.00	99.75	73,887,716.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	134,259,651	133,862,638.00	99.7	317,342,090.00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	11,593,400	11,593,400.00	100	49,999,900.00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	20,494,700	20,494,700.00	100	31,386,000.00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0	0	0	8,000,000.00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0	0	0	89,633,360.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	7,143,750	7,139,375.00	99.94	6,090,000.00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	5,034,375	5,034,375.00	100	0
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	0	0	0	6,090,000.00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	2,109,375	2,105,000.00	99.79	0
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	62,788,400	62,785,000.00	99.99	3,450,000.00
5.2.02.06.03.0003	Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM	1,000,000	1,000,000.00	100	0
5.2.02.06.03.0008	Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM	0	0	0	2,250,000.00
5.2.02.06.03.0019	Belanja Modal Switcher Antena	0	0	0	1,200,000.00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	61,788,400	61,785,000.00	99.99	0
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9,626,457,474	5,445,382,770.00	56.57	26,681,261,224.00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1,963,339,050	1,903,901,170.00	96.97	24,121,314,224.00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	452,751,700	423,593,770.00	93.56	8,553,661,877.00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0	0	0	4,654,784,000.00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	158,313,850	158,256,500.00	99.96	3,065,696,409.00
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0	0	0	1,249,265,494.00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	565,800,000	564,500,000.00	99.77	0
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	8,558,200	8,558,200.00	100	0

5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	517,852,000	499,328,000.00	96.42	4,637,586,664.00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	81,549,000	74,014,700.00	90.76	36,925,260.00
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	30,293,500	30,250,000.00	99.86	0
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	0	0	0	1,923,394,520.00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	148,220,800	145,400,000.00	98.1	0
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	7,663,118,424	3,541,481,600.00	46.21	2,559,947,000.00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	7,663,118,424	3,541,481,600.00	46.21	2,559,947,000.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	962,117,700	807,697,500.00	83.95	11,301,060,907.00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0	0	0	2,165,701,217.00
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0	0	0	2,550,000.00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0	0	0	2,161,306,217.00
5.2.02.08.01.0042	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	0	0	0	1,845,000.00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	962,117,700	807,697,500.00	83.95	9,135,359,690.00
5.2.02.08.03.0001	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	1,200,000	1,200,000.00	100	1,200,000.00
5.2.02.08.03.0002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika	3,361,000	3,361,000.00	100	3,285,000.00
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	5,550,000	5,550,000.00	100	7,728,500.00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	0	0	0	719,608,800.00
5.2.02.08.03.0007	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPS	3,340,000	3,340,000.00	100	3,177,900.00
5.2.02.08.03.0008	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Agama	400,000	400,000.00	100	1,020,000.00
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	16,225,000	16,225,000.00	100	5,328,000.00
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Kesenian	18,430,000	18,430,000.00	100	7,200,000.00
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Olahraga	27,430,000	27,430,000.00	100	14,745,000.00
5.2.02.08.03.0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: PKN	136,200	136,200.00	100	0
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	0	0	0	74,998,800.00

5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	886,045,500	731,625,300.00	82.57	8,297,067,690.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6,583,458,810	6,536,351,984.00	99.28	6,210,924,360.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4,790,017,155	4,756,240,389.00	99.29	3,947,424,971.00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	112,361,000	112,361,000.00	100	216,030,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4,410,370,280	4,377,037,764.00	99.24	2,769,240,821.00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	267,285,875	266,841,625.00	99.83	962,154,150.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1,793,441,655	1,780,111,595.00	99.26	2,263,499,389.00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	826,647,933	818,005,102.00	98.95	175,718,550.00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	30,502,300	30,502,300.00	100	7,560,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	299,297,266	297,930,730.00	99.54	277,668,922.00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	43,422,400	43,422,400.00	100	360,626,440.00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	593,571,756	590,251,063.00	99.44	1,441,925,477.00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	2,227,200	2,227,200.00	100	81,429,000.00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	2,227,200	2,227,200.00	100	81,429,000.00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	0	0	0	80,679,000.00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	2,227,200	2,227,200.00	100	750,000.00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	5,997,000	5,997,000.00	100	19,100,000.00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5,997,000	5,997,000.00	100	19,100,000.00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	5,997,000	5,997,000.00	100	19,100,000.00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	123,703,292	123,413,600.00	99.77	0
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	123,703,292	123,413,600.00	99.77	0
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	121,703,292	121,413,600.00	99.76	0
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	2,000,000	2,000,000.00	100	0
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	37,611,500	37,611,500.00	100	43,522,000.00

5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	37,611,500	37,611,500.00	100	43,522,000.00
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	1,400,000	1,400,000.00	100	7,475,000.00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	30,486,500	30,486,500.00	100	3,000,000.00
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	4,175,000	4,175,000.00	100	8,750,000.00
5.2.02.19.01.0005	Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara	1,550,000	1,550,000.00	100	0
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0	0	0	24,297,000.00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4,437,783,900	3,896,810,127.00	87.81	3,893,396,569.00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4,437,783,900	3,896,810,127.00	87.81	3,893,396,569.00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4,437,783,900	3,896,810,127.00	87.81	3,893,396,569.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59,980,403,195	59,229,090,330.00	98.75	84,642,985,302.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	47,691,192,442	46,949,752,832.00	98.45	78,067,366,319.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	47,691,192,442	46,949,752,832.00	98.45	78,067,366,319.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	18,169,540,446	17,876,233,043.00	98.39	3,739,246,701.00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0	0	0	34,464,954,871.00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0	0	0	6,330,714,712.00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	27,723,250,578	27,307,498,651.00	98.5	25,147,272,685.00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0	0	0	127,479,730.00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	562,333,200	562,139,871.00	99.97	0
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0	0	0	4,410,615,822.00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	386,025,466	354,612,632.00	91.86	0
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0	0	0	2,553,312,000.00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0	0	0	1,238,894,548.00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	850,042,752	849,268,635.00	99.91	54,875,250.00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	3,712,500	3,712,500.00	100	0

5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	3,712,500	3,712,500.00	100	0
5.2.03.02.01.0004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	3,712,500	3,712,500.00	100	0
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	12,285,498,253	12,275,624,998.00	99.92	6,575,618,983.00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	12,285,498,253	12,275,624,998.00	99.92	6,575,618,983.00
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	175,000,000	173,880,000.00	99.36	234,200,000.00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	0	0	0	99,915,583.00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	12,110,498,253	12,101,744,998.00	99.93	6,241,503,400.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147,540,870,336	145,617,168,707.00	98.7	226,851,955,350.00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	108,975,440,854	107,320,438,949.00	98.48	198,974,295,679.00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	102,367,595,107	100,733,574,961.00	98.4	187,422,811,738.00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	82,229,391,187	80,686,258,387.00	98.12	167,927,017,374.00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	19,953,205,900	19,862,436,574.00	99.55	19,495,794,364.00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	184,998,020	184,880,000.00	99.94	0
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	6,607,845,747	6,586,863,988.00	99.68	11,551,483,941.00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	288,134,660	273,289,203.00	94.85	0
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	1,984,900,000	1,984,900,000.00	100	0
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	1,395,035,336	1,394,955,435.00	99.99	0
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	2,939,775,751	2,933,719,350.00	99.79	11,551,483,941.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	24,891,824,196	24,746,487,977.00	99.42	13,972,182,440.00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	7,547,057,476	7,408,553,420.00	98.16	7,764,600,983.00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	4,610,023,058	4,477,428,108.00	97.12	7,764,600,983.00
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	2,206,534,418	2,206,534,417.00	100	0
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	730,500,000	724,590,895.00	99.19	0
5.2.04.02.03	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	0	0	0	700,987,742.00

5.2.04.02.03.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	0	0	0	700,987,742.00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	0	0	164,888,028.00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0	0	0	164,888,028.00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	23,748,000	23,748,000.00	100	19,394,000.00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	23,748,000	23,748,000.00	100	19,394,000.00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	17,321,018,720	17,314,186,557.00	99.96	5,322,311,687.00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	17,321,018,720	17,314,186,557.00	99.96	0
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	0	0	0	5,322,311,687.00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2,674,570,000	2,624,630,000.00	98.13	189,914,000.00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	4,630,000	4,630,000.00	100	2,000,000.00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	4,630,000	4,630,000.00	100	2,000,000.00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2,669,940,000	2,620,000,000.00	98.13	0
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	2,669,940,000	2,620,000,000.00	98.13	0
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0	0	0	187,914,000.00
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0	0	0	187,914,000.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	10,999,035,286	10,925,611,781.00	99.33	13,715,563,231.00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1,691,690,000	1,660,750,815.00	98.17	10,436,440,436.00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	1,691,690,000	1,660,750,815.00	98.17	10,436,440,436.00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	9,300,345,286	9,257,860,966.00	99.54	3,256,330,475.00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	9,300,345,286	9,257,860,966.00	99.54	3,256,330,475.00
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	7,000,000	7,000,000.00	100	22,792,320.00
5.2.04.04.03.0005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	7,000,000	7,000,000.00	100	22,792,320.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6,242,560,100	6,224,649,600.00	99.71	4,811,803,314.00

5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5,990,481,800	5,973,105,300.00	99.71	4,381,300,854.00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5,888,858,700	5,871,506,700.00	99.71	4,189,144,994.00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	5,481,539,600	5,465,727,000.00	99.71	3,793,172,244.00
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat	2,601,800	2,601,800.00	100	825,000.00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	83,136,300	83,132,780.00	100	73,656,103.00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	34,743,600	34,709,720.00	99.9	39,169,168.00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	65,032,600	65,032,600.00	100	61,312,125.00
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	108,679,900	108,679,900.00	100	149,083,511.00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	17,119,000	17,119,000.00	100	15,062,000.00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	86,491,600	86,491,600.00	100	52,369,343.00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	700,400	700,400.00	100	4,495,500.00
5.2.05.01.01.0010	Belanja Modal Serial	8,813,900	7,311,900.00	82.96	0
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	101,623,100	101,598,600.00	99.98	192,155,860.00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	99,473,100	99,448,600.00	99.98	192,155,860.00
5.2.05.01.02.0002	Belanja Modal Bentuk Mikro (Microform)	2,150,000	2,150,000.00	100	0
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	200,578,300	200,044,300.00	99.73	146,918,760.00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	129,884,300	129,884,300.00	100	124,138,610.00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	56,055,100	56,055,100.00	100	82,784,500.00
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	14,180,000	14,180,000.00	100	34,000,000.00
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	59,649,200	59,649,200.00	100	7,354,110.00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	4,650,000	4,650,000.00	100	22,780,150.00
5.2.05.02.02.0001	Belanja Modal Pahatan	900,000	900,000.00	100	8,500,800.00
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	3,750,000	3,750,000.00	100	8,250,000.00
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0	0	0	6,029,350.00

5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	66,044,000	65,510,000.00	99.19	0
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	66,044,000	65,510,000.00	99.19	0
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	51,500,000	51,500,000.00	100	283,583,700.00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	51,500,000	51,500,000.00	100	283,583,700.00
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	0	0	0	13,948,100.00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	51,500,000	51,500,000.00	100	269,635,600.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	250,517,685,422	242,656,273,135.00	96.86	387,530,343,306.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	500,000,000	0	0	969,750,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	500,000,000	0	0	969,750,000.00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	500,000,000	0	0	969,750,000.00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	500,000,000	0	0	969,750,000.00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	500,000,000	0	0	969,750,000.00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	500,000,000	0	0	969,750,000.00
5.4	BELANJA TRANSFER	189,417,993,036	189,347,746,142.00	99.96	175,838,080,838.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2,641,527,801	2,571,294,431.00	97.34	2,349,545,084.00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2,334,344,948	2,272,279,006.00	97.34	1,973,354,429.00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2,334,344,948	2,272,279,006.00	97.34	1,973,354,429.00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2,334,344,948	2,272,279,006.00	97.34	1,973,354,429.00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	307,182,853	299,015,425.00	97.34	376,190,655.00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	307,182,853	299,015,425.00	97.34	376,190,655.00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	307,182,853	299,015,425.00	97.34	376,190,655.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	186,776,465,235	186,776,451,711.00	100	173,488,535,754.00

5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	186,776,465,235	186,776,451,711.00	100	173,488,535,754.00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	186,776,465,235	186,776,451,711.00	100	173,488,535,754.00
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0	0	0	173,488,535,754.00
5.4.02.05.02.0002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	12,200,000,000	12,200,000,000.00	100	0
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	101,057,374,000	101,057,360,476.00	100	0
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	73,519,091,235	73,519,091,235.00	100	0
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	189,417,993,036	189,347,746,142.00	99.96	175,838,080,838.00
	JUMLAH BELANJA	1,317,005,678,373	1,224,015,148,415.55	92.94	1,338,826,631,206.07
	SURPLUS/DEFISIT	-89,297,447,568	-10,726,019,584.22	12.01	-163,385,623,463.76
6	PEMBIAYAAN DAERAH	89,297,447,568	91,535,866,734.22	102.51	276,247,599,395.99
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	112,861,975,932	112,862,075,932.22	100	286,885,299,396.99
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	112,861,975,932	112,862,075,932.22	100	141,941,608,628.99
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	83,400,220,040	83,400,220,040.18	100	141,851,753,601.62
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	83,400,220,040	83,400,220,040.18	100	141,851,753,601.62
6.1.01.02.01.0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0	0	0	141,851,753,601.62
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	59,127,233,308	59,127,233,308.18	100	0
6.1.01.02.01.0019	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-	698,973,295	698,973,295.00	100	0

	Reguler-SD				
6.1.01.02.01.0030	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	859,446,442	859,446,442.00	100	0
6.1.01.02.01.0033	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	21,839,000	21,839,000.00	100	0
6.1.01.02.01.0046	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus	45,710,600	45,710,600.00	100	0
6.1.01.02.01.0047	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	100,000	100,000.00	100	0
6.1.01.02.01.0048	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	181,666,313	181,666,313.00	100	0
6.1.01.02.01.0049	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4,645,980	4,645,980.00	100	0
6.1.01.02.01.0055	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi	11,015,003	11,015,003.00	100	0
6.1.01.02.01.0056	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	12,855	12,855.00	100	0
6.1.01.02.01.0057	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	70,852,000	70,852,000.00	100	0
6.1.01.02.01.0059	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	28,109,000	28,109,000.00	100	0
6.1.01.02.01.0060	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5,282,600	5,282,600.00	100	0

6.1.01.02.01.0061	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pasar-Penugasan	290,500	290,500.00	100	0
6.1.01.02.01.0062	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	78,800	78,800.00	100	0
6.1.01.02.01.0071	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	913,700	913,700.00	100	0
6.1.01.02.01.0072	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	134,750,000	134,750,000.00	100	0
6.1.01.02.01.0073	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4,882,435,800	4,882,435,800.00	100	0
6.1.01.02.01.0075	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	58,615,250	58,615,250.00	100	0
6.1.01.02.01.0078	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	2,687,941,610	2,687,941,610.00	100	0
6.1.01.02.01.0082	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1,296,650,414	1,296,650,414.00	100	0
6.1.01.02.01.0087	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah	13,283,657,570	13,283,657,570.00	100	0
6.1.01.05	Penghematan Belanja	1,590,562,678	1,590,562,678.00	100	0
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	1,590,562,678	1,590,562,678.00	100	0
6.1.01.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	899,661,006	899,661,006.00	100	0
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	690,901,672	690,901,672.00	100	0

6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	27,871,193,214	27,871,293,214.04	100	89,855,027.37
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	23,572,719,658	23,572,719,658.88	100	0
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	23,572,719,658	23,572,719,658.88	100	0
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	21,859,815	21,859,815.00	100	89,855,027.37
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	21,859,815	21,859,815.00	100	89,855,027.37
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	4,276,613,740	4,276,713,740.16	100	0
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	4,276,613,740	4,276,713,740.16	100	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	144,943,690,768.00
6.1.04.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0	0	0	144,943,690,768.00
6.1.04.01.06	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	0	0	0	144,943,690,768.00
6.1.04.01.06.0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	0	0	0	144,943,690,768.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	112,861,975,932	112,862,075,932.22	100	286,885,299,396.99
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23,564,528,364	21,326,209,198.00	90.5	10,637,700,001.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000	3,000,000,000.00	100	5,500,000,000.00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3,000,000,000	3,000,000,000.00	100	5,500,000,000.00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3,000,000,000	3,000,000,000.00	100	5,500,000,000.00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3,000,000,000	3,000,000,000.00	100	5,500,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20,564,528,364	18,326,209,198.00	89.12	5,137,700,001.00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	20,564,528,364	18,326,209,198.00	89.12	5,137,700,001.00
6.2.03.01.06	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	20,564,528,364	18,326,209,198.00	89.12	5,137,700,001.00
6.2.03.01.06.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	20,564,528,364	18,326,209,198.00	89.12	5,137,700,001.00

	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23,564,528,364	21,326,209,198.00	90.5	10,637,700,001.00
	PEMBIAYAAN NETTO	89,297,447,568	91,535,866,734.22	102.51	276,247,599,395.99
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	80,809,847,150.00	0	112,861,975,932.23



1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.1.2.1 LATAR BELAKANG

Tujuan pembangunan adalah untuk mengubah kondisi masyarakat ke arah lebih baik yang dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah dan sasaran yang tepat. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di bidang perencanaan, telah diamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus menyusun perencanaan pembangunan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya.

Kabupaten Tebo merupakan salah satu Kabupaten yang jabatan Kepala Daerah berakhir di tahun 2022. Menurut amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan pernyataan tersebut dipastikan jabatan kepala daerah di Kabupaten Tebo diisi oleh Pj Bupati sebagai pengganti Bupati yang masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2022.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dikeluarkanlah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Tujuan dikeluarkannya aturan tersebut sebagai jembatan bagi penyusunan dokumen Perencanaan bagi daerah yang berakhir di tahun 2022 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD. Untuk seterusnya akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD. Peraturan tersebut berisi langkah-langkah perencanaan yang perlu diambil dikarenakan tidak sesuai dengan penyusunan perencanaan dalam aturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana pada Permendagri 86 tahun 2017, perencanaan jangka menengah daerah disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam pemilukada, sedangkan Kabupaten Tebo baru akan melaksanakan pemilukada serentak di tahun 2024.

Perencanaan pembangunan di kabupaten Tebo yang dimulai pada tahun 2023 sampai dengan 2026 disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah atau RPD yang nantinya ditetapkan dengan Perkada. RPD Kabupaten Tebo tahun 2023-2026 ditetapkan paling lambat Bulan Maret minggu kedua Tahun 2022. Penyusunan RPD dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Kabupaten Tebo tahun 2023-2026.

Penyusunan RPD Kabupaten Tebo disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Tebo, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tebo dan isu strategis aktual yang terjadi di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi serta Nasional. RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tebo 2006-2026 dengan Visi: “Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (Maju Bersama Agribisnis)”. Dari visi dan misi jangka panjang tersebut dapat dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun 2023-2026.

Dinamika regulasi nasional dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran menjadi dasar dokumen RPD Kabupaten Tebo dan Renstra Kabupaten Tebo.

RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 perlu disusun sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan sampai tahun 2026 dan penyambung atas implementasi periode terakhir RPJPD Kabupaten Tebo. Penyusunan RPD diharapkan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi di era pandemi Covid-19, serta mengakomodir pencapaian target/indikator pembangunan daerah di Kabupaten Tebo.



1.1.2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah merupakan dokumen yang disusun bagi daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun 2022. Dokumen RPD menjadi acuan bagi OPD menyusun Renstra serta penyusunan RKPD. Dokumen RPD dengan RPJMD tidak memiliki banyak perbedaan mendasar, hanya tentang tidak adanya visi misi dan program kampanye pada dokumen RPD dikarenakan pemilukada serentak akan dilakukan di tahun 2024.

Pada RPD ini memuat tujuan dan sasaran, di mana tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tebo. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau hasil yang akan dicapai Kabupaten Tebo dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 4 (empat) tahun sampai tahun 2026.

Kabupaten Tebo merupakan salah satu kabupaten yang menyusun RPD 2023-2026. Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah kabupaten Tebo tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kabupaten Tebo tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat serta isu strategis yang aktual.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tebo diarahkan pada pembangunan agribisnis untuk menyokong perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor pertanian. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tebo tahun 2005-2025 adalah "**Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (MAJU BERSAMA AGRIBISNIS)**". Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas yaitu manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya, berilmu pengetahuan, cerdas sehat, dan terampil;



2. Mewujudkan daerah agribisnis yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai basis bagi pernyataan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memadai dan maju;
4. Mewujudkan Kabupaten Tebo yang aman, tertib, dan tentram;
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan; dan
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan tujuan dan sasaran Kabupaten Tebo dirumuskan berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Tebo tahun 2005-2025, arah kebijakan dan sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Kabupaten Tebo, serta memerhatikan isu strategis krusial di Kabupaten Tebo. Sehingga dapat dilihat pada lampiran tentang keterkaitan perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026.

VISI RPJPD: "Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (MAJU BERSAMA AGRIBISNIS)"						
Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan Tahun ke 4 RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan RPD	Sasaran RPD	
1 Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas yaitu manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya, berilmu pengetahuan, cerdas sehat, dan terampil	Terwujudnya watak dan sikap masyarakat Tebo yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, bertoleransi terhadap perbedaan yang menciptakan kerukunan hidup antar dan intra umat beragama, bekerjasama dan bergotong royong untuk tujuan dan kebaikan bersama.	Terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya	Percepatan peningkatan layanan pendidikan berbasis IT	1 Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, berakhlakul kharimah dan berdaya saing	1 Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	
	Terwujudnya masyarakat yang memiliki jati diri dan kepribadian yang didasarkan atas pengetahuan, pemahaman dan penerapan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat.	Terwujudnya sikap toleransi saling menghormati serta saling bersinergi antar umat beragama dan pemuka adat.				
	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian jaminan dalam layanan pendidikan, diiringi oleh meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan serta tata kelola pendidikan, baik pendidikan formal dan non-formal.	Terbentuknya masyarakat adat yang terkelola secara baik, membudayanya kegiatan seni budaya daerah, dan terbentuknya ikon seni budaya daerah.				
		Terbangunnya prasarana dan sarana sekolah yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan, mulai dari standart PAUD hingga perguruan tinggi sesuai standar nasional.				
		Terbentuknya sekolah swasta dan lembaga pendidikan luas sekolah yang berkualitas dan sinergis dengan kebijakan pendidikan dan kebutuahn daerah.				
		Terselenggara nya proses pembelajaran yang mampu				

VISI RPJPD: "Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (MAJU BERSAMA AGRIBISNIS)"					
Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan Tahun ke 4 RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan RPD	Sasaran RPD
		membentuk siswa yang mandiri, aktif dan kreatif.			
		Terselenggara nya sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi yang akurat dan transparan dan terpenuhinya prinsip tata kelola pendidikan yang baik.			
	Meningkatnya penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	Meningkat nya pemanfaat an IPTEK dan kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK			
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan struktur kependudukan yang dinamis seimbang dan produktif.	Meluasnya aktifitas sosial dan budaya berolahraga oleh masyarakat dan meningkat nya prestasi olahraga, seni khususnya bagi pelajar dan pemuda.			
	Meningkatnya pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau yang didukung oleh sumberdaya manusia kesehatan yang berkualitas dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif, dan berkembangnya perilaku masyarakat dan rumahtangga yang sesuai dengan perilaku hidup bersih dan sehat.	Meningkatnya tipe RSUD menjadi Tipe A dan Puskesmas yang tersebar pada setiap kecamatan, Puskesmas Pembantu, Pos Pelayanan Kesehatan terpadu yang mencukupi dan berkualitas didukung oleh sarana prasarana yang memadai.	Penanganan dan pemulihan Pandemi COVID-19		2
		Terwujudnya kualitas dokter, tenaga medis dan paramedis, serta penyuluh kesehatan yang profesional sesuai etika medis dan pelayanan dalam tindakan kuratif maupun preventif atas masalah kesehatan.			
		Terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan terselenggara nya koordinasi Dinas kesehatan daerah dengan unit pelayanan kesehatan dan instansi vertikal.			
					Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

VISI RPJPD: "Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (MAJU BERSAMA AGRIBISNIS)"								
Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan Tahun ke 4 RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan RPD	Sasaran RPD			
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan struktur kependudukan yang dinamis seimbang dan produktif.	<p>Terselenggara nya layanan kependuduk an dan jaminan sosial yang profesional berbasis pangkalan data kependuduk an.</p> <p>Meningkatny a kualitas keluarga melalui program Keluarga Berencana dan terbentukny a struktur kependuduk an dengan jumlah dan pertumbuha n penduduk yang seimbang dan produktif (bonus demografi), baik antar usia dan antar wilayah.</p>						
2	Mewujudkan daerah agribisnis yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai basis bagi Pernyataan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	<p>Berkembangnya diversifikasi pertanian untuk membentuk struktur perekonomian daerah berbasis agribisnis dan agroindustri sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sumberdaya manusia pertanian, teknologi serta sarana produksi pertanian yang memadai dan maju, tata kelola dan kebijakan pertanian yang baik</p> <p>Terbentuknya sentra produksi pertanian dan industri yang berbasis wilayah dan pedesaan sesuai dengan potensi dan keunggulan masing- masing wilayah maupun desa.</p> <p>Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang disertai dengan penurunan kemiskinan mutlak dan terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk.</p>	<p>Tercapainya penyediaan infrastruktur pertanian, tenaga penyuluh yang profesional, saprodi yang terjamin, menuju pertanian modern berbasis masyarakat dan kekhasan daerah</p> <p>Berkembang nya berbagai komoditi pertanian dan tercapainya surplus pangan di Kabupetan Tebo, serta mengarah kepada industrialisa si pertanian</p> <p>Terbentuk nya kawasan agribisnis untuk membangun struktur perekonomian an yang kokoh berlandas kan keunggulan kompetitif</p> <p>Berkembang pesatnyanya pembangunan agribisnis didukung oleh agroindustri yang kuat</p> <p>Menurunnya tingkat penganggur an terbuka dan jumlah penduduk miskin, diiringi dengan tingkat kesejahtera n masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tingginya</p>	<p>Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan</p> <p>Perwujudan SDG's</p>	2	Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan	3	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah

VISI RPJPD: "Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (MAJU BERSAMA AGRIBISNIS)"					
Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan Tahun ke 4 RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan RPD	Sasaran RPD
		tingkat pemerataan kepada seluruh masyarakat			
		Semakin meningkat nya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh			
	Meningkatnya peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi, daya tahan dan daya saing dunia usaha serta tumbuhnya wirausaha baru.	Tumbuh kembang nya usaha UMKM dan koperasi sebagai sub struktur industri yang menjadi basis industri yang sehat dan pengem banan ekonomi masyarakat			
		Lembaga keuangan semakin percaya dalam mendorong pengem banan UMKM dan Koperasi			
	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi yang efisien dan produktif serta efek pengganda (multiplier) yang besar bagi pembangunan daerah.	Tumbuh berkembang nya kegiatan usaha dan investasi dengan prioritas pada subsektor perkebunan			
		Investasi berkembang sebagai penunjang utama ekonomi daerah dan provinsi			
	Berkembangnya sektor jasa dalam mendukung perkembangan pada sektor pertanian dan industri	Sektor jasa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan investasi			
	Mengembangkan pasar tradisional dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai disertai pula oleh infrastruktur ekonomi lainnya berupa pertokoan dan pergudangan.	Tumbuh kembang nya pasar- pasar rakyat yang hiegienis dan representatif serta ramah lingkungan			
	Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung	Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan			4 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana

VISI RPJPD: "Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (MAJU BERSAMA AGRIBISNIS)"						
Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan Tahun ke 4 RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan RPD	Sasaran RPD	
	kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.	Keaneekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing serta meningkatkan modal pembangunan pada masa yang akan datang				
3	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memadai dan maju	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi untuk pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri serta pergerakan penumpang dan barang.	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang melayani antar kawasan, pelayanan perizinan dan jasa perhubungan	Percepatan penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah berkualitas	5	Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan daerah
	Meningkatnya pembangunan perumahan yang layak dan sehat serta terjangkau bagi masyarakat miskin.	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman dan perumahan serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan				
	Meningkatnya dan terjaganya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan berbagai pihak, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi.	Peningkatan kualitas pelayanan pasokan energi bagi kepentingan rumah tangga, dunia usaha dan fasilitasi energi yang terbarukan serta pengembangan energi alternatif yang pemanfaatannya diarahkan untuk pelistrikan di daerah terpencil				
	Meningkatkan pelayanan pos, telekomunikasi dan informatika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi di Kabupaten Tebo dalam mendukung tercapainya masyarakat informasi Indonesia.	Peningkatan kualitas sarana prasarana telekomunikasi dan informatika ke seluruh wilayah dalam rangka Peningkatan teledensitas pelayanan jasa telekomunikasi dan informatika bagi masyarakat pengguna				
	Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya air dengan tetap melakukan upaya	Meningkatkan konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah				

VISI RPJPD: "Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (MAJU BERSAMA AGRIBISNIS)"								
Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan Tahun ke 4 RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan RPD	Sasaran RPD			
	konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.	aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah						
4	Mewujudkan Kabupaten Tebo yang aman, tertib, dan tentram	<p>Menciptakan supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.</p> <p>Berfungsinya norma aturan dan nilai-nilai atau kelembagaan masyarakat, lembaga hukum dan lembaga politik daerah untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial, membangun mekanisme resolusi konflik dari, oleh dan untuk masyarakat.</p> <p>Terkendalinya potensi kerawanan sosial dan keamanan wilayah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam sistem pengamanan swakarsa yang terpadu dan bermitra dengan lembaga penegak hukum</p> <p>Mengendalikan ancaman dan gangguan penyalahgunaan dan penyebarluasan narkoba, minuman keras, perjudian, praktik asusila, dan penyakit sosial lainnya</p>	<p>Terciptanya sistem sistem hukum yang mantap, termasuk hukum adat beserta kelembagaan hukum berbasis supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia.</p> <p>Terkendalinya potensi kerawanan sosial dan keamanan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam sistem pengamanan swakarsa yang terpadu dan bermitra dengan lembaga penegak hukum</p> <p>Tersedianya pusat dan program pembinaan dan rehabilitasi bagi ketergantungan narkoba dan sistem penanganan dan pemberdayaan penyakit masalah kesejahteraan sosial (PMKS).</p> <p>Terwujudnya kehidupan yang demokratis dalam pola hubungan yang harmonis antara eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil dalam menunjang pembangunan daerah yang aman, tertib dan kondusif.</p> <p>Menguatnya sistem kepartaian modern dan kapasitas lembaga legislatif yang efektif dalam mewakili kepentingan masyarakat.</p>	<p>Peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah</p> <p>Perwujudan SDG's</p>	3	meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	6	Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat

VISI RPJPD: "Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (MAJU BERSAMA AGRIBISNIS)"					
Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan Tahun ke 4 RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan RPD	Sasaran RPD
5 Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan	Terwujudnya pemerataan pembangunan antar kecamatan dan antar kelompok masyarakat	Pemantapan pemerataan infrastruktur antarwilayah yang memadai dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa, jalur-jalur Produksi, Kawasan strategis serta pusat- pusat pertumbuhan baru dan peningkatan infrastruktur pedesaan			7 Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat
	Terwujudnya keseimbangan pembangunan dan lingkungan antara daerah perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.	Pemantapan Pembangunan perdesaan, peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Pemantapan kawasan- kawasan strategis; pemantapan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi			8 Meningkatnya pendapatan masyarakat
	Terwujudnya pembangunan yang berkeadilan gender dan keadilan antar generasi melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Pemantapan pengarusutamaan gender melalui fasilitasi peningkatan peran kelembagaan, kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi. Pemantapan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), lansia, anak jalanan dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, korban narkoba, penyandang HIV- AIDs, wanita rawan sosial dan penyandang cacat secara sistematis, berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi rasa kesetiakawanan sosial			9 Menurunnya angka pengangguran terbuka

VISI RPJPD: "Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (MAJU BERSAMA AGRIBISNIS)"								
Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Kebijakan Tahun ke 4 RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan RPD	Sasaran RPD			
6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terbentuknya aparatur pemerintah daerah yang profesional, berkualitas dan beretika melayani.	Berkembangnya profesionalisme aparatur berdasarkan sistem remunerasi dan penegakan disiplin dalam mengembangkan pemerintahan yang meritokrasi.	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	10	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah
		Terbangunnya sistem manajemen pelayanan pada masyarakat yang memiliki transparansi dan akuntabilitas yang memadai berlandaskan pada tata kelola yang baik	Pengembangan kapasitas pemerintahan desa dalam melakukan tugas perbantuan maupun dekonsentrasi dan pelimpahan tugas administrasi untuk lebih mendekatkan layanan publik agar efektif dan efisien.					
		Terwujudnya kerjasama dengan pemerintah daerah lain, di dalam negeri maupun luar negeri dalam hubungan maupun dengan dunia usaha dan dunia industri serta wirausahaan dalam pola kerjasama saling menunjang dan menguntungkan	Mantapnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dengan daerah lain maupun provinsi serta dengan masyarakat dan swasta pelaksanaan pembangunan daerah.					
		Terwujudnya penegakan produk-produk hukum daerah yang tepat, jelas dan demokratis sesuai dengan kebutuhan daerah.						
							11	Meningkatnya kualitas pelayanan publik



Tujuan Kabupaten Tebo dirumuskan berdasarkan empat pilar pembangunan Tebo di antaranya adalah SDM, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Reformasi Birokrasi. Tujuan pembangunan Kabupaten Tebo selama periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diukur melalui indikator tujuan yang kemudian menjadi Indikator makro Daerah pembangunan Kabupaten Tebo sebagai berikut:

Tabel
Tujuan beserta Indikator Tujuan RPD Kabupaten Tebo tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Target Akhir
Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul kharimah dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	69,35	70,40
Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,32	4,95
	PDRB perkapita	49,75	55,75
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan	6,68	5,92
	Indeks Gini	0,295	0,275
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	41,68C	70,50 (BB)

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo di atas maka ditetapkanlah sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan beserta penjelasannya, sebagai berikut:

1. Tujuan pertama, Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul kharimah dan berdaya saing

Kualitas sumber daya manusia dapat mengukur kemajuan secara sosial suatu daerah. Secara fisik, kualitas sumber daya manusia ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Tujuannya untuk



membentuk manusia yang berpengetahuan, cerdas dan sehat. Secara non-fisik, kualitas sumber daya manusia ditandai dengan sikap mentalnya yang memiliki keimanan dan ketaqwaan, karakter, kepribadian utamanya berakhlak mulia. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang melingkupi ranah kognisi, afeksi dan psikomotorik yang menciptakan satu kesatuan antara keyakinan agama, pengetahuan, pemahaman dan tindakan.

Covid-19 yang masih merupakan pandemi dan menjadi masalah kesehatan di seluruh daerah dan dijadikan sebagai tolakukur peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Tebo. Peningkatan kesehatan diartikan tidak hanya sekedar bebas dari penyakit dan kelemahan fisik, namun kesehatan yang diartikan sebagai kesatuan antara kesejahteraan fisik, mental dan sosial. Kemajuan kesehatan ditandai dengan pendekatan kebijakan yang sesuai dengan paradigma sehat yang lebih mengutamakan pendekatan promotif dan preventif (pencegahan) daripada kuratif (pengobatan).

Berdasarkan tujuan **Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul kharimah dan berdaya saing**, sasaran yang dirumuskan adalah:

- a. Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing dengan indikator sasaran Indeks Pendidikan;
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kesehatan;

2. Tujuan kedua, Meningkatkan kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan

Struktur Perekonomian daerah kabupaten Tebo sebagian besar berada di sektor pertanian, sehingga sektor pertanian menjadi pondasi dari kebijakan ekonomi. Sebagian besar masyarakat berlokasi di daerah pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Di era transformasi menuju era digital ini terdapat perubahan melalui modernisasi dan adopsi teknologi; diversifikasi; dan pendalaman sektoral yang menciptakan modernisasi pertanian, transformasi industri dan percepatan sektor utilitas dan jasa.

Penguatan ekonomi berbasis pertanian perlu dilakukan dengan melakukan modernisasi melalui adopsi teknologi pertanian tepat guna dan melakukan diversifikasi kegiatan pertanian. Transformasi industri pertanian (agroindustri) dilakukan dengan mengembangkan kegiatan dan produksi pertanian yang dapat diartikan sebagai definisi yang cukup luas, yaitu mencakup perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perikanan, dan kehutanan sesuai potensi dan keunggulan. Kemajuan ekonomi di Kabupaten Tebo sebagai daerah



berbasis pertanian diindikasikan dengan penciptaan diversifikasi pada berbagai kegiatan dan hasil pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi daerah dari guncangan eksternal, baik ketidakstabilan harga maupun gejolak penawaran. Seperti yang terjadi saat ini, sektor pertanian menjadi sektor yang relatif stabil di era pandemi ini.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ditandai dengan struktur pasar yang sehat dan berbasis ekonomi kerakyatan serta meningkatnya keberdayaan yang diikuti oleh kontribusi ekonomi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Di era pandemi ini, Pemerintah pusat banyak mengeluarkan kebijakan terkait bantuan terhadap UMKM yang terdampak pandemi. Upaya Kabupaten Tebo sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk membantu para pelaku usaha kecil dalam menyelamatkan usahanya adalah dengan memberikan kemudahan kredit bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Pembangunan ekonomi yang menerapkan prinsip ekonomi hijau atau berwawasan lingkungan ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan tindakan Tupyaya pelestarian dalam pemanfaatan sumber daya alam. Peningkatan kualitas lingkungan dilakukan dengan berkembangnya pemanfaatan sumberdaya terbarukan. Pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan memiliki perspektif jangka panjang yang memperhatikan pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pembangunan diarahkan pada peningkatan cadangan sumber daya alam dengan melakukan kegiatan yang ramah lingkungan, memperhatikan kelestariannya, serta upaya-upaya pemulihan dan perbaikan kualitas lingkungan yang telah rusak.

Berdasarkan tujuan **Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan**, sasaran yang dirumuskan adalah:

- a. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah dengan indikator sasaran LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan LPE kategori industri pengolahan serta LPE kategori Perdagangan
- b. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana, dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana
- c. Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah, dengan indikator sasaran Indeks Infrastruktur.



3. Tujuan ketiga, Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat

Ketahanan sosial merupakan upaya untuk mengatasi perubahan, baik perubahan dari eksternal daerah maupun internal daerah. Dinamika dan perubahan menjadi banyak ragamnya saat ini, terlebih setelah masa gempuran teknologi dan pandemi covid-19 yang dialami oleh masyarakat dunia. Perubahan-perubahan dinamika tersebut tentu memaksa masyarakat untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk meningkatkan kualitas hidup. Kabupaten Tebo di masa pandemi ini terkena imbasnya yaitu dengan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, sehingga Pemerintah kabupaten Tebo turut berperan dan bertanggungjawab untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini menggunakan dasar argumentatif bahwa peran dan tanggungjawab pemerintah muncul manakala masyarakat secara alamiah belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau untuk tujuan sosial yang lebih luas. Fungsi pemerintah daerah bagi ketahanan sosial ditunjukkan dengan untuk menjaga, melindungi dan mengembangkan perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, pengendalian terhadap konflik dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial..

Berdasarkan tujuan **Meningkatnya Ketahanan sosial masyarakat**, sasaran yang dirumuskan adalah:

- a. Menurunnya angka pengangguran terbuka, dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka;
- b. Meningkatnya pendapatan masyarakat, dengan indikator sasaran Indeks Pengeluaran;
- c. Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dengan indikator sasaran Angka kriminalitas; dan
- d. Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender (IPG).

4. Tujuan keempat, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Kemajuan daerah ditunjukkan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang terpadu. Pemerintahan dapat dikatakan baik apabila memenuhi unsur-unsur yang terukur antara lain transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi. Keempat hal tersebut harus saling terintegrasi agar dapat mewujudkan pemerintah yang baik. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat serta



munculnya kesadaran dan pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan.

Berdasarkan tujuan **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**, sasaran yang dirumuskan adalah:

- a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah, dengan indikator sasaran Nilai LPPD, Indeks Persepsi Anti Korupsi, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator sasaran Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator beserta target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo periode 2023-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target RPJPD	Tahun Target			
						2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	-	69,35	80	69,75	69,95	70,15	70,4
	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pendidikan	-	0,604		0,607	0,608	0,61	0,611
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	-	0,77		0,77	0,771	0,771	0,772
Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,32		4,65	4,71	4,8	4,95
		PDRB per Kapita	Juta Rupiah	49,75		51,25	52,75	54,25	55,75
	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	3,73		3,9	4,05	4,25	4,4
	Meningkatnya nilai tambah komoditas unggulandaerah	LPE kategori industri pengolahan	%	3,96		4	4,1	4,2	4,3
		LPE kategori Perdagangan	%	5,79		5,89	6	6,2	6,5
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,23 (perhitungan provinsi)		66,21	66,64	67,07	67,5
		Indeks Risiko Bencana	-	131,2		125,6	123,73	121,87	120
	Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan daerah	Indeks Infrastruktur	-	na		71	71,5	72	72,5
Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	6,68	5	6,1	5,97	5,94	5,92
		Indeks Gini	-	0,28		0,28	0,28	0,275	0,275

Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target RPJPD	Tahun Target			
						2023	2024	2025	2026
	Menurunnya angka pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,83	5	2,68	2,61	2,55	2,5
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	-	0,718		0,727	0,731	0,735	0,738
	Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas	Jumlah	83		82	81	80	79
	Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		90.23 (2019)		90,24	90,25	90,26	90,27
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	-	C (41,68)*		51,5(CC)	60,50 (B)	70,00 (B)	70,50 (BB)
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Nilai LPPD	-	3,0391		3,131	3,154	3,177	3,2
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	-	3,5		3,55	3,6	3,65	3,7
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		na		70	70,5	71	71,5
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	-	na		65	66	68	70



Pencapaian pembangunan daerah tidak lepas dari peran perangkat daerah, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian IKU daerah memerlukan kontribusi capaian perangkat daerah di Kabupaten Tebo. Keterkaitan Kebijakan (IKU) daerah dengan perangkat daerah dapat dilihat padaa tabel di bawah ini.

Tujuan/Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Tujuan PD	Indikator Sasaran PD	PD Penanggung Jawab
<p>Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul karimah dan berdaya saing</p> <p>Indikator: Indeks Pembangunan Manusia</p>	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rata-rata Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase pelestarian warisan budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Peringkat Kabupaten Layak Anak Tingkat Nasional	Skor Kabupaten Layak Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
			Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase peningkatan prestasi olahraga	Rasio prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional terhadap ajang yang diikuti	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Angka Kesakitan	Dinas Kesehatan dan KB
				Angka Kematian Bayi	Dinas Kesehatan dan KB
				Angka Kematian Ibu Melahirkan	Dinas Kesehatan dan KB
				Laju pertumbuhan penduduk	Dinas Kesehatan dan KB
			Tingkat Akreditasi RSUD	Nett Death Rate	RSUD Sultan Thaha Saifuddin
				Bed Occupancy Rate (BOR)	RSUD Sultan Thaha Saifuddin
				Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD	RSUD Sultan Thaha Saifuddin

Tujuan/Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Tujuan PD	Indikator Sasaran PD	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan Indikator: 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2) PDRB per Kapita	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	NTUP subsektor tanaman pangan	Produksi Pertanian Komoditi Unggulan per hektar per tahun	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan
			NTUP subsektor tanaman hortikultura		
			Skor Pola Pangan Harapan	Persentase Ketersediaan Pangan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan
			NTUP subsektor perkebunan	Persentase peningkatan komoditi unggulan tanaman perkebunan	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
			NTUP subsektor peternakan	Persentase peningkatan populasi ternak	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
			NTUP Subsektor perikanan budidaya	Persentase peningkatan produktivitas budidaya perikanan	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
			NTUP Subsektor perikanan tangkap		Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
	Meningkatnya nilai tambah komoditas unggulan daerah	LPE kategori industri pengolahan	LPE kategori industri pengolahan	Persentase peningkatan investasi daerah	DPMPTSP, KUKM
				Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang naik skala usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		LPE kategori perdagangan	LPE kategori perdagangan	Persentase barang yang memenuhi standar kesehatan dan halal	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas udara	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
				Indeks kualitas air	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
				Indeks kualitas tutupan lahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
		Indeks Risiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) penanganan bencana alam	BPBD

Tujuan/Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Tujuan PD	Indikator Sasaran PD	PD Penanggung Jawab	
			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan daerah	Indeks Infrastruktur	Indeks Konektivitas Wilayah	Rasio kemantapan jalan kabupaten	DPUPR	
				Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW	Persentase jembatan dalam kondisi baik	DPUPR
				Persentase luasan kawasan kumuh	Rasio kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)	DPUPR
					Rasio rumah layak huni	DPUPR
				Persentase luasan pemukiman kumuh yang tertangani	DPUPR	
Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat Indikator: 1) Tingkat Kemiskinan; 2) Indeks Gini	Menurunnya angka pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Kesempatan Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja	
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	Persentase pertumbuhan UMKM level mikro	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	DPMPTSP, KUKM	
				Persentase koperasi aktif dalam keadaan sehat	Persentase koperasi aktif yang melakukan RAT	DPMPTSP, KUKM
			Cakupan bina pelaku ekonomi kreatif	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
				Pertumbuhan wirausaha muda	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
			Rata-rata lama kunjungan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		
	Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam	Indeks Rasa Aman	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan perda	Satpol PP	
Angka Kejadian Konflik Sosial			Persentase penyelesaian kasus konflik bermotif SARA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		

Tujuan/Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Tujuan PD	Indikator Sasaran PD	PD Penanggung Jawab
	kehidupan masyarakat			Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
			Persentase penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
				Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
			Indeks Desa Membangun	Persentase Desa berstatus Maju dan Mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Nilai LPPD	Nilai SAKIP	Level kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Sekretariat Daerah
				Nilai penataan dan penguatan organisasi	Sekretariat Daerah
			Indeks Profesionalitas ASN	Persentase peningkatan kompetensi ASN	BKPSDM
			Indeks Sistem Merit	Persentase jabatan yang sesuai dengan kompetensinya	BKPSDM
				Persentase capaian kinerja ASN	BKPSDM
			Indeks Perencanaan	Rata-rata tingkat capaian indikator kinerja utama daerah	Bappedalitbang
				Rata-rata tingkat capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKU) PD	Bappedalitbang

Tujuan/Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Tujuan PD	Indikator Sasaran PD	PD Penanggung Jawab	
			Indeks Inovasi Daerah	Rata-rata tingkat capaian indikator kinerja sasaran program perangkat daerah	Bappedalitbang	
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Bappedalitbang	
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Bappedalitbang	
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks Maturitas SPIP	Kapabilitas APIP	Inspektorat	
				Indeks Manajemen Resiko	Inspektorat	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Ketepatan waktu penyusunan APBD dan perubahan APBD Kabupaten	Badan Keuangan Daerah	
				Persentase serapan belanja daerah	Badan Keuangan Daerah	
				Ketepatan waktu penyusunan LKPD	Badan Keuangan Daerah	
				Ketepatan waktu penyusunan laporan barang milik daerah	Badan Keuangan Daerah	
						Persentase capaian pendapatan daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Indeks SPBE	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Persentase desiminasi informasi publik kepada masyarakat	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Persentase pengaduan bidang perizinan yang ditindaklanjuti	DPMPTSP, KUKM	

Tujuan/Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Tujuan PD	Indikator Sasaran PD	PD Penanggung Jawab
				Persentase izin dan non perizinan yang diterbitkan	DPMPTSP, KUKM
			Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Prolegda yang berhasil diselesaikan	Sekretariat Dewan
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kecamatan



1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tebo ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tebo Nomor 878 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tebo yang disertai dengan definisi operasional yang berfungsi sebagai alat ukur dan sumber penghitungan indikator sehingga dalam proses evaluasi nantinya *stakeholder* dapat bersama-sama melakukan validasi .


Adapun IKU Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional
Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul kharimah dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengehuaran}} \times 100$
	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pendidikan	Ket: HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0 RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ Ket.AHH = Angka Harapan Hidup
Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan		LPE	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya
		PDRB per kapita	$\frac{PDRB \text{ adh Berlaku}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional
	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	$\frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya PKP= Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</p>
		LPE kategori Industri Pengolahan	$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori Industri Pengolahan</p>
		LPE kategori Perdagangan	$\frac{PDRB_{(P)t} - PDRB_{(P)t-1}}{PDRB_{(P)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya P= Kategori Perdagangan</p>
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ <p>Ket: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p>

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional						
	dan ketahanan bencana	Indeks Risiko Bencana							
	Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan daerah	Indeks Infrastruktur	<p>Indeks Infrastruktur Tingkat Kabupaten = $0,3255 \times jalan + 0,3343 \times air + 0,5133 \times sanitasi + 0,5033 \times pkpl + 0,5153 \times i_kom_inv$</p> <p>Variabel Indeks Infrastruktur :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Definisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-x</td> </tr> <tr> <td>% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x</td> </tr> <tr> <td>%Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x</td> </tr> <tr> <td>% Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN</td> </tr> <tr> <td>Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah)</td> </tr> </tbody> </table>	Definisi	% Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-x	% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x	%Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x	% Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN	Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah)
Definisi									
% Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-x									
% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x									
%Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x									
% Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN									
Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah)									
Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat		Tingkat Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$						
		Indeks Gini	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi}x(Fc_i + Fc_{i-1})$ <p>BPS sudah rilis data Gini Rasio per Kabupaten/Kota</p>						

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional
	Menurunnya angka pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menganggur}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$
	Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas	$\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki - laki}} \times 100$
	Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki - laki}} \times 100$
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Nilai LPPD	
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	<p>Melalui survey pihak eksternal</p>  <p>Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan nilai rerata sederhana dari kelima dimensi pengukuran korupsi di atas. Secara matematis formula perhitungan indeks persepsi korupsi tersebut sebagai berikut:</p> $\text{Indeks Persepsi Korupsi} = \sum_{k=1}^n \frac{x_k}{n}$
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Penentuan bobot Dimensi IPKD adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (15) 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (20) 3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (15) 4. Penyerapan anggaran (20) 5. Kondisi keuangan daerah (15) <p>Opini BPK atas LKPD (15)</p>

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Definisi Operasional
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	<div style="text-align: center;">  <h3 style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">Penghitungan Indeks</h3> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator <ul style="list-style-type: none"> • Nilai per indikator: $\left(\frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3}\right) \times \text{bobot perindikator}$ 2. Menentukan nilai setiap aspek <ul style="list-style-type: none"> • Nilai per aspek: $\sum \text{nilai perindikator}$ 3. Menentukan indeks <ul style="list-style-type: none"> • Nilai indeks: $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$ <div style="margin-top: 10px;"> <p>Pembobotan Aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pelayanan (30%) 2. Profesionalisme SDM (18%) 3. Sarana Prasarana (15%) 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (15%) 5. Konsultasi dan Pengaduan (15%) 6. Inovasi (7%) </div> <div style="margin-top: 10px;">  <pre> graph TD A[Menentukan nilai INDIKATOR] --> B[Menentukan nilai ASPEK] B --> C[Menentukan nilai INDEKS] </pre> </div>



1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM). Berdasarkan beberapa amanat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa, adanya pergeseran makna SPM pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibandingkan regulasi sebelumnya. Selain itu dasar pertimbangan penerapan Standar Pelayanan Minimal juga terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normative dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Tebo menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai



tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis- jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolak ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsure terciptanya penyelenggaraan yang baik

**BAB II****CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****2.1 Capaian Kinerja Makro**

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel. II.1 Capaian kinerja makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,14	71,99	1,195
2	Angka Kemiskinan	6,34	6,46	1,893
3	Angka Pengangguran	1,38	1,71	23,913
4	Pertumbuhan Ekonomi	6,29	4,50	-28,458
5	Pendapatan Per kapita	56,9	60,39	6,134
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,3	0,235	-21,667

Sumber : BPS Kabupaten Tebo

Keterangan:

*) : Data belum tersedia

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Tebo melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.



2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel. II.2 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	KET
1	2	3	4	5	6
Indikator Kinerja Kunci Output Urusan Pendidikan					
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	278	Dikbud	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	750	Dikbud	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	131	Dikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	0	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada PAUD	1102	Dikbud	
		Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	435	Dikbud	
		Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	147	Dikbud	
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	319	Dikbud	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	420	Dikbud	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	134	Dikbud	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	34965	Dikbud	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	10137	Dikbud	



		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	2452	Dikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	934	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1370	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	523	Dikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	948	Dikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	244	Dikbud	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	268	Dikbud	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah Pertama	208	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	713	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	409	Dikbud	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	113	Dikbud	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	38	Dikbud	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	150	Dikbud	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	119	Dikbud	
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	319	Dikbud	



		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	420	Dikbud	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	134	Dikbud	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	34965	Dikbud	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya Pendidikan	10137	Dikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	2452	Dikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	934	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1370	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	523	Dikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	948	Dikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	244	Dikbud	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	268	Dikbud	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	208	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	713	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	409	Dikbud	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	113	Dikbud	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah	38	Dikbud	



		menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	150	Dikbud	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	119	Dikbud	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	8	Dikbud	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar	100	Dikbud	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan Biaya	1353	Dikbud	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	0	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	257	Dikbud	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma	185	Dikbud	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	Dikbud	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	8	Dikbud	
Indikator Kinerja Kunci Output Urusan Kesehatan					
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2	Dinkes	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	0	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	105175	Dinkes	



		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1181	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	19947	Dinkes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1181	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35526	Dinkes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1181	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	134198	Dinkes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standa	1217	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	275375	Dinkes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1204	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	232341	Dinkes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1289	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	109062	Dinkes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1289	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	80	Dinkes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1253	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	13796	Dinkes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1289	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	100	Dinkes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	563	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11516	Dinkes	



		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	692	Dinkes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12454	Dinkes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1309	Dinkes	
Indikator Kinerja Kunci Output Urusan Pekerjaan Umum					
3	Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	16772.27	PUPR	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	481	PUPR	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	PUPR	Suket
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	PUPR	Suket
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	PUPR	Suket
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	PUPR	Suket
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0	PUPR	Suket
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	16772.27	PUPR	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	481	PUPR	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	PUPR	Suket
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	PUPR	Suket
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata	0	PUPR	Suket



		pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota			
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	PUPR	Suket
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	0	PUPR	Suket
		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	3456.70	PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	7505.72	PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	6069.79	PUPR	
		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	ADA	PUPR	Tidak ada Data
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	ADA	PUPR	Tidak ada Data
		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM	ADA	PUPR	Tidak ada Data
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	PUPR	Suket
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0	PUPR	Suket
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	0	PUPR	Suket
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	PUPR	Suket
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	9186	PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	PUPR	Suket
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	PUPR	Suket



		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	88540	PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	86.69%	PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	87.96%	PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0	PUPR	Suket
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0	PUPR	Suket
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	PUPR	Suket
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	PUPR	Suket
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0	PUPR	Suket
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	PUPR	Suket
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	PUPR	Suket
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	139	PUPR	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ADA	PUPR	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	ADA	PUPR	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	PUPR	Suket
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	PUPR	Suket
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	2521	PUPR	



		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	0	PUPR	Suket
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	14433300 M	PUPR	
		Panjang jalan yang dibangun	4177 M	PUPR	
		Panjang jembatan yg dibangun	74 M	PUPR	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	3201 M	PUPR	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	PUPR	
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	187.5 M	PUPR	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	3376 M	PUPR	
		Panjang jalan yang dipelihara	137000 M	PUPR	
		Panjang jembatan yang dipelihara	185 M	PUPR	
		Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	0	PUPR	Suket
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	582 Orang	PUPR	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	582 ORANG	PUPR	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data temutakhir	ADA	PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	ADA	PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	PUPR	Suket



		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya			
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	ADA	PUPR	
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota			
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.			
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	ADA	PUPR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	ADA	PUPR	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	PUPR	Suket
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	PUPR	Suket
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	PUPR	Suket



		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	PUPR	Suket
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi	0	PUPR	Tidak Ada Data
		pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	PUPR	Suket
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	PUPR	Suket
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	PUPR	Suket
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	PUPR	Suket
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	PUPR	Suket
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	PUPR	Suket
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	PUPR	Suket
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	PUPR	Suket
Indikator Kinerja Kunci Output Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	PUPR	Suket
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	13865	PUPR	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	1	PUPR	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	PUPR	Suket



		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	PUPR	Suket
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	PUPR	Suket
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	PUPR	Suket
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	PUPR	Suket
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	PUPR	Suket
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	PUPR	Suket
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	PUPR	Suket
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	PUPR	Suket
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	PUPR	Suket
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	PUPR	Suket
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	PUPR	Suket
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	11.90	PUPR	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	336	PUPR	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	5.92	PUPR	
		Jumlah rumah di kab/kota	100654	PUPR	
		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	3726	PUPR	



		Jumlah rumah tidak layak huni	5944	PUPR	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	PUPR	Suket
		Rasio rumah dan KK	1.2	PUPR	
		Jumlah rumah pembangunan baru	30	PUPR	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	55312	PUPR	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	69048	PUPR	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	0	PUPR	Suket
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	95754	PUPR	Suket
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	PUPR	Suket
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	55312	PUPR	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	32	PUPR	
		Jumlah pengembang yang teregistrasi	32	PUPR	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	PUPR	Suket
Indikator Kinerja Kunci Output Urusan Trantibum					
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	65	Pol PP	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	108	Pol PP	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	7	Pol PP	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1 orang	Pol PP	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1 SOP	Pol PP	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	ADA	Pol PP	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0	BPBD	SUKET



		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	BPBD	
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	1	BPBD	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD	SUKET
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	97.5%	BPBD	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	97.5%	BPBD	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0	BPBD	SUKET
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	BPBD	SUKET
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	BPBD	SUKET
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	0	BPBD	SUKET
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	BPBD	SUKET
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	BPBD	SUKET
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	237 Kejadian	Damkar	
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	7	Damkar	
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	130	Damkar	



		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	Damkar	SUKET
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	8 Armada	Damkar	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	119	Damkar	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	219	Damkar	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	ADA	Damkar	
Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial					
6	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	16319	Sosial P2PA	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	6834	Sosial P2PA	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		Sosial P2PA	Tidak Ada Data
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	376	Sosial P2PA	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	0	Sosial P2PA	SUKET
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	280	Sosial P2PA	
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Sosial P2PA	SUKET



		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	Sosial P2PA	SUKET
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	33	Sosial P2PA	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0	Sosial P2PA	SUKET
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia		Sosial P2PA	SUKET
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Sosial P2PA	SUKET
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Sosial P2PA	SUKET
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS	1	Sosial	
		dan/atau relawan sosial yang disediakan		P2PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	376	Sosial P2PA	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	150	Sosial P2PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	Sosial P2PA	SUKET
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	8	Sosial P2PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	6	Sosial P2PA	



		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	6	Sosial P2PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	1	Sosial P2PA	
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	4090	Sosial P2PA	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	140	Sosial P2PA	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	6	Sosial P2PA	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Sosial P2PA	SUKET
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Sosial P2PA	SUKET
		Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	65 Orang	Sosial P2PA	
Indikator Kinerja Kunci Urusan Tenaga Kerja					
7	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	5	Perindag Naker	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0		SUKET
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	6	Perindag Naker	
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	0	Perindag Naker	SUKET
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	0	Perindag Naker	SUKET
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	0	Perindag Naker	SUKET
		Persentase LPK yang terakreditasi	76.19%	Perindag Naker	SUKET
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	76.19%	Perindag Naker	SUKET
		Jumlah penganggur yang dilatih	20		SUKET
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	Perindag Naker	SUKET
		Persentase penyerapan lulusan	0		SUKET
		Lulusan bersertifikat kompetensi	90	Perindag Naker	SUKET



		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Perinda g Naker	SUKET
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Perinda g Naker	SUKET
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	Perinda g Naker	SUKET
		Data tingkat produktivitas total	0	Perinda g Naker	SUKET
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	10,34 %	Perinda g Naker	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	59.09%	Perinda g Naker	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	22	Perinda g Naker	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	116,7%	Perinda g Naker	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	49.45%	Perinda g Naker	
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	13.19%	Perinda g Naker	
		Jumlah mogok kerja	3		
		Jumlah penutupan perusahaan	7		
		Jumlah perselisihan kepentingan	3	Perinda g Naker	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	23	Perinda g Naker	
		Jumlah perselisihan PHK	17	Perinda g Naker	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	461	Perinda g Naker	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	14	Perinda g Naker	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	12	Perinda g Naker	



		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	60,87	Perindag Naker	
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	0	Perindag Naker	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	6344	Perindag Naker	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	12	Perindag Naker	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Perindag Naker	SUKET
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1	Perindag Naker	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Perindag Naker	SUKET
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	13	Perindag Naker	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	Perindag Naker	SUKET
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0	Perindag Naker	SUKET
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	30	Perindag Naker	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0	Perindag Naker	SUKET
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	Perindag Naker	SUKET
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Perindag Naker	SUKET
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	Perindag Naker	SUKET



8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		Sosial P2PA/B akeuda	Tidak Ada Data
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		Sosial P2PA/B akeuda	Tidak Ada Data
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0	Sosial P2PA/D	SUKET
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	Sosial P2PA	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	Sosial P2PA/D ukcapil	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1	Sosial P2PA/D ukcapil	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		Sosial P2PA	Tidak Ada Data
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	0	Sosial P2PA/D ukcapi	SUKET
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	0	Sosial P2PA/D ukcapil	SUKET
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1		SUKET
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1	Sosial P2PA/D ukcapil	SUKET
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2		
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	0		



		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	Sosial P2PA/D ukcapil	
9	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	ADA	DHTP	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	4750	DHTP	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local	0	DHTP	
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	1	DHTP	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	DHTP	
		Tertanganinya kerawanan pangan	4750	DHTP	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	4750	DHTP	
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	1	DHTP	
10	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	21	DPMPSTSP	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	DPMPSTSP	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0	DPMPSTSP	
		Dokumen Izin membuka tanah	0	DPMPSTSP	
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	DPMPSTSP	
11	Lingkungan hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	55	DLH HUB	



		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	92.72	DLH HUB	
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	42.86	DLH HUB	
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	70.84	DLH HUB	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100	DLH HUB	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	3.06	DLH HUB	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	50 %	DLH HUB	
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	DLH HUB	SUKET
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	28	DLH HUB	
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	116	Dukcapil	
		Penerbitan akta perceraian	4	Dukcapil	
		Penerbitan akta kematian	1908	Dukcapil	
		Penyajian data kependudukan	1	Dukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	78	PMD	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	78	PMD	



		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	226	PMD	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	26	PMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	DINKES -KB	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun			Tidak Ada Data
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	46.8	DINKES -KB	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	82.64%	DINKES -KB	
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	42	DINKES -KB	
		Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100 %	DINKES -KB	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	75.14%	DINKES -KB	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	402	DINKES -KB	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	75.7%	DINKES -KB	
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		DINKES -KB	Tidak Ada Data
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)		DINKES -KB	Tidak Ada Data
15	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	47.06	DLH HUB	
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	10.88	DLH HUB	



		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	DLH HUB	SUKET
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	100	DLH HUB	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	48,64	Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	48,64	Kominfo	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	140	Kominfo	
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	100	Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	56,76	Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	Kominfo	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	Kominfo	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	12	Kominfo	



		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100 %	Kominfo	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100%	Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	10,81	Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	10,81	Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	0	Kominfo	SUKET
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	0	Kominfo	SUKET
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	5,41	Kominfo	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	Kominfo	
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	3	Kominfo	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	96,67	Kominfo /Dukcap il	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	96	Kominfo /Dukcap il	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	50	Kominfo /Dukcap il	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DPMPTS PKOPUKM	SUKET



		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DPMPTS PKOPUKM	SUKET
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7,87	DPMPTS PKOPUK M	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	62,5	DPMPTS PKOPUK M	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4,2	DPMPTS PKOPUKM	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5,25	DPMPTS PKOPUK M	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,26 %	DPMPTS PKOPUK M	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	DPMPTS PKOPUKM	SUKET
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,05%	DPMPTS PKOPUK M	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DPMPTS PKOPUKM	SUKET
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DPMPTS PKOPUK M	SUKET



		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	11,02%	DPMPTS PKOPUK M	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	11,02 %	DPMPTS PKOPUK M	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	3.29 %	DPMPTS PKOPUKM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0.51	DPMPTS PKOPUKM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0	DPMPTS PKOPUKM	SUKET
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,45	DPMPTS PKOPUKM	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0	DPMPTS PKOPUKM	SUKET
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,54	DPMPTS PKOPUKM	
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan	0	DPMPTS PKOPUKM	SUKET
18	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	DPMPTS PKOPUKM	SUKET
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0	DPMPTS PKOPUKM	SUKET
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	DPMPTS PKOPUKM	SUKET
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	DPMPTS PKOPUKM	SUKET
		Kegiatan pameran penanaman modal	1	DPMPTS PKOPUKM	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	96	DPMPTS PKOPUKM	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	53	DPMPTS PKOPUKM	



		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	5958	DPMPTS PKOPUKM	
		Laporan realisasi penanaman modal	266360507295	DPMPTS PKOPUKM	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	3	DPMPTS PKOPUKM	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	50	DPMPTS PKOPUKM	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	100	DPMPTS PKOPUKM	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	30	Dispora- par	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Dispora- par	SUKET
		Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	0	Dispora- par	SUKET
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dispora- par	SUKET
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	21	Dispora- par	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	9	Dispora- par	
20	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	1	Dis- kominfo	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	239	Dis- kominfo	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	20	Dis- kominfo	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	9	Dis- kominfo	
		Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	9	Dis- kominfo	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	75	Dis- kominfo	
		Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	15.9%	Dis- kominfo	
21	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Dis- kominfo	SUKET



		Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	0	Dis-kominfo	SUKET
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	Dis-kominfo	SUKET
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	0	Dis-kominfo	SUKET
22	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	3	Dikbud	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	12	Dikbud	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, m dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	19	Dikbud	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	45	Dikbud	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	10	Dikbud	
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	9	Dikbud	
		Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Dikbud	SUKET
		Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	Dikbud	SUKET



		Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	3	Dikbud	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	10	Dikbud	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0	Dikbud	SUKET
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	Dikbud	SUKET
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	Dikbud	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	1	Dikbud	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	2	Dikbud	
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Dikbud	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman kabupaten/kota	0	Dikbud	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Dikbud	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dikbud	
23	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0.601	DPK	
		Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	0.453	DPK	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.003	DPK	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0.002	DPK	
		Jumlah pasyarakatangemar membaca di masyarakat	11817	DPK	
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	DPK	SUKET
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	DPK	SUKET



		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	DPK	SUKET
24	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	4	DPK	
		persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	3	DPK	
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	1.9%	DPK	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	DPK	SUKET
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	DPK	SUKET
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	3	DPK	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0	DPK	SUKET
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	2	DPK	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	3	DPK	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	2	DPK	
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	1248	Dis- bunakan	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	Dis- bunakan	SUKET
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	6	Dis- bunakan	
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan	25	Dis- bunakan	



		penguatan kelembagaan)			
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	970.68	Dis- bunakan	
26	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	2	Dis- porapar	
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	2	Dis- porapar	
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	0	Dis- porapar	SUKET
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	4	Dis- porapar	
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	4	Dis- porapar	
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Dis- porapar	SUKET
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	15	Dis- porapar	
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	55.5%	Dis- porapar	
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	0	Dis- porapar	SUKET
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0	Dis- porapar	SUKET
27	Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan	19	DTPHKP	
		Prasarana pertanian yang digunakan	102	DTPHKP	
		Penerbitan izin usaha pertanian	0	DTPHKP	SUKET
		Persentase prasarana yang digunakan	96.08%	DTPHKP	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	0	DTPHKP	SUKET
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0	DTPHKP	SUKET
28	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	1	Bag PSDAAP	
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	1	Bag PSDAAP	



		Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	Bag PSDAAP	SUKET
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	1	Bag PSDAAP	
29	Energi Dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	10	DPMPTSP KUKM	
30	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	0	Dis-perindag	SUKET
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	100%	Dis-perindag	
		Persentase penerbitan TDG	100%	Dis-perindag	
		Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	4.29	Dis-perindag	
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	Dis-perindag	SUKET
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	Dis-perindag	SUKET
		Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	Dis-perindag	SUKET
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	50%	Dis-perindag	SUKET
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	100%	Dis-perindag	
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	72.04	Dis-perindag	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	83.33%	Dis-perindag	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100%	Dis-perindag	
		31	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0
Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya	50%			Dis-perindag	SUKET



		menjadi PERDA			
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	50%	Dis-perindag	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	Dis-perindag	SUKET
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	2.12%	Dis-perindag	
32	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	Bag Kesra	SUKET
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Bag Kesra	SUKET
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Bag Kesra	SUKET

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel. II.3 Indikator Kinerja Kunci Hasil

	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	76.566%	Dikbud/Dukcapil	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93,927 %	Dikbud/Dukcapil	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	86.341%	Dikbud/Dukcapil	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.004%	Dikbud/Dukcapil	
2	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0,377 %	Dinkes	



		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 %	Dinkes	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	85,269 %	Dinkes	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	82,704 %	Dinkes	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	92,247 %	Dinkes	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	91.847 %	Dinkes	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Dinkes	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90,252%	Dinkes	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99,757 %	Dinkes	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82,496 %	Dinkes	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Dinkes	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	99,229 %	Dinkes	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	Dinkes	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar	81,684 %	Dinkes	
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	0,226 %	PERKIM/PU	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	0	PUPR	SUKET



		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	61,757%	PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	68,957%	PUPR	
		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87,964%	LH	
		Persentase Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	100%	PUPR/DPMPPT SPKOPUKM	
		Persentase tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	48,896%	PUPR	
		Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	16,130%	PUPR	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	PUPR/DPMPPT SPKOPUKM	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	0%	PERKIM	Suket
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	0 %	PERKIM	Suket
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	44,453%	PERKIM	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5,905 %	PERKIM	
		Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %	PERKIM	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	94,202%	Pol PP	
	Perindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	Pol PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	82,000%	BPBD	



		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	80,556 %	DAMKAR	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11,74	DAMKAR	
6	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	2,838 %	Sosial P2PA	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	Sosial P2PA	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	Perindag Naker	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2,013%		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	183,589 %	BPS/Perindag Naker	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	38,461 %	Perindag Naker	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	3,498 %		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	8,279 %	Sosial P2PA/Bakeuda	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	Sosial P2PA/Bakeuda	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1,70 %		



9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	0,034 %	DHTP	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100 %		
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0%		SUKET
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100%		
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0%	DPMPTSKUKM	Suket
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0%	DPMPTSKUKM	SUKET
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	Bag Hukum	
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	67,62%	DLH HUB	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	70,84%	DLH HUB	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	28 %	DLH HUB	
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Persentase mengukur tingkat Perekaman KTP Elektronik di Kabupaten	99,492 %	Dukcapil	
		Persentase anak dengan usia 0-17 tahun yang sudah memiliki KIA	47,027 %	Dukcapil	
		Persentase memiliki Akta Kelahiran	97,66%	Dukcapil	
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	50 %	Dukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100 %	PMD	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	18,032 %	PMD	
14	Pengendalian	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,26%	DINKES-KB	



	Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	75,143 %	DINKES-KB	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,113 %	DINKES-KB	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten	70,9%	DLHP	
		Kinerja lalulintas Kabupaten/Kota	0%	DLHP	SUKET
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	48,648 %	Kominfo	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	Kominfo	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	100 %	Kominfo/Dukcapil	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	100 %	DPMPTSPKO PUKM	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	100 %	DPMPTSPKO PUKM	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	-63,773 %	DPMPTSPKO PUKM	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,631 %	DISPORAPAR /DUKCAPIL	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6,436 %	DISPORAPAR	
		Peningkatan prestasi olahraga	4 medali	DISPORAPAR	
20	Statistic	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	Dis-Kominfo	
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	Dis-Kominfo	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	70,833%	Dis-Kominfo	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	0 %		SUKET
23	Perpustakaan	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	62,93 %	DPK	
		Indeks membangun literaly masyarakat	71,55 %		



24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	2,5 %	DPK	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	2	DPK	
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten	102,028%	Bunakan	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-55%	Disporapar	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	11,062 %	Disporapar	
		Tingkat hunian akomodasi	63,35 %	Disporapar	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB	0,411 %	Disporapar	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD	2,287%	Disporapar	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	4,572 %	DHTP	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-44,684%	DHTP	
28	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	1		
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	1		
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	0		SUKET
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	1		
29	Energi Sumber DayaMineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100%	Bag. PSDAAP	
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	84,341 %	Perindag Naker	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	72,042 %	Perindag Naker	
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	83,333 %	Perindag Naker	



31	Perindustrian	Mengukur tingkat pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	20,224%	Perindag Naker	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	50%	Perindag Naker	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	49,18%	Perindag Naker	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	Perindag Naker	Suket
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0%	Perindag Naker	Suket
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	2,12%	Perindag Naker	
32	Transmigrasi				

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Table. II.4 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	9,807 %	Bakeuda/B PS	
		Rasio PAD	7,567 %	Bakeuda/B PS	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,203	Inspektorat	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,02	Inspektorat	



		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	62,919 %	Bakeuda	
		Opini Laporan Keuangan	1	Inspektorat/ Bakeuda	
2	Pengadaan	Persentase jumlah proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bag. PBJ	SUKET
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	9,98	Bag. PBJ	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	25,055	Bag. PBJ	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	149,278%	Bag. PBJ	
3	Kepegawaian	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	72,807 %	BKPSDM	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,572 %	BKPSDM	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	28,668 %	BKPSDM	
4	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	7,895 %	BAKEUDA	
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1,801 %	BAKEUDA	
		Manajemen Aset	ADA	BAKEUDA	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	5,577 %	BAKEUDA	
5	Transparansi dan Partisipasi publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available)	100%	BAKEUDA	



		to frontline service delivery units)			
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100%	BAKEUDA	



2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



BUPATI TEBO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ASPAN, ST

Jabatan : Pj. Bupati Tebo

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muara Tebo, Januari 2023

Pj. BUPATI TEBO,

ASPAN





Tabel. II.5 Lampiran Perjanjian Kinerja Bupati Tebo Tahun 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
MISI RPJPD 1: MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERKUALITAS YAITU MANUSIA YANG BERIMAN, BERTAQWA DAN BERBUDAYA, BERILMU PENGETAHUAN, CERDAS SEHAT, DAN TERAMPIL				
1	Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul kharimah dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	69,75
2		Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pendidikan	0,607
3		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,77
MISI RPJPD 2: MEWUJUDKAN DAERAH AGRIBISNIS YANG MEMILIKI KEUNGGULAN KOMPETITIF SEBAGAI BASIS BAGI PERNYATAAN PENCAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS				
4	Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan		LPE	4,65
			PDRB per kapita	51,25 (juta Rp)
5		Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,9
			LPE kategori industri pengolahan	4
			LPE Kategori Perdagangan	5,89
MISI RPJPD 3: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI DAN MAJU				
6	Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan		LPE	4,65
			PDRB per kapita	51,25 (juta Rp)
7		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan daerah	Indeks Infrastruktur	71
MISI RPJPD 4: MEWUJUDKAN KABUPATEN TEBO YANG AMAN, TERTIB, DAN TENTRAM				
8	Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan		LPE	4,65
			PDRB per kapita	51,25 (juta Rp)
9		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,21
			Indeks Risiko Bencana	125,6
MISI RPJPD 5: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN				
10	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat		Tingkat Kemiskinan	6,1
			Indeks Gini	0,28
11		Menurunnya angka pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,68
12		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	0,727
13		Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas	82



NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5
14		Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,24
MISI RPJPD 6: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	60,00 (B)
16		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Nilai LPPD	3,131
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,55
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70
17		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	65

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
Sasaran 1 : Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	105,621,230,170	DAU, DAK
2	Program Pengembangan Kurikulum	250,000,000	DAU
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2,815,500,000	DAU
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	25,000,000	DAU
5	Program Pembinaan Perpustakaan	202,130,000	DAU
Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	60,184,139,095	DAU, DAK
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	144,195,400	DAU
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	51,268,329	DAU
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	240,543,400	DAU
5	Program Pengendalian Penduduk	113,515,900	DAU, DAK
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	697,901,394	DAU, DAK
7	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	117,313,600	DAU, DAK
Sasaran 3 : Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah			
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	74,999,710	DAU



2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	436,129,824	DAU
3	Program Penyuluhan Pertanian	469,086,000	DAU, DAK
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	64,999,800	DAU
5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	29,356,800	DAU
6	Program Promosi Penanaman Modal	30,963,500	DAU
7	Program Pelayanan Penanaman Modal	102,293,350	DAU
8	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	459,100,000	DAU
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	164,632,200	DAU
10	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	32,827,440	DAU
11	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	40,797,300	DAU
12	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	15,525,500	DAU
13	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	94,999,700	DAU
14	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	338,943,000	DAU
15	Program Penanganan Kerawanan Pangan	39,999,800	DAU
16	Program Pengawasan Keamanan Pangan	30,998,290	DAU
17	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	85,435,950	DAU
18	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	241,100,000	DAU
19	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	182,230,000	DAU
20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	750,000,000	DAU
21	Program Pemasaran Pariwisata	299,232,995	DAU
Sasaran 4: Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Pembangunan Daerah			
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	7,653,402,955	DAU, DAK



2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	23,151,004,000	DAU, DAK
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	13,455,863,400	DAU, DAK
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	6,059,290,620	DAU
5	Program Pengembangan Permukiman	9,414,834,900	DAU
6	Program Penataan Bangunan Gedung	32,645,774,010	DAU
7	Program Penyelenggaraan Jalan	87,385,143,358	DAU
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	193,445,245	DAU
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,686,428,446	DAU
10	Program Pengembangan Perumahan	108,332,675	DAU
11	Program Kawasan Permukiman	1,749,797,940	DAU
12	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	16,784,802,804	DAU
13	Program Penatagunaan Tanah	160,691,400	DAU
14	Program Pengelolaan Persampahan	5,511,634,455	DAU
15	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	456,591,190	DAU
Sasaran 5: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Ketahanan Bencana			
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1,300,000,000	DAU
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	639,059,685	DAU
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	70,000,000	DAU
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	67,504,450	DAU



5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	646,349,700	DAU
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	53,500,000	DAU
7	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2,327,341,400	DAU
8	Program Penanggulangan Bencana	1,303,078,699	DAU
9	Program Penanganan Bencana	586,644,750	DAU
Sasaran 6 : Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka			
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	8,556,795	DAU
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	14,763,150	DAU
3	Program Hubungan Industrial	93,430,650	DAU
Sasaran 7: Meningkatnya Pendapatan Masyarakat			
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	270,196,630	DAU
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,445,311,830	DAU
3	Program Perizinan Usaha Pertanian	125,000,000	DAU
4	Program Pemberdayaanusaha Menengah, Usahakecil, Dan Usaha Mikro(Umkm)	76,599,300	DAU
Sasaran 8 : Terciptanya Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Kehidupan Masyarakat			
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1,292,487,200	DAU
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,151,066,832	DAU
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	36,936,000	DAU
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	133,878,600	DAU
5	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	64,870,950	DAU
6	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	970,925,800	DAU



7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	85,000,000	DAU
8	Program Pengembangan Kebudayaan	450,000,000	DAU
9	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	255,000,000	DAU
10	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	50,000,000	DAU
11	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1,936,615,350	DAU
12	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	544,330,000	DAU
Sasaran 9 : Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat			
1	Program Pemberdayaan Sosial	264,292,350	DAU
2	Program Rehabilitasi Sosial	222.292.260,00	DAU
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	367,687,301	DAU
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	896,391,976	DAU
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	414,987,800	DAU
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2,464,873,352	DAU
7	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300,000,000	DAU
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2,451,719,850	DAU
Sasaran 10 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	321,632,400	DAU
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	513,844,471,888	DAU
3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	16,546,083,200	DAU
4	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	7,016,148,530	DAU
5	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1,189,820,050	DAU
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2,250,157,520	DAU
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	174,824,850	DAU



8	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,627,424,250	DAU
9	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,172,632,314	DAU
10	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	223,055,270	DAU
11	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	175,388,526,677	DAU, PAD
12	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,278,739,031	DAU
13	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,260,469,545	PAJAK
14	Program Penyelenggaraan Pengawasan	780,615,940	DAU
15	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	63,404,500	DAU
16	Program Aplikasi Informatika	664,514,300	DAU
17	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	109,732,800	DAU
Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
1	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1,472,473,510	DAU
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	15,864,900	DAU
3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	26,850,000	DAU
4	Program Pendaftaran Penduduk	25,000,000	DAU, DAK
5	Program Kepegawaian Daerah	1,271,857,900	DAU
6	Program Pengelolaan Arsip	88,960,000	DAU
7	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	329,966,950	DAU
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	35,006,700	DAU

Muara Tebo, Januari 2023

BUPATI
TEBO

Pj. BUPATI TEBO,
ASPAN





2.4 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2023 disusun dalam bentuk laporan yang terintegrasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perencanaan Strategis dan penyampaian hasil dari Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023. Tahun 2023 merupakan tahun awal berlakunya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Pemerintah Kabupaten Tebo, dimana RPD merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan sampai dengan dilantik Bupati dan Wakil Bupati definitif hasil Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024 dan telah menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang baru.

Akuntabilitas kinerja tahun 2023 menyajikan perihal capaian kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik keberhasilan maupun kegagalan atas pelaksanaan rencana Pembangunan pada tahun 2023, dimana capaian kinerja dengan mengukur indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ditetapkan sebanyak 6 tujuan, 10 indikator tujuan, 11 sasaran dan 16 Indikator kinerja sasaran. Pada **Misi 1**: Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Yaitu Manusia Yang Beriman, Bertaqwa Dan Berbudaya, Berilmu Pengetahuan, Cerdas Sehat, Dan Terampil ditetapkan 2 sasaran dan 2 indikator kinerja sasaran; **misi 2**: Mewujudkan Daerah Agribisnis Yang Memiliki Keunggulan Kompetitif Sebagai Basis Bagi Pernyataan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas ditetapkan 1 sasaran 3 indikator kinerja sasaran; **misi 3**: : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Memadai Dan Maju 1 sasaran dan 1 indikator kinerja sasaran; **misi 4**: Mewujudkan Kabupaten Tebo Yang Aman, Tertib, Dan Tenram ditetapkan ditetapkan 1 sasaran dan 2 indikator kinerja sasaran; dan **misi 5**: Mewujudkan Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan 3 sasaran dan 3 indikator kinerja sasaran.

2.3.1 pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Kepala Daerah

Pengukuran capaian kinerja merupakan upaya untuk melihat keberhasilan maupun kegagalan sebagai bentuk Akuntabilitas dan wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023 disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan

sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, program, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Perjanjian Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Tebo.

Secara umum rumus yang digunakan untuk menghitung presentase pencapaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian IK} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel II.6
Skala Pengukuran Ordinal

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	>90-100	Sangat Memuaskan (SM)
2	>80-90	Memuaskan (M)
3	>70-80	Sangat Baik (SB)
4	>60-70	Baik (B)
5	>50-60	Cukup (C)
6	>30-50	Kurang (K)
7	0-30	Sangat Kurang (SK)

Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo telah melaksanakan banyak program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023–2026. Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) terdapat 5 (lima) Misi, 5 (lima) Tujuan dan 5 (lima) indikator kinerja tujuan, 11 sasaran dengan 16 (sebelas) indikator sasaran.



Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. dan untuk menguatkan pernyataan pencapaian kinerja sasaran, dapat dilakukan pengukuran terhadap output/keluaran kegiatan dalam rangka pengungkapan keterkaitan program dan kegiatan terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran pencapaian target kinerja secara berkala yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo pada tahun 2023 berdasarkan capaian indikator kinerja tujuan dan Indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.7 Pengukuran Indikator Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN TARGET	KATEGORI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MISI RPJD 1: MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERKUALITAS YAITU MANUSIA YANG BERIMAN, BERTAQWA DAN BERBUDAYA, BERILMU PENGETAHUAN, CERDAS SEHAT, DAN TERAMPIL								
1	Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul kharimah dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	69,75	70,63	101,26	Sangat Memuaskan	BPS
2		Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pendidikan	0,607	0,624	102,86	Sangat Memuaskan	Dikbud
3		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,770	0,777	100,90	Sangat Memuaskan	Dinkes
MISI RPJD 2: MEWUJUDKAN DAERAH AGRIBISNIS YANG MEMILIKI KEUNGGULAN KOMPETITIF SEBAGAI BASIS BAGI PERNYATAAN PENCAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS								
4	Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan		LPE	4,65	4,60	98,92	Sangat Memuaskan	BPS
			PDRB per kapita	51,25 (juta Rp)	93,93 (juta Rp)	183,27	Sangat Memuaskan	BPS
5		Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,9	4,51	115,64	Sangat Memuaskan	BPS
			LPE kategori industri	4	5,88	147	Sangat Memuaskan	BPS

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN TARGET	KATEGORI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pengolahan					
			LPE Kategori Perdagangan	5,89	9,28	157,55	Sangat Memuaskan	BPS
MISI RPJPD 3: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI DAN MAJU								
6	Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan		LPE	4,65	4,50	96,77	Sangat Memuaskan	BPS
			PDRB per kapita	51,25 (juta Rp)	93,93 (juta Rp)	183,27	Sangat Memuaskan	BPS
7		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan daerah	Indeks Infrastruktur	71	150,149	211,47	Sangat Memuaskan	Dinas PUPR, Kominfo, PLN
MISI RPJPD 4: MEWUJUDKAN KABUPATEN TEBO YANG AMAN, TERTIB, DAN TENTRAM								
8	Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan		LPE	4,65	4,50	96,77	Sangat Memuaskan	BPS
			PDRB per kapita	51,25 (juta Rp)	93,93 (juta Rp)	183,27	Sangat Memuaskan	BPS
9		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,21	67,62	102,12	Sangat Memuaskan	DLHP
			Indeks Risiko Bencana	125,6	122,32	97,38	Sangat Memuaskan	BPBD
MISI RPJPD 5: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN								
10	Meningkatnya		Tingkat	6,1	6,46	94,42	Sangat	BPS

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN TARGET	KATEGORI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ketahanan sosial masyarakat		Kemiskinan				Memuaskan	
			Indeks Gini	0,28	0,24	119,14	Sangat Memuaskan	BPS
11		Menurunnya angka pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,68	1,71	156,72	Sangat Memuaskan	BPS
12		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	0,727	0.771	106,05	Sangat Memuaskan	BPS
13		Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas	82	44,083	186,01	Sangat Memuaskan	Badan Kesbangpol, Polres Tebo
14		Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,24	*)	-	-	-
MISI RPJPD 6: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK								
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	60,00 (B)	47,13	78,55	Sangat Baik	Kemenpan RB
16		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Nilai LPPD	3,131	*)	-	-	Kemendagri
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,55	*)	-	-	KPK RI
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70	*)	-	-	Kemendagri
17		Meningkatnya	Indeks Persepsi	65	85,37	131,33	Sangat	SKM pada

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN TARGET	KATEGORI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		kualitas pelayanan publik	Kualitas Pelayanan Publik				Memuaskan	RSUD STS, Dinas Dukcapil dan DPMPSTP



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa 5 (lima) dari 6 (enam) indikator kinerja tujuan Pemerintah Kabupaten Tebo memiliki capaian yang sangat memuaskan, sedangkan 1 Indikator tujuan yaitu : Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian sangat baik.

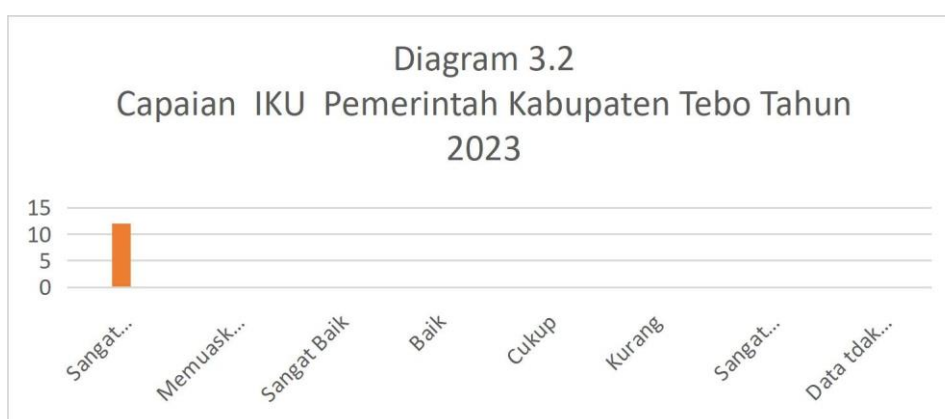
Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo pada tahun 2023 berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran yang berdasarkan target pada perjanjian kinerja Bupati Tebo pada Januari Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja dari masing-masing pencapaian Indikator kinerja terhadap 11 sasaran dan 16 indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.8
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Predikat	Rata-Rata Capaian Menurut Predikat	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Seluruh Indikator
1	Sangat Memuaskan	132,46	12	107,62
2	Memuaskan			
3	Sangat Baik			
4	Baik			
5	Cukup			Sangat Memuaskan
6	Kurang			
7	Data tidak tersedia	0	4	

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran diatas dapat menunjukkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo pada tahun adalah 2023 dapat dikatakan sangat memuaskan, meskipun ada 4 (empat) Indikator kinerja tidak dapat diukur karena data tidak tersedia untuk saat ini dan baru tersedia pada pertengahan 2024. Adapun rincian dari pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo dapat dilihat pada diagram berikut:





Berdasarkan pengukuran kinerja antara target dan realisasi pada diagram diatas dapat disampaikan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo pada tahun 2023 rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 107,62% kategori sangat memuaskan. Capaian ini merupakan hasil dari kerja nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tebo dalam Upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat menuju Tebo Mantap 2024.

Selain melakukan pengukuran kinerja berdasarkan pada target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bupati yang ditetapkan pada awal tahun juga dilakukan pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya hal ini untuk melihat apakah terdapat peningkatan maupun penurunan kinerja pemerintah, selanjutnya juga dilakukan pengukuran dengan membandingkan dengan target akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) hal ini dilakukan untuk melihat capain kinerja pemerintah apakah ada kemungkinan mencapai target akhir pada RPD, selain itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian kinerja pada Kabupaten dalam Provinsi Jambi, Provinsi Jambi maupun Nasional. Adapun capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya terdapat peningkatan capaian kinerja dari beberapa indikkator sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.9 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERCEPATAN/ PERLAMBATAN	KETERANGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MISI RPJPD 1: MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERKUALITAS YAITU MANUSIA YANG BERIMAN, BERTAQWA DAN BERBUDAYA, BERILMU PENGETAHUAN, CERDAS SEHAT, DAN TERAMPIL								
1	Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul kharimah dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	69,78	70,63	0,85	Mengalami percepatan	BPS
2		Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pendidikan	0,608	0,624	0,016	Mengalami percepatan	Dikbud
3		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,773	0,777	0,004	Mengalami percepatan	Dinkes
MISI RPJPD 2: MEWUJUDKAN DAERAH AGRIBISNIS YANG MEMILIKI KEUNGGULAN KOMPETITIF SEBAGAI BASIS BAGI PERNYATAAN PENCAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS								
4	Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan		LPE	6,29	4,50	-1,79	Mengalami perlambatan	BPS
			PDRB per kapita	89,42 (juta Rp)	93,93 (juta Rp)	4,51 (juta Rp)	Mengalami percepatan	BPS
5		Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,57	4,51	1,94	Mengalami percepatan	BPS
			LPE kategori industri pengolahan	2,05	5,88	3,88	Mengalami percepatan	BPS
			LPE Kategori Perdagangan	5,28	9,28	4	Mengalami percepatan	BPS
MISI RPJPD 3: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI DAN MAJU								
6	Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan		LPE	6,29	4,50	-1,79	Mengalami perlambatan	BPS
			PDRB per kapita	89,42 (juta Rp)	93,93 (juta Rp)	4,51 (juta Rp)	Mengalami percepatan	BPS

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERCEPATAN/ PERLAMBATAN	KETERANGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ekonomi berkelanjutan							
7		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan daerah	Indeks Infrastruktur	*)	150,149	-	-	-
MISI RPJPD 4: MEWUJUDKAN KABUPATEN TEBO YANG AMAN, TERTIB, DAN TENTRAM								
8	Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan		LPE	6,29	4,50	-1,79	Mengalami perlambatan	BPS
			PDRB per kapita	89,42 (juta Rp)	93,93 (juta Rp)	4,51 (juta Rp)	Mengalami percepatan	BPS
9		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,63	67,62	-7,01	Mengalami perlambatan	DLHP
			Indeks Risiko Bencana	131,20	122,32	-8,88	Mengalami perlambatan	BPBD
MISI RPJPD 5: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN								
10	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat		Tingkat Kemiskinan	6,34	6,46	-0,12	Mengalami perlambatan	BPS
			Indeks Gini	0,30	0,24	0,06	Mengalami percepatan	BPS
11		Menurunnya angka pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,38	1,71	-0,33	Mengalami perlambatan	BPS
12		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	0,776	0,771	-0,005	Mengalami perlambatan	BPS
13		Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas	73,24	44,083	29,16	Mengalami percepatan	Badan Kesbangpo I, Polres Tebo
14		Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,92	*)	-	-	-

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PERCEPATAN/ PERLAMBATAN	KETERANGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		masyarakat						
MISI RPJPD 6: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK								
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	48,60	47,13	-1,47	Mengalami perlambatan	Kemenpan RB
16		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Nilai LPPD	2,7179	*)	-	-	-
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	*)	*)	-	-	-
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74,928	*)	-	-	-
17		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	83,71	85,37	1,66	Mengalami percepatan	SKM pada RSUD STS, Dinas Dukcapil dan DPMPTSP



Berdasarkan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 terhadap 11 (sebelas) Sasaran dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Sasaran meskipun sebenarnya sasaran maupun indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 berbeda dengan Tahun 2023 karena 2022 adalah masa akhir dari RPJMD 2017-2022 dan Tahun 2023 adalah masa awal periode RPD 2023-2026, disimpulkan bahwa terjadi Percepatan pencapaian kinerja pada beberapa indikator kinerja sasaran. Hasil ini berdasarkan pengukuran kinerja, yang menunjukkan 6 (enam) indikator menunjukkan percepatan, 4 (empat) indikator kinerja mengalami perlambatan, 6 (enam) indikator kinerja sasaran datanya tidak tersedia (n/a) pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan. Keempat indikator kinerja sasaran yang belum tersedia datanya tersebut adalah Indeks Infrastruktur belum dilakukan pengukuran pada tahun 2022 sehingga belum dapat dilakukan pengukuran, Indeks Pembangunan Gender (IPG) baru tersedia data tahun 2022 sedangkan data tahun 2023 belum tersedia dalam rilis resmi BPS Kabupaten Tebo, Nilai LPPD baru tersedia untuk tahun 2022 sedangkan nilai tahun 2023 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Indeks Persepsi Anti Korupsi untuk tahun 2023 belum dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan yang terakhir Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah baru tersedia capaian tahun 2022 sedangkan tahun 2023 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri.

Tabel II.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dan Capaian Terhadap Akhir RPD Tahun 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET AKHIR RPD 2026	CAPAIAN TARGET	KATEGORI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MISI RPJPD 1: MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERKUALITAS YAITU MANUSIA YANG BERIMAN, BERTAQWA DAN BERBUDAYA, BERILMU PENGETAHUAN, CERDAS SEHAT, DAN TERAMPIL								
1	Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul kharimah dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	70,63	70,40	100,32	Sangat memuaskan	BPS
2		Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pendidikan	0,624	0,611	102,12	Sangat memuaskan	Dikbud
3		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,777	0,772	100,64	Sangat Memuaskan	Dinkes
MISI RPJPD 2: MEWUJUDKAN DAERAH AGRIBISNIS YANG MEMILIKI KEUNGGULAN KOMPETITIF SEBAGAI BASIS BAGI PERNYATAAN PENCAPAIAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS								
4	Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan		LPE	4,50	4,95	90,90	Sangat memuaskan	BPS
			PDRB per kapita	93,93 (juta Rp)	55,75 (juta RP)	91,92	Sangat memuaskan	BPS
5		Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,51	4,4	102,5	Sangat memuaskan	BPS
			LPE kategori industri pengolahan	5,88	4,3	136,74	Sangat memuaskan	BPS
			LPE Kategori Perdagangan	9,28	6,5	142,76	Sangat memuaskan	BPS
MISI RPJPD 3: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI DAN MAJU								
6	Meningkatnya kualitas dan daya saing		LPE	4,50	4,95	90,9	Sangat memuaskan	BPS
			PDRB per kapita	93,93	55,75	168,48	Sangat	BPS

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET AKHIR RPD 2026	CAPAIAN TARGET	KATEGORI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	embangunan ekonomi berkelanjutan			(juta Rp)	(juta RP)		memuaskan	
7		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan daerah	Indeks Infrastruktur	150,149	72,5	207,1	Sangat memuaskan	BPS
MISI RPJPD 4: MEWUJUDKAN KABUPATEN TEBO YANG AMAN, TERTIB, DAN TENTRAM								
8	Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan		LPE	4,50	4,95	90,9	Sangat memuaskan	BPS
			PDRB per kapita	93,93 (juta RP)	55,75 (juta RP)	168,57	Sangat memuaskan	BPS
9		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,62	67,5	100,17	Sangat memuaskan	DLHP
			Indeks Risiko Bencana	123,32	120	97,3	Sangat memuaskan	BPBD
MISI RPJPD 5: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN								
10	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat		Tingkat Kemiskinan	6,46	5,92	91,64	Memuaskan	BPS
			Indeks Gini	0,24	0,275	114,58	Sangat Memuaskan	BPS
11		Menurunnya angka pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,71	2,5	146,19	Baik	BPS
12		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	0,771	0,738	104,47	Sangat Memuaskan	BPS
13		Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas	44,083	79	179,2	Sangat Memuaskan	Badan Kesbangpo I, Polres Tebo
14		Meningkatnya sumber	Indeks	*)	90,27	-	-	-

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET AKHIR RPD 2026	CAPAIAN TARGET	KATEGORI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	Pembangunan Gender (IPG)					
MISI RPJPD 6: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK								
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	47,13	70,50	66,85	Baik	KemenpanRB
16		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Nilai LPPD	*)	3,2	-	-	-
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	*)	3,7	-	-	-
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	*)	71,5	-	-	-
17		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	85,37	70	121,95	Baik	SKM pada RSUD STS, Dinas Dukcapil dan DPMPTSP

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja indikator terhadap target yang ditetapkan dalam RPD 2023-2026 capaian kinerja Tahun 2023 sudah mencapai 96,31%, dari target akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2026 .

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa 5 (lima) dari 6 (enam) indikator kinerja tujuan Pemerintah Kabupaten Tebo memiliki capaian yang sangat memuaskan, sedangkan 1 Indikator tujuan yaitu : Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian sangat baik.

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo pada tahun 2023 berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran yang berdasarkan target pada akhir RPD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.8
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Predikat	Rata-Rata Capaian Menurut Predikat	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Seluruh Indikator
1	Sangat Memuaskan	128,46	12	96,31
2	Memuaskan			
3	Sangat Baik			
4	Baik			
5	Cukup			Sangat Memuaskan
6	Kurang			
7	Data tidak tersedia	0	4	

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran diatas dapat menunjukkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo pada tahun adalah 2023 dapat dikatakan sangat memuaskan, meskipun ada 4 (empat) Indikator kinerja tidak dapat diukur karena data tidak tersedia untuk saat ini dan baru tersedia pada pertengahan 2024. Berdasarkan pengukuran kinerja antara target dan realisasi pada diagram diatas dapat disampaikan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo pada tahun 2023 rata-rata capaian indikator kinerja jika dibandingkan dengan target akhir RPD Tahun 2026 sebesar 96,31% kategori sangat memuaskan.

2.3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Adapun pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023, indikator dan target yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Tebo sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026, antara lain:

1. Misi I Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Yaitu Manusia Yang Beriman, Bertaqwa Dan Berbudaya, Berilmu Pengetahuan, Cerdas Sehat, Dan Terampil

Pada misi I terdapat satu Tujuan dan dua sasaran dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II. 11 Analisis Pencapaian Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Yaitu Manusia Yang Beriman, Bertaqwa Dan Berbudaya, Berilmu Pengetahuan, Cerdas Sehat, Dan Terampil

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
					Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul kharimah dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia	69,78	69,75	70,63	101,26
		Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pendidikan	0,608	0,607	0,624	102,86
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,773	0,770	0,777	100,90

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada misi Misi 1 Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Yaitu Manusia Yang Beriman, Bertaqwa Dan Berbudaya, Berilmu Pengetahuan, Cerdas Sehat, dan Terampil dengan tujuan untuk meningkatnya kualitas SDM yang sehat berakhlakul karimah dan berdaya saing telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 101,26 % kategori sangat memuaskan. Capaian ini ditopang oleh dua sasaran utama yaitu Meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing dan Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat dimana kedua sasaran ini memiliki capaian kinerja di atas 100% dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing telah ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja “indeks pendidikan” dengan capaian dapat dilihat pada tabel diatas disampaikan bahwa pemerintah kabupaten Tebo telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 0,607 dan terealisasi 0,624 dengan capaian kinerja sebesar 102,86%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya terjadi peningkatan/percepatan sebesar 0,016 poin.

Indeks Pendidikan merupakan komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipresentasikan oleh indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS),”. Sedangkan tujuan dilakukan pengukuran Indeks Pendidikan ialah untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dasar.

Dalam pengukuran Indeks Pendidikan dapat dilihat sebagai berikut “

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$
$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$
$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Ket:
HLS = Harapan Lama Sekolah
HLS maks = 18; HLS min = 0
RLS = Rata-rata Lama Sekolah
RLS maks = 15; RLS min = 0

Yang mana: Indeks Pendidikan = $\frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$

$$= \frac{0,7178 + 0,5293}{2}$$
$$= 0,624$$

Dari Rumusan di atas dapat dijelaskan bawah target indeks pendidikan 0,607 dengan realisasi capaian indeks pendidikan 0,624 dengan persentase 102,86% skala pengukuran sangat memuaskan.

Dari Rumusan di atas dapat dijelaskan bawah target indeks pendidikan 0,607 dengan realisasi capaian indeks pendidikan 0,624 dengan persentase 102,86% skala pengukuran sangat memuaskan.

Guna mewujudkan sasaran Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing Pemerintah Kabupaten Tebo telah melaksanakan beberapa program sebagai berikut :

Tabel II.13. Program yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Pendidikan	105,621,230,170	DAU, DAK
2	Program Pengembangan Kurikulum	250,000,000	DAU
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	2,815,500,000	DAU
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	25,000,000	DAU
5	Program Pembinaan Perpustakaan	202,130,000	DAU

Sasaran 2 Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat

Untuk mengukur kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu indeks kesehatan. Capaian indeks kesehatan pemerintah Kabupaten Tebo pada tahun 2023 berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,777 sementara target sebesar 0,770 dengan capaian kinerja sebesar 100,90 % kategori sangat memuaskan. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 0,07 poin. Untuk mengetahui indeks kesehatan dapat dilihat dengan rumus berikut:

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{\text{AHH-AHH min}}{\text{AHH Maks-AHH Min}}$$

Keterangan :

AHH : Angka Harapan Hidup

Angka harapan Hidup Tahun 2023 sebesar : 70,43

Angka harapan hidup maksimal 85

Angka harapan hidup minimal: 20

$$\begin{aligned} \text{Indeks Kesehatan Tahun 2023} &= \frac{70,43 - 20}{85 - 20} \\ &= 0,777 \end{aligned}$$

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Tebo telah menjalankan berbagai program yang langsung dapat dirasakan oleh Masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.14 Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	60,184,139,095	DAU, DAK
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	144,195,400	DAU
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	51,268,329	DAU
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	240,543,400	DAU
5	Program Pengendalian Penduduk	113,515,900	DAU, DAK
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	697,901,394	DAU, DAK
7	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	117,313,600	DAU, DAK

Capaian kinerja Misi I Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Yaitu Manusia Yang Beriman, Bertaqwa Dan Berbudaya, Berilmu Pengetahuan, Cerdas Sehat, Dan Terampil dengan tujuan Meningkatnya kualitas SDM yang sehat, berakhlakul kharimah dan berdaya saing yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia serta 2 (dua) sasaran yaitu Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing dengan indikator kinerja Indeks Pendidikan dan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

dengan Indikator Indeks Kesehatan jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten Tetangga yang terdapat dalam Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.15. Capaian Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan Kabupaten dalam Provinsi Jambi

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pendidikan	Indeks Kesehatan	Rangking
Nasional	74,39	0,658	0,802	
Provinsi Jambi	72,77	0,658	0,796	
Kerinci	72,54	0,673	0,778	3
Merangin	70,81	0,611	0,796	7
Sarolangun	71,29	0,618	0,765	4
Batanghari	71,02	0,634	0,788	7
Muaro Jambi	71,04	0,655	0,798	6
Tanjung Jabung Timur	66,65	0,587	0,723	10
Tanjung Jabung Barat	69,35	0,629	0,749	9
Tebo	70,63	0,624	0,777	8
Bungo	71,06	0,631	0,745	5
Kota Jambi	80,15	0,809	0,820	1
Kota Sungai Penuh	76,65	0,757	0,813	2

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa berdasar pada rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Indeks Pemangunan Manusia Kabupaten Tebo berada pada peringkat ke 8 dibandingkan dengan 10 Kabupaten/Kota dalam provinsi Jambi. Sebagai kabupaten baru di provinsi Jambi sebenarnya capaian ini sudah cukup baik namun masih harus terus ditingkatkan karena indeks pembangunan manusia merupakan gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu daerah semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia maka dianggap semakin sejahtera masyarakatnya. Pemerintah kabupaten Tebo telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan maupun pendapatan masyarakat dengan dukungan program anggaran di bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan jumlah guru, tenaga kesehatan serta peningkatan kapasitas guru dan tenaga kesehatan. Meskipun demikian kabupaten Tebo dengan wilayah yang luas dan berbatasan dengan cagar alam Taman Nasional Bukit Tiga Puluh serta wilayah yang berdekatan dengan kawasan hutan sehingga menyebabkan sebaran penduduk yang berada pada sempadan hutan, akhirnya cukup menyulitkan bagi pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan dan kesehatan kesemua penjuru wilayah baik dari segi pendanaan/anggaran maupun status lahan yang merupakan kawasan HGU Perusahaan.

2. Misi 2 Mewujudkan Daerah Agribisnis Yang Memiliki Keunggulan Kompetitif Sebagai Basis Bagi Pernyataan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas

Tabel II.16 Analisis capaian misi Mewujudkan Daerah Agribisnis Yang Memiliki Keunggulan Kompetitif Sebagai Basis Bagi Pernyataan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
					Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan		LPE	6,29	4,65	4,50	96,77
			PDRB per kapita		51,25 (juta Rp)	93,93 (juta Rp)	183,27
2		Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,57	3,9	4,51	115,64
			LPE kategori industri pengolahan	2,05	4	5,88	147
			LPE Kategori Perdagangan	5,28	5,89	9,28	157,55

Sumber: BPS Kabupaten Tebo 2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada misi Misi 2 Mewujudkan Daerah Agribisnis Yang Memiliki Keunggulan Kompetitif Sebagai Basis Bagi Pernyataan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dengan tujuan Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan ditetapkan 2 (dua) indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) capaian kinerja 96,77 persen kategori sangat memuaskan dan PDRB Per kapita dengan capaian kinerja sebesar 183,27 kategori sangat memuaskan. Capaian ini ditopang oleh 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah, untuk mengukur kinerja sasaran ini di tetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, LPE kategori industri pengolahan dan LPE Kategori Perdagangan Dimana ketiga indikator kinerja tersebut memiliki capaian kinerja di atas 100% dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran 3 Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah

Untuk mengukur kinerja sasaran Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, LPE kategori industri pengolahan dan LPE

Kategori Perdagangan. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo diketahui Indikator kinerja LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan telah melampaui target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 115,64 kategori sangat memuaskan, Indikator kedua yaitu LPE kategori industri pengolahan capaian kinerja 147% kategori sangat memuaskan dan Indikator ketiga LPE Kategori Perdagangan capaian kinerja 157,55 kategori sangat memuaskan.

Capaian ini merupakan dampak dari pelaksanaan program-program Pemerintah Kabupaten Tebo yang secara teknis dikerjakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo. Adapun program yang dilaksanakan adalah :

Tabel II.17 Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	74,999,710	DAU
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	436,129,824	DAU
3	Program Penyuluhan Pertanian	469,086,000	DAU, DAK
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	64,999,800	DAU
5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	29,356,800	DAU
6	Program Promosi Penanaman Modal	30,963,500	DAU
7	Program Pelayanan Penanaman Modal	102,293,350	DAU
8	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	459,100,000	DAU
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	164,632,200	DAU
10	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	32,827,440	DAU
11	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	40,797,300	DAU
12	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	15,525,500	DAU
13	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	94,999,700	DAU
14	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	338,943,000	DAU
15	Program Penanganan Kerawanan Pangan	39,999,800	DAU
16	Program Pengawasan Keamanan Pangan	30,998,290	DAU
17	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	85,435,950	DAU
18	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	241,100,000	DAU
19	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	182,230,000	DAU
20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	750,000,000	DAU
21	Program Pemasaran Pariwisata	299,232,995	DAU

Capaian kinerja misi 2 Mewujudkan Daerah Agribisnis Yang Memiliki Keunggulan Kompetitif Sebagai Basis Bagi Pernyataan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dengan tujuan Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan ditetapkan 2 (dua) indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan PDRB Per kapita serta ditetapkan 1 sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, LPE kategori industri pengolahan dan LPE Kategori Perdagangan jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten dalam Provinsi Jambi Berdasarkan pada rilis data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.18. capaian Indikator kinerja dibandingkan capaian Pemerintah Kabupaten dalam Provinsi Jambi

Wilayah	LPE	PDRB per Kapita	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	LPE kategori industri Pengolahan	LPE Kategori Perdagangan	Rangking
Nasional	5,05	74,964 Juta				
Provinsi Jambi	4,66		5,61	4,16	8,87	
Kerinci	5,73		3,64	5,63	4,31	3
Merangin	5,28		5,12	7,94	9,22	4
Sarolangun	4,02		5,39	3,45	10,45	8
Batanghari	3,70		5,53	5,72	9,03	9
Muaro Jambi	6,28		4,50	2,29	9,77	2
Tanjung Jabung Timur	2,17		4,92	1,25	7,98	11
Tanjung Jabung Barat	3,51		6,39	5,29	9,25	10
Tebo	4,50	93,9 juta	4,51	5,88	9,28	7
Bungo	4,66		5,25	3,98	9,19	6
Kota Jambi	6,61		1,45	0,50	11,17	1
Kota Sungai Penuh	4,92		4,52	0,59	31,12	5

Sumber: BPS Kabupaten Tebo 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada misi Mewujudkan Daerah Agribisnis Yang Memiliki Keunggulan Kompetitif Sebagai Basis Bagi Pernyataan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dengan tujuan Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan jika dibandingkan dengan Kabupaten lain dalam wilayah provinsi Jambi masuk dalam rangking pertengahan yaitu berada pada urutan ke tujuh dari 10 Kabupaten/Kota dalam provinsi Jambi.

Misi 3 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Memadai dan Maju

Tabel II.19 Analisis capaian misi Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Memadai dan Maju

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
					Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan		LPE	6,29	4,65	4,50	96,77
			PDRB per kapita		51,25 (juta Rp)	93,93 (juta Rp)	183,27
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan daerah	Indeks Infrastruktur	*)*	71	150,49	211,47

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada misi Misi 3 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Memadai dan Maju dengan tujuan Meningkatnya kualitas dan daya saing Pembangunan ekonomi berkelanjutan ditetapkan 2 (dua) indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) capaian kinerja 96,77 persen kategori sangat memuaskan dan PDRB Per kapita dengan capaian kinerja sebesar 183,27 kategori sangat memuaskan. Capaian ini ditopang oleh 1 (satu) sasaran Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan daerah, untuk mengukur kinerja sasaran ini ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Infrastruktur. Capaian kinerja tersebut sebesar 211,47% dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran 4 Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Pembangunan Daerah

Untuk mengukur sasaran meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan daerah ditetapkan satu indikator kinerja yaitu Indeks Infrastruktur

Untuk mengukur Indeks Infrastruktur dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Indeks Infrastruktur} : 0,325 \times \text{Jalan} + 0,3343 \times \text{air} + 0,5133 \times \text{sanitasi} + 0,5033 \times \text{pkpl} + 0,5153 \times \text{i_kom_inv}$$

Defenisi:

% Kondisi jalan dalam keadaan mantap tahun -x

% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun -x

% Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun -x

% Keluarga pengguna Listrik PLN dan Non PLN

% Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah

Pada tahun 2023 capaian komponen penyusun Indeks Infrastruktur Kabupaten Tebo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.20 Data Komponen Penyusun Indeks Infrastruktur Kabupaten Tebo Tahun 2023

No	Komponen Indeks Infrastruktur	Capaian	Sumber Data
1	Kondisi jalan dalam keadaan mantap	48,90	Dinas PUPR
2	Keluarga dengan akses terhadap air minum layak	68,60	Dinas PUPR
3	Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak	87,96	Dinas PUPR
4	Keluarga pengguna Listrik PLN dan Non PLN	58,51	PLN Cabang Tebo
5	Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah	71,31	Dinas Kominfo

$$\begin{aligned} \text{Indeks Infrastruktur} &= (0,325 \times 48,90 + 0,3343 \times 68,60 + 0,5133 \times 87,96 + 0,5033 \times \\ &\quad 58,51 + 0,5153 \times 71,31) \\ &= 15,89 + 22,93 + 45,149 + 29,44 + 36,74 \\ &= 150,149 \end{aligned}$$

Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Kabupaten Tebo Pemerintah melalui dinas PUPR

Tabel II.21 Program Sasaran Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Pembangunan Daerah

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7,653,402,955	DAU, DAK
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	23,151,004,000	DAU, DAK
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	13,455,863,400	DAU, DAK
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	6,059,290,620	DAU
5	Program Pengembangan Permukiman	9,414,834,900	DAU
6	Program Penataan Bangunan Gedung	32,645,774,010	DAU
7	Program Penyelenggaraan Jalan	87,385,143,358	DAU
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	193,445,245	DAU
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,686,428,446	DAU
10	Program Pengembangan Perumahan	108,332,675	DAU
11	Program Kawasan Permukiman	1,749,797,940	DAU
12	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	16,784,802,804	DAU
13	Program Penatagunaan Tanah	160,691,400	DAU
14	Program Pengelolaan Persampahan	5,511,634,455	DAU
15	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	456,591,190	DAU

Misi 4 Mewujudkan Kabupaten Tebo Yang Aman, Tertib, dan Tentram

Tabel II.22 Analisis Capaian Kinerja Misi Mewujudkan Kabupaten Tebo Yang Aman, Tertib, dan Tentram

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
					Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan		LPE	6,29	4,65	4,50	96,77
			PDRB per kapita		51,25 (juta Rp)	93,93 (juta Rp)	183,27
2		Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,63	66,21	67,63	102,14
			Indeks Risiko Bencana	131,20	125,6	122,32	97,38

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD Kab. Tebo 2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada misi Misi 4 **Mewujudkan Kabupaten Tebo Yang Aman, Tertib, dan Tentram** dengan tujuan Meningkatnya kualitas dan daya saing Pembangunan ekonomi berkelanjutan ditetapkan 2 (dua) indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) capaian kinerja 96,77 persen kategori sangat memuaskan dan PDRB Per kapita dengan capaian kinerja sebesar 183,27 kategori sangat memuaskan. Capaian ini ditopang oleh 1 (satu) sasaran Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana, untuk mengukur kinerja sasaran ini di tetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja sebesar 102,14 kategori sangat memuaskan dan Indeks Risiko Bencana capaian kinerja sebesar 97,38 kategori sangat memuaskan dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran 5 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana

Untuk mengukur sasaran meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup melampaui target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 102,14% kategori sangat memuaskan dan indicator kinerja Indeks Risiko Bencana hamper mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 97,38 kategori sangat memuaskan.

Tabel II.23 Program sasaran Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Ketahanan Bencana

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1,300,000,000	DAU
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	639,059,685	DAU
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	70,000,000	DAU
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	67,504,450	DAU
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pph)	646,349,700	DAU
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	53,500,000	DAU
7	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2,327,341,400	DAU
8	Program Penanggulangan Bencana	1,303,078,699	DAU
9	Program Penanganan Bencana	586,644,750	DAU

Misi 5 Mewujudkan Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan

Tabel II.24 Analisis capaian misi Mewujudkan Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
					Target	Realisasi	
1	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat		Tingkat Kemiskinan	6,34	4,65	6,46	94,42
			Indeks Gini	0,28	0,28	0,235	119,14
		Menurunnya angka pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,38	2,68	1,71	156,72
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	0,776	0,727	0,771	106,05
		Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat	Angka kriminalitas	71,66	82	44,083	186,01
		Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,24	90,24)*	-

Sumber: BPS Kabupaten Tebo 2024 dan Badan Kesabangpol



Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada misi Misi 5 **Mewujudkan Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan** dengan tujuan Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat ditetapkan 2 (dua) indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) capaian kinerja 96,77 persen kategori sangat memuaskan dan PDRB Per kapita dengan capaian kinerja sebesar 183,27 kategori sangat memuaskan. Capaian ini ditopang oleh 4 (empat) sasaran yaitu Menurunnya angka pengangguran terbuka, Meningkatnya pendapatan Masyarakat, Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan Masyarakat dan Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan Masyarakat dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran 6 Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka

Untuk mengukur kinerja sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka ditetapkan indikator kinerja yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Berdasarkan pada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo telah berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 2,68 perolehan data 1,71 dengan capaian kinerja sebesar 156,72 persen. Capaian ini merupakan dampak dari program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo. Dibandingkan dengan kabupaten tetangga angka pengangguran di kabupaten Tebo termasuk yang terendah sebagaimana dapat dilihat pada rilis data BPS Provinsi Jambi berikut:

Lampiran 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2021- Agustus 2023

Kabupaten/Kota	Agustus 2021 (persen)	Agustus 2022 (persen)	Agustus 2023 (persen)	Perubahan Ags 2021-Ags 2022 (persen poin)	Perubahan Ags 2022-Ags 2023 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kerinci	2,32	2,63	2,48	0,31	-0,15
Merangin	4,83	4,69	4,35	-0,14	-0,34
Sarolangun	5,52	5,22	5,09	-0,30	-0,13
Batanghari	4,26	3,53	3,85	-0,74	0,32
Muaro Jambi	5,59	5,35	5,40	-0,23	0,05
Tanjab Timur	1,56	1,32	1,67	-0,24	0,35
Tanjab Barat	2,53	2,88	2,95	0,34	0,08
Tebo	2,83	1,38	1,71	-1,45	0,34
Bungo	5,86	5,50	5,23	-0,36	-0,27
Kota Jambi	10,66	8,95	8,27	-1,71	-0,68
Kota Sungai Penuh	3,00	2,49	3,80	-0,51	1,31
PROVINSI JAMBI	5,09	4,59	4,53	-0,51	-0,06

Sumber: Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021, Agustus 2022, dan Agustus 2023

Guna menekan angka pengangguran Pemerintah Kabupaten Tebo melaksanakan beberapa program yang secara teknis dilaksanakan oleh dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo. Adapun program yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II.25 Program sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	8,556,795	DAU
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	14,763,150	DAU
3	Program Hubungan Industrial	93,430,650	DAU

Sasaran 7 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Untuk mengukur kinerja sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat ditetapkan indikator kinerja berupa Indeks Pengeluaran dengan capaian kinerja sebesar 106,05 melampaui target yang telah ditetapkan. Indeks pengeluaran merupakan suatu upaya yang digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan Masyarakat dengan asumsi semakin tinggi pengeluaran Masyarakat maka semakin tinggi pula pendapatannya. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Berdasarkan data BPS besar pengeluaran perkapita perbulan masyarakat kabupaten Tebo dalam satu bulan sebesar 1.047.860 rupiah dan dalam satu tahun sebesar 12.574.320 rupiah.

Dibandingkan dengan Kabupaten dalam provinsi Jambi Pengeluaran perkapita perbulan Kabupaten Tebo merupakan yang paling rendah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II.26 Pengeluaran Perkapita per bulan Kabupaten dalam Provinsi Jambi

Wilayah	Pengeluaran Perkapita 2022	Pengeluaran Perkapita 2023	Rangking
Nasional	-	-	
Provinsi Jambi	1.261.836,78	1.424.125	
Kerinci	1.322.152,50	1.395.119	8
Merangin	1.151.239,97	1.246.268	9
Sarolangun	1.223.238,03	1.402.052	6
Batanghari	1.058.573,50	1.428.018	4
Muaro Jambi	1.109.279,80	1.395.409	7
Tanjung Jabung Timur	1.282.214,72	1.468.038	3
Tanjung Jabung Barat	1.084.137,27	1.245.323	10
Tebo	1.065.590,43	1.047.860	11
Bungo	1.287.321,63	1.402.155	5
Kota Jambi	1.716.770,38	1.895.843	1
Kota Sungai Penuh	1.353.829,64	1.504.722	2

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Adapun program yang dilaksanakan guna meningkatkan pendapatan masyarakat adalah sebagai berikut:

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	270,196,630	DAU
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,445,311,830	DAU
3	Program Perizinan Usaha Pertanian	125,000,000	DAU
4	Program Pemberdayaanusaha Menengah, Usahakecil, Dan Usaha Mikro(Umkm)	76,599,300	DAU

Sasaran 8 Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Dalam Kehidupan Masyarakat

Polres Tebo Konferensi Pers Akhir Tahun, Tingkat Kejahatan Menurun

Sabtu, 30 Desember 2023 - 17:25 WIB



Untuk mengukur kinerja sasaran Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Dalam Kehidupan Masyarakat ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja Angka kriminalitas. Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui dari target sebesar a kriminalitas sebesar 44,083 dengan capaian kinerja sebesar 186,01 kategori sangat memuaskan. Angka kriminalitas kabupaten Tebo masuk kategori rendah hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Tebo merupakan Daerah yang aman dan tertib. Angka kriminalitas diperoleh dari formulasi yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dengan formula :

$$\frac{\text{Jumlah Laporan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

Jumlah kasus yang dilaporkan kepada Kepolisian Resort Tebo pada tahun 2023 sebanyak 160 kasus terdiri atas kasus Narkoba sebanyak 50 kasus, pencurian biasa 36 kasus, curat 35 kasus, aniaya berat 21 kasus dan pengeroyokan sebanyak 18 kasus.

Untuk mencapai sasaran Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Dalam Kehidupan Masyarakat Pemerintah melakukan berbagai upaya dan program yang secara teknis dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Kades sekabupaten Tebo bersinergi dengan jajaran Kepolisian di Kabupaten Tebo. Beberapa program yang dilaksanakan diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II.27 Program Sasaran Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Dalam Kehidupan Masyarakat

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,292,487,200	DAU
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,151,066,832	DAU
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	36,936,000	DAU
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	133,878,600	DAU
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	64,870,950	DAU
6	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	970,925,800	DAU
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	85,000,000	DAU
8	Program Pengembangan Kebudayaan	450,000,000	DAU
9	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	255,000,000	DAU
10	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	50,000,000	DAU
11	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1,936,615,350	DAU
12	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	544,330,000	DAU

Sasaran 9 Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengukur kinerja sasaran Meningkatnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan indikator kinerja berupa Indeks Pembangunan Gender, namun sampai dengan akhir bulan maret tahun 2024 data tersebut masih belum tersedia. Dalam rilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Tebo belum memuat Indeks Pembangunan Gender sehingga indikator ini belum dapat diukur, tetapi jika dilihat pada tahun 2022 capaian indeks pembangunan gender di Kabupaten Tebo sudah cukup baik yaitu 90,24. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 maka capaian pada tahun 2022 dapat dikatakan sudah tercapai.

Dalam upaya peningkatan pemberdayaan gender Pemerintah Kabupaten Tebo terus mendorong peran wanita dalam pelaksanaan pembangunan pengisian jabatan penting seperti misalnya ada beberapa Perangkat Daerah yang di Nahkodai oleh Perempuan seperti Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta banyak Bidang pada Dinas maupun Badan di Kabupaten Tebo yang di duduki oleh perempuan, hanya memang di sektor legislatif dari 35 Anggota DPRD hanya ada 1(satu) orang perempuan saja.

Misi 6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tabel II.28 Analisis capaian misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
					Target	Realisasi	
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi		60	47,13	78,55
2		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Nilai LPPD	2,7179	3,131	*)	-
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	*)	3,55	*)	-
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	74,92	70	*)	-
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	83,71	65	85,37	131,33	

Sumber: DPMPTSPKUKM, Disdukcapil, dan RSUD STS

Sasaran 10 Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk mengukur kinerja sasaran Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Nilai LPPD, Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Capaian kinerja dari tiga indikator kinerja tersebut belum dapat dilakukan pengukuran karena data belum tersedia sampai dengan bulan maret tahun 2024.

Sasaran 11 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mengukur kinerja sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan public ditetapkan indikator kinerja yaitu Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja telah melampau target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 131,33 % kategori sangat memuaskan. Capaian ini merupakan hasil survei yang dilakukan pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Taha Saifuddin dengan nilai survei sebagai berikut

Tabel II.29 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Pelayanan Masyarakat Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Nilai Ikm	Kategori
1	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah	90,87	Baik
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,29	Baik
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Taha Saifuddin	80,95	Baik
Rata-rata		85,37	Baik

Sumber: Dinas DPPMPTSPKUKM, Disdukcapil dan RSUD STS

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** dengan indikator sasaran Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik telah melampaui target yang telah ditetapkan. meskipun sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian Tahun 2022 terutama pada layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah memperoleh nilai kurang baik, namun demikian akumulasi pelayanan publik secara umum nilai capaian sebesar 131,33% kategori sangat memuaskan. Indikator ini tercapai karena Perangkat Daerah pelaksana pelayanan publik terus melakukan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ada beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo diantaranya:

1. Membangun Mall Pelayanan Publik



Pemerintah Kabupaten Tebo telah membangun Mall Pelayanan Publik dan telah diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas di Jakarta pada tanggal 26 September 2023



Foto Pj. Bupati Tebo bersama Menpan RB saat peresmian MPP



Bupati Tebo Aspan moninjau Gerai Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Tebo.

Mall Pelayanan Publik telah beroperasi secara baik sejak diresmikan namun ada beberapa upaya yang sedang dilakukan untuk lebih meningkatkan pelayanan salah satu diantaranya mengembangkan aplikasi penunjang pelayanan layanan yang saat ini masih terus dilakukan.

2. Melaksanakan program PRAKARSA



Pj.Bupati Tebo Prakarsa di Desa Tengah Ulu



PRAKARSA merupakan program yang digagas oleh Bapak Pj Bupati Tebo untuk meningkatkan pelayanan serta menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan PRAKARSA merupakan singkatan dari Pejabat Silaturahmi dan Bekerja di Desa, dimana semua pejabat hadir dan bermalam di Desa. Selanjutnya dilaksanakan audiensi dengan masyarakat desa dimaksud membahas permasalahan yang ada, pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan, pertanian dan beberapa layanan lain seperti Samsat, BPJS Kesehatan serta layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pelayanan publik dikabupaten Tebo termasuk yang terbaik jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Jambi, hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian kepatuhan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023, dimana Pemerintah Kabupaten Tebo memperoleh zona hijau dengan nilai 92,50 memperoleh peringkat ke (sepuluh) secara Nasional dan ke 1 (satu) se-Provinsi Jambi.

2.3.3. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023

Pemerintah kabupaten Tebo menyiapkan anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo yakni **Rp. 1.227.708.230.805** yang didistribusikan kepada 27 Perangkat Daerah, 12 Kecamatan dan 5 Kelurahan, dapat terealisasi sebesar **Rp. 1.213.289.128.831,33** dengan demikian, realisasi anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2023 sebelum diaudit BPK mencapai **98,83%**, sebagaimana dapat dilihat pada tabel beriku

Tabel. II.31 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.227.708.230.805	1.213.289.128.831,33	98,83	1.175.441.007.742,31
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	96.873.289.659	91.814.758.855,33	94,78	86.173.512.980,31
4.1.01	Pajak Daerah	22.094.310.000	24.324.467.710,02	110,09	23.343.449.484,64
4.1.01.06	Pajak Hotel	45.000.000	87.718.500,00	194,93	42.518.500,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.222.810.000	2.009.755.878,02	164,36	1.899.013.784,64
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.000.000	2.400.000,00	120,00	2.943.350,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	400.000.000	549.183.323,00	137,30	478.883.804,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	16.000.000.000	17.030.991.771,00	106,44	16.170.889.499,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	110.000.000	125.096.997,00	113,72	107.352.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.500.000	2.914.411,00	116,58	2.516.163,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	12.000.000	13.978.000,00	116,48	12.835.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000	299.305.629,00	59,86	460.458.243,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2)	2.600.000.000	2.241.388.401,00	86,21	2.261.737.973,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.200.000.000	1.961.734.800,00	163,48	1.904.301.168,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.555.190.000	4.383.576.451,00	171,56	3.071.828.524,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	941.000.000	3.850.074.260,00	409,15	2.409.094.790,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.414.190.000	319.588.898,00	22,60	565.243.450,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000.000	213.913.293,00	106,96	97.490.284,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.139.646.829	11.139.646.829,24	100,00	10.693.391.104,03
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan	11.139.646.829	11.139.646.829,24	100,00	10.693.391.104,03



	Modal pada BUMN				
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	61.084.142.830	51.967.067.865,07	85,07	49.064.843.867,64
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	382.997.000	277.897.500,00	72,56	287.125.800,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	0,00	0,00	(103.316,84)
4.1.04.02	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	1.000.000	0,00	0,00	400.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.800.000.000	1.069.359.828,06	59,41	2.421.589.013,93
4.1.04.05	Jasa Giro	192.000.000	4.800.201,00	2,50	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	10.000.000.000	3.772.794.636,74	37,73	2.431.052.126,72
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.000.000.000	3.908.310.983,71	130,28	8.338.834.577,11
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	450.000.000	404.900.340,44	89,98	1.542.200.088,54
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.730.000.000	701.811.167,08	25,71	1.191.130.265,28
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	31.477.839.000	32.409.512.025,04	102,96	25.821.133.886,90
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	11.050.306.830	9.417.681.183,00	85,23	7.029.671.426,00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0	0,00	0,00	1.810.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	96.873.289.659	91.814.758.855,33	94,78	86.173.512.980,31
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.114.340.941.146	1.107.752.193.166,00	99,41	1.075.614.494.762,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.024.706.773.344	1.018.118.025.364,00	99,36	999.828.814.233,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	912.096.955.344	905.508.220.888,00	99,28	879.361.933.533,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	912.096.955.344	905.508.220.888,00	99,28	879.361.933.533,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0,00	0,00	19.781.555.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	101.057.374.000	101.057.360.476,00	100,00	100.685.325.700,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	11.552.444.000	11.552.444.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	112.609.818.000	112.609.804.476,00	100,00	120.466.880.700,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	89.634.167.802	89.634.167.802,00	100,00	75.785.680.529,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	76.134.167.802	76.134.167.802,00	100,00	64.385.680.529,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	13.500.000.000	13.500.000.000,00	100,00	11.400.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	89.634.167.802	89.634.167.802,00	100,00	75.785.680.529,00



	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.114.340.941.146	1.107.752.193.166,00	99,41	1.075.614.494.762,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.494.000.000	13.722.176.810,00	83,19	13.653.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.494.000.000	13.722.176.810,00	83,19	13.653.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	16.494.000.000	13.722.176.810,00	83,19	13.653.000.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	16.494.000.000	13.722.176.810,00	83,19	13.653.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.227.708.230.805	1.213.289.128.831,33	98,83	1.175.441.007.742,31
5	BELANJA DAERAH	1.317.005.678.373	1.224.014.278.315,55	92,94	1.338.826.631.206,07
5.1	BELANJA OPERASI	876.569.999.915	792.010.259.038,55	90,35	774.488.457.062,07
5.1.01	Belanja Pegawai	433.090.437.908	379.921.213.818,20	87,72	380.310.681.385,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	280.376.466.571	235.706.104.913,00	84,07	237.177.863.062,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	61.335.149.342	58.203.214.296,00	94,89	59.584.095.453,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	66.009.192.320	63.565.876.649,20	96,30	64.941.206.348,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.953.151.951	17.803.090.060,00	99,16	17.866.488.905,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	214.145.000	176.221.900,00	82,29	232.927.617,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	441.600.000	441.600.000,00	100,00	508.100.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	6.760.732.724	4.025.106.000,00	59,54	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.993.010.952	373.698.754.749,35	92,27	379.865.428.669,07
5.1.02.01	Belanja Barang	101.675.313.905	97.760.364.979,00	96,15	100.490.280.770,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	136.476.774.437	129.215.468.864,90	94,68	124.087.341.407,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	45.655.858.243	43.304.796.267,00	94,85	49.850.431.826,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	74.516.628.787	71.135.128.447,00	95,46	70.695.772.900,66
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.916.391.500	4.813.490.900,00	97,91	2.144.433.650,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	41.752.044.080	27.469.505.291,45	65,79	32.597.168.115,41
5.1.03	Belanja Bunga	8.616.514.260	8.616.514.260,00	100,00	0,00
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	8.616.514.260	8.616.514.260,00	100,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.070.513.315	1.069.500.079,00	99,91	1.055.683.730,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.070.513.315	1.069.500.079,00	99,91	1.055.683.730,00
5.1.05	Belanja Hibah	28.799.523.480	28.704.276.132,00	99,67	13.096.663.278,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada	0	0,00	0,00	300.000.000,00



	Pemerintah Pusat				
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0	0,00	0,00	780.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.020.573.029	24.880.208.000,00	99,44	8.473.625.155,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.758.582.319	2.803.700.000,00	101,64	2.522.670.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.020.368.132	1.020.368.132,00	100,00	1.020.368.123,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0,00	0,00	160.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0	0,00	0,00	160.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	876.569.999.915	792.010.259.038,55	90,35	774.488.457.062,07
5.2	BELANJA MODAL	250.517.685.422	242.656.273.135,00	96,86	387.530.343.306,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.753.851.791	31.585.364.498,00	85,94	71.223.599.340,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	151.370.252	149.040.000,00	98,46	3.926.770.800,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.643.932.440	4.475.102.500,00	96,36	4.083.885.580,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.626.324.816	1.626.074.555,00	99,98	38.543.196,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	782.547.760	761.377.500,00	97,29	183.440.230,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.285.858.943	7.234.842.424,00	99,30	14.180.476.408,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	484.460.704	483.435.838,00	99,79	579.789.066,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.626.457.474	5.445.382.770,00	56,57	26.681.261.224,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	962.117.700	807.697.500,00	83,95	11.301.060.907,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.583.458.810	6.536.351.984,00	99,28	6.210.924.360,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	2.227.200	2.227.200,00	100,00	81.429.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	5.997.000	5.997.000,00	100,00	19.100.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	123.703.292	123.413.600,00	99,77	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	37.611.500	37.611.500,00	100,00	43.522.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.437.783.900	3.896.810.127,00	87,81	3.893.396.569,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.980.403.195	59.229.090.330,00	98,75	84.642.985.302,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	47.691.192.442	46.949.752.832,00	98,45	78.067.366.319,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	3.712.500	3.712.500,00	100,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	12.285.498.253	12.275.624.998,00	99,92	6.575.618.983,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.540.870.336	145.617.168.707,00	98,70	226.851.955.350,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	108.975.440.854	107.320.438.949,00	98,48	198.974.295.679,00



5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	24.891.824.196	24.746.487.977,00	99,42	13.972.182.440,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.674.570.000	2.624.630.000,00	98,13	189.914.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	10.999.035.286	10.925.611.781,00	99,33	13.715.563.231,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.242.560.100	6.224.649.600,00	99,71	4.811.803.314,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5.990.481.800	5.973.105.300,00	99,71	4.381.300.854,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	200.578.300	200.044.300,00	99,73	146.918.760,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	51.500.000	51.500.000,00	100,00	283.583.700,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	250.517.685.422	242.656.273.135,00	96,86	387.530.343.306,00
5.2	BELANJA MODAL	250.517.685.422	242.656.273.135,00	96,86	387.530.343.306,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	500.000.000	0,00	0,00	969.750.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	0,00	0,00	969.750.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	0,00	0,00	969.750.000,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	500.000.000	0,00	0,00	969.750.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	189.417.993.036	189.347.746.142,00	99,96	175.838.080.838,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.641.527.801	2.571.294.431,00	97,34	2.349.545.084,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.334.344.948	2.272.279.006,00	97,34	1.973.354.429,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	307.182.853	299.015.425,00	97,34	376.190.655,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	186.776.465.235	186.776.451.711,00	100,00	173.488.535.754,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	186.776.465.235	186.776.451.711,00	100,00	173.488.535.754,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	189.417.993.036	189.347.746.142,00	99,96	175.838.080.838,00
	JUMLAH BELANJA	1.317.005.678.373	1.224.014.278.315,55	92,94	1.338.826.631.206,07
	SURPLUS/DEFISIT	(89.297.447.568)	(10.725.149.484,22)	12,01	(163.385.623.463,76)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	89.297.447.568	91.535.866.734,22	102,51	276.247.599.395,99
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	112.861.975.932	112.862.075.932,22	100,00	286.885.299.396,99
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	112.861.975.932	112.862.075.932,22	100,00	141.941.608.628,99
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	83.400.220.040	83.400.220.040,18	100,00	141.851.753.601,62
6.1.01.05	Penghematan Belanja	1.590.562.678	1.590.562.678,00	100,00	0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	27.871.193.214	27.871.293.214,04	100,00	89.855.027,37



6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0,00	0,00	144.943.690.768,00
6.1.04.01	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0	0,00	0,00	144.943.690.768,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	112.861.975.932	112.862.075.932,22	100,00	286.885.299.396,99
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.564.528.364	21.326.209.198,00	90,50	10.637.700.001,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000,00	100,00	5.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000	3.000.000.000,00	100,00	5.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.564.528.364	18.326.209.198,00	89,12	5.137.700.001,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	20.564.528.364	18.326.209.198,00	89,12	5.137.700.001,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.564.528.364	21.326.209.198,00	90,50	10.637.700.001,00
	PEMBIAYAAN NETTO	89.297.447.568	91.535.866.734,22	102,51	276.247.599.395,99
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	80.810.717.250,00	0,00	112.861.975.932,23

2.3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Pemerintah kabupaten Tebo berusaha untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya, baik dari sumber daya manusia maupun anggaran dalam menjalankan Visi dan Misi menuju **Kabupaten Tebo Maju Bersama Agribisnis**.

2.3.4.1 Sumberdaya Manusia

Jumlah ASN di Kabupaten Tebo Tahun 2023 sebanyak 3.410 orang masih dibawah angka ideal yakni 1,5 % dari total jumlah penduduk Tebo sebanyak 362.946 yaitu 5.444 ASN dengan tingkat keterpenuhan sebesar 62,64 %. Melihat rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 107,62% dibandingkan tingkat keterpenuhan ASN sebesar 62,64 % dapat diartikan telah terjadi efisiensi penggunaan Sumberdaya Manusia sebesar 1,70.

2.3.4.2 Anggaran

Serapan anggaran pada tahun 2023 sebesar 92,34 % dibandingkan dengan capaian rata-rata indikator kinerja sebesar 107,62 % dapat diartikan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,16. Untuk melihat efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.32 Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran

No	Sasaran	% Rata-rata capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	102,86	256.576.850.838	241.014.486.712	93,93	Efisien
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	100,90	188.102.560.672	162.253.273.633,55	86,25	Efisien
3	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan daerah	140,06	3.983.651.159	3.476.700.677	87,27	Efisien
4	Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan daerah	211,47	206.417.055.398	200.456.886.463	97,11	Efisien



5	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana	99,75	15.012.317.086	14.254.608.985	94,95	Efisien
6	Menurunnya angka pengangguran terbuka	156,7	116.750.595	111.876.986	95,82	Efisien
7	Meningkatnya pendapatan masyarakat	106,05	1.917.107.760	1.764.675.754	92,04	Efisien
8	Terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat	186,01	6.971.110.732	6.567.223.776	94,20	Efisien
9	Meningkatnya sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	-	7.382.244.889	7.145.354.219	96,79	-
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	131,33	3.265.979.960	3.107.675.874	95,15	Efisien

BAB III**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN****3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Tebo**

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan RI dalam bentuk Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/ Wali Kota Dalam Rangka Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023. Adapun program Tugas Pembantuan yang dilaksanakan yaitu Program Perdagangan Dalam Negeri Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat.

3.1.1 Target Kinerja

Adapun target dari pelaksanaan program Tugas Pembantuan yang dilaksanakan adalah terbangunnya sarana perdagangan berupa los di pasar Tanjung Bungur.

3.1.2 Realisasi

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan yang dilimpahkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan RI ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tebo pada Tahun 2023 sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan realisasi Rp. 3.000.000.000,-.

Tabel. III.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kementerian Perdagangan RI	Nomor SP DIPA. 090.02.4.100842/2023 Tanggal 30 November 2022	Program Perdagangan Dalam Negeri		Dinas Perindagnaker	3.000.000.000	3.000.000.000	100.00			TP
			Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat	Pasar Tanjung Bungur Kec. Tebo Tengah		2.895.780.000	2.895.780.000	100.00	1 unit	100.00	
			Belanja Gedung dan Bangunan TP			2.895.780.000	2.895.780.000	100.00	1 unit	100.00	
			- Biaya Kontruksi Fisik			2.735.235.000	2.735.235.000	100.00	1.PKT	100.00	



			- Biaya Konsultan Pengawas			160,545,000	160,545,000	100.00	1.PKT	100.00	
			Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Kab. Tebo		43,680,000	43,680,000	100.00		100.00	
			- Honor PPK	Kab. Tebo		13,680,000	13,680,000	100.00	6 CB	100.00	
			- Honor PKPA	Kab. Tebo		13,260,000	13,260,000	100.00	6 CB	100.00	
			- Honor PPP SPM	Kab. Tebo		5,280,000	5,280,000	100.00	6 CB	100.00	
			Honor Bendahara Pengeluaran	Kab. Tebo		4,620,000	4,620,000	100.00	6 CB	100.00	
			- Honor Staf Pengelola	Kab. Tebo		6,840,000	6,840,000	100.00	12 OB	100.00	
			Belanja Bahan	Kab. Tebo		5,162,000	5,162,000				
			- Snack Rapat Biasa	Kab. Tebo		2,040,000	2,040,000	100.00	120 OK	100.00	
			- Dokumentasi	Kab. Tebo		1,000,000	1,000,000	100.00	1. PKT	100.00	
			- Pengadaan dan Pencetakan Laporan	Kab. Tebo		2,122,000	2,122,000	100.00	1.PKT	100.00	
			Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Kab. Tebo		4,018,000	4,018,000	100.00		100.00	
			- ATK dan Computer Suppliers	Kab. Tebo		4,018,000	4,018,000	100.00	1. PTK	100.00	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Kab. Tebo		47,760,000	47,760,000	100.00		100.00	
			- Satuan biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta-Jambi	4,018,000		6,050,000	6,050,000	100.00	2.OK	100.00	
			- Uang harian perjalanan dinas luar kota	Kab. Tebo		9,010,000	9,010,000	100.00	17.OH	100.00	
			- Biaya penginapan perjalanan Dinas Eselon III/Golongan IV	Kab. Tebo		2,100,000	2,100,000	100.00	3.OH	100.00	
			- Taxi Jakarta PP	Kab. Tebo		3,870,000	3,870,000	100.00	30.OH	100.00	
			- Uang harian k KPPN Muara Bungo	Kab. Tebo		26,730,000	26,730,000	100.00	99.OH	100.00	
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Kab. Tebo		3,600,000	3,600,000	100.00		100.00	
			-Uang harian monitoring lapangan	Kab. Tebo		3,600,000	3,600,000	100.00	36.OK	100.00	
			- Jumlah			3,000,000,000	3,000,000,000	100.00			



3.2 Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas pada Tahun 2023 tidak ada permasalahan dan kendala karena pekerjaan sudah di laksanakan 100 %

3.3 Saran

Menyampaikan kepada pusat tentang standar harga barang agar harga satuan barang dalam DIPA dapat masuk dalam e-katalog sehingga penggunaan anggaran dapat lebih diefektifkan.



3.2 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Tebo

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo pada Tahun 2023 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian RI dalam bentuk Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi. Adapun program Tugas Pembantuan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

3.2.1 Target Kinerja

Adapun target dari pelaksanaan program Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi yang dilaksanakan adalah

1. Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), Dukungan Manajemen di Kecamatan Sumay, Tebo Ilir dan Rimbo Ulu
2. Fasilitasi KP3 Mendukung Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Pupuk Hayati Cair, Pompa Air (Ukuran 4 inchi), Traktor Roda 2 (8,5 HP)
3. Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pupuk Hayati Cair) pada Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan Serai Serumpun, Kecamatan VII Koto, Kecamatan VII Koto Ilir, Kecamatan Tebo Ulu, dan Kecamatan Sumay.
4. Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (Pompa Air (Ukuran 4 inchi) , Traktor Roda 2 (8,5 HP), Hand Sprayer (Elektrik), Kendaraan Roda 3.
5. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
6. Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Budidaya Bawang merah (Benih, Pupuk NPK, POC, PHC, Silika, NPK Cair, Asam Humat, Sungkup, Plastik UV)
7. Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (Combine Harvester Kecil, Combine Harvester besar, Power Thresher



8. Penyaluran Sarana Produksi budidaya Kedelai Budidaya Kedelai (Bantuan Benih, Pupuk NPK, Bantuan Herbisida, Bantuan Pupuk Hayati Cair)
9. Melaksanakan Penyaluran Benih Padi Bersertifikat (Bantuan Benih Padi Inbrida)
10. Menyalurkan Penyaluran Benih Jagung Bersertifikat (Bantuan Benih Jagung Hibida)
11. Penyaluran Sarana Produksi Padi Rawa (Benih Padi, NPK, Pupuk Hayati Cair, Pestisida)
12. Budidaya Tanaman Padi Lahan Kering/Gogo (Bantuan Benih, Pupuk NPK, Pestisida)

3.2.2 Realisasi

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi yang dilimpahkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian RI ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo pada Tahun 2023 sebesar Rp. 3.300.827.000,- dengan realisasi Rp. 3.300.827.000-..

Tabel III.2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi/Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKP D Pelaksana TP	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Kementerian Pertanian	No. SP-DIPA.018.08.3.109007/2023 Tanggal 26 Januari 2023	Program : Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			1,154,991,000	1,154,991,000	100.00			
			Kegiatan : Fasilitasi Pupuk dan Pestisida			927,391,000	927,391,000	100.00			
			Output : Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)			600,000,000	600,000,000	100.00			
			<i>Rincian Kegiatan : Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)</i>		DTP HKP	600,000,000	600,000,000	100.00	3 unit	100%	
				Poktan Silincah Jaya Desa Teriti Kec. Sumay							
				Poktan Dian Belato Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir							



				Poktan Serayu Makmur Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu						
			Output : Pelaksanaan Penerima Pupuk Bersubsidi yang di validasi dan Diverifikasi			21,451,000	21,451,000	100.00		
			<i>Rincian Kegiatan : Dukungan Manajemen</i>	DTPHKP	DTP HKP	21,451,000	21,451,000	100.00	1 layanan	100%
			Output : Fasilitas KP3 Mendukung Pengawasan Pupuk dan Pestisida			17,700,000	17,700,000	100.00		
			<i>Rincian Kegiatan : Fasilitas KP3 Mendukung Pengawasan Pupuk dan Pestisida</i>	DTPHKP	DTP HKP	17,700,000	17,700,000	100.00	1 koordinasi	100%
			Output : Bantuan Saprodi Mendukung Peningkatan Produksi Tanaman Pangan			288,240,000	288,240,000	100.00		
			<i>Rincian Kegiatan : Pupuk Hayati Cair</i>	DTPHKP	DTP HKP	288,240,000	288,240,000	100.00	2402 ha	100%
				Karya Maju Kec. Tengah Ilir						
				Sinar Harapan Kec. Tebo Tengah						
				Sido Makmur Kec. Sumay						
				Sialang Jaya Kec. VII Koto Ilir						
				Harapan Makmur Kec. Tengah Ilir						
				Puding Indah Kec. Tebo Ulu						
				Lopak Sialang Kec. Tebo Tengah						
				Tanah Kuning Kec. VII Koto						
				Alam subur Kec. VII Koto						
				Sekintang Dayo Kec. Tebo Tengah						
				Unggul Tani Kec. Tebo Tengah						
				Sungai Baung Kec. Tebo Tengah						
				Telago Putri Kec. VII Koto Ilir						
				Sumber rezeki Kec. Tebo Ulu						



				Usaha Karya Kec. Tengah Ilir								
				Cahaya sempurna Kec. Tebo Tengah								
				Titian Makmur Kec. Tebo Ulu								
				Puding Mas Kec.serai serumpun								
				Sialang Pulai Kec. Tebo Tengah								
				sido Mucul Kec. Tebo Ulu								
				sumber Karya Kec. Tengah Ilir								
				Kedung Berkah Kec. Rimbo Bujang								
				Kemang Manis Kec. Tebo Ulu								
				Alahan Panjang Kec. teboUlu								
				Mekar Tani Kec. Sumay								
				Tanjung aur indah kec.Serai Serumpun								
				Sumber rezeki Kec. Serai Serumpun								
				Harapan II Kecamatan Rimbo Ulu								
				Rimbo Panjang Kec. VII Koto								
				Sumber Makmur Kec. Tebo Tengah								
				Renah Permai Kec. Tebo Ulu								
				Sungai Napal Kec.Tebo Ulu								
				Serai Serumpun Kec. Muara Tabir								
				Alahan Jaya Kec. Tebo Ulu								
				Padang Genting Kec. TeboUlu								
				Suka Maju Kec. Tebo tengah								
				sungai Lain Kec. Tengah Ilir								



				Lingkar Nago Kec. Tebo Ulu							
				Payo sialit Kec. VII Koto Ilir							
				Karya Maju Kec. Tebo tengah							
				Mekar Maju Kec. Muara Tabir							
				Payo Lebar Kec. Tebo Ulu							
				Payo Lebar Kec. VII Koto							
				Setia Usaha Kec. Muara tabir							
				Bernai Jaya Kec. Tebo Ulu							
				Serayu Makmur Kec. Rimbo Ulu							
				Tani Karya Kec. VII Koto Ilir							
				Tunas Muda Kec. Tebo Ulu							
				Danau panjang Kec. Tebo Ulu							
				Langkaran Nago Kec. VII Koto Ilir							
				Telago Makmur Kec. Tebo Ulu							
				Maju Bersama Kec. Tebo Ulu							
				Sepakat Mandiri Kec. Tebo Ulu							
				Tani Makmur Kec. Tebo Ulu							
				Mekar Sari Kec. Rimbo Ulu							
				Sumber Rezeki Kec. Tebo Tengah							
				Kegiatan : Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			170,000,00 0	170,000,00 0	100.00		
				Output : Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan			170,000,00 0	170,000,00 0	100.00		
				<i>Rincian Kegiatan :</i>							
				Pompa Air (Ukuran 4 inchi)	DTP HKP		50,000,000	50,000,000	100.00	2 unit	100%



				Poktan Mustika Tani Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang							
				Poktan Mandiri Sejahter Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang							
			Traktor Roda 2 (8,5 HP)		DTP HKP	64,000,000	64,000,000	100.00	2 unit	100%	
				Poktan Sungai Betung Desa Bungo Tanjung Kec. Tebo Ulu							
				Poktan Ladang Panjang Desa Bungo Tanjung Kec. Tebo Ulu							
			Hand Sprayer (Elektrik)		DTP HKP	11,000,000	11,000,000	100.00	10 unit	100%	
				Poktan Mustika Tani Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang							
				Poktan Mandiri Sejahter Desa Perintis Kec. Rimbo Bujang							
			Kendaraan Roda 3		DTP HKP	45,000,000	45,000,000	100.00	1 unit	100%	
				Poktan Wonosari Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang							
			Kegiatan : Fasilitas Pembiayaan Pertanian			57,600,000	57,600,000	100.00			
			Output : Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)			57,600,000	57,600,000	100.00			
			<i>Rincian Kegiatan : Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)</i>		DTP HKP	57,600,000	57,600,000	100.00	400 ha	100%	
				Poktan Asah Asih Asuh Kec. Sumay							
				Poktan Tunas Baru Kec. Sumay							
				Poktan Karya makmur Kec. Sumay							
				Poktan Lestari Kec. Sumay							
				Poktan Batu Cincin Kec. Tebo Ilir							
				Poktan Patenangan Kec. Tebo Ilir							



				Poktan Rimbo Pulai Kec. Tebo Ilir							
				Poktan Pengentingan Kec. Tebo Ilir							
				Poktan tekuyung Emas Kec. Sumay							
				Poktan Lingkar Nago Kec. Tebo Ulu							
				Poktan Bedaro Indah Kec. Tebo Ulu							
				Poktan Berkat Mulia Kec. Tebo Ulu							
				Poktan Lumbang Jaya Kec. Tebo Ulu							
				Poktan Sinar Usaha Kec. Tebo Ulu							
				Poktan Tunas Harapan Kec. Tebo Ulu							
				Poktan Usaha Bakti Kec. Tebo Ulu							
II	Kementerian Pertanian	No. SP-DIPA.018.04.1.625875 Tanggal 30 November 2022	Program : Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			900,000,000	900,000,000	100.00			
			Kegiatan : Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obatn			900,000,000	900,000,000	100.00			
			Output : Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi			900,000,000	900,000,000	100.00			
			Rincian Kegiatan :		DTP HKP	900,000,000	900,000,000	100.00	20 ha	100%	
			Budidaya Bawang Merah								
			- Benih						15000 kg		
				GP Mandiri Sejahtera Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang					7500 kg		
				KT. Serayu Makmur Desa Wanareja Kec.Rimbo Ulu					7500 kg		
			- Pupuk NPK						6000 kg		



				GP Mandiri Sejahtera Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang					3000 kg		
				KT. Serayu Makmur Desa Wanareja Kec.Rimbo Ulu					3000 kg		
			- POC						160 liter		
				GP Mandiri Sejahtera Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang					80 liter		
				KT. Serayu Makmur Desa Wanareja Kec.Rimbo Ulu					80 liter		
			- PHC						160 liter		
				GP Mandiri Sejahtera Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang					80 liter		
				KT. Serayu Makmur Desa Wanareja Kec.Rimbo Ulu					80 liter		
			- Silika						160 kg		
				GP Mandiri Sejahtera Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang					80 kg		
				KT. Serayu Makmur Desa Wanareja Kec.Rimbo Ulu					80 kg		
			- NPK Cair						200 liter		
				GP Mandiri Sejahtera Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang					100 liter		
				KT. Serayu Makmur Desa Wanareja Kec.Rimbo Ulu					100 liter		
			- Asam Humat						200 kg		
				GP Mandiri Sejahtera Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang					100 kg		



				KT. Serayu Makmur Desa Wanareja Kec.Rimbo Ulu					100 kg		
			- Sungkup						2400 sungkup		
				GP Mandiri Sejahtera Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang					1200 sungkup		
				KT. Serayu Makmur Desa Wanareja Kec.Rimbo Ulu					1200 sungkup		
			- Plastik UV						120 rol		
				GP Mandiri Sejahtera Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang					60 rol		
				KT. Serayu Makmur Desa Wanareja Kec.Rimbo Ulu					60 rol		
III	Kementerian Pertanian	No. SP-DIPA.018.03.4.109119 Tanggal 24 November 2022	Program : Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			1,245,836,000	1,245,836,000	100.00			
			Kegiatan : Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan			1,245,836,000	1,245,836,000	100.00			
			Output : Sarana Pascapanen Tanaman Pangan			1,245,836,000	1,245,836,000	100.00			
			<i>Rincian Kegiatan :</i>		DTP HKP						
			Combine Harvester Kecil			280,940,000	280,940,000	100.00	2 unit	100%	
				Pancuran Gading Makmur Desa Balai Rajo Kec. VII Koto Ilir							
				Payo Lebar Desa Kuamang Kec. VII Koto							
			Combine Harvester besar			860,000,000	860,000,000	100.00	2 unit	100%	
				Lingkar Nago Desa Bunga Tanjung Kec. Tebo Ulu							
				Silincih Jaya Desa Teriti Kec. Sumay							
			Power Thresher			104,896,000	104,896,000	100.00	4 unit	100%	



				Cahaya Baru Desa Betung Bedarah Timur Kec. Tebo Ilir							
				Tengkuyung Emas Desa Tambun Arang Kec. Sumay							
				Melati Desa Jati Belarik Kec.Sumay							
				Sido Muncul Desa Medan Seri Rambahan Kec. Tebo Ulu							
				Kegiatan : Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan			2,815,683,1 40	2,815,683, 140	100.00		
				Output : Penyaluran Sarana Produksi budidaya Kedelai			2,815,683,1 40	2,815,683, 140	100.00		
				Rincian Kegiatan :	DTP HKP		2,815,683,1 40	2,815,683, 140	100.00		
				Budidaya Kedelai							
				- Bantuan Benih			1,128,500,0 00	1,128,500, 000	100.00	61000 kg	
				KT.Tani Makmur Desa Dusun Baru Kec.VII Koto			46,250,000	46,250,000	100.00	2500 kg	
				KT.Harapan Makmur Desa Dusun Baru Kec.VII Koto			46,250,000	46,250,000	100.00	2500 kg	
				KT.Harapan Mulya Desa Dusun Baru Kecamatan VII Koto			111,000,00 0	111,000,00 0	100.00	6000 kg	
				KT. Harapan Jaya Mandiri Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec.VII Koto			23,125,000	23,125,000	100.00	1250 kg	
				KT.Sentano Maju Desa Balai Rajo Kec.VII Koto Ilir			46,250,000	46,250,000	100.00	2500 kg	
				KT.Klumpang Jaya Lestari Desa Balairajo Kec.VII Koto Ilir			46,250,000	46,250,000	100.00	2500 kg	
				KT. Bukit Limau Maju Jaya Desa Balairajo Kec.VII Koto Ilir			55,500,000	55,500,000	100.00	3000 kg	
				KT. Laggas Maju Sejahtera Desa Balai Rajo Kec.VII Koto Ilir			46,250,000	46,250,000	100.00	2500 kg	



				KT.Sungai Tembang Desa Pulau Panjang Kec.Tebo Ulu		13,875,000	13,875,000	100.00	750 kg		
				KT. Suka Jaya Desa Suo-Suo Kec.Sumay		92,500,000	92,500,000	100.00	5000 kg		
				KT. Bersatu Desa Pemayungan Kec.Sumay		18,500,000	18,500,000	100.00	1000 kg		
				KTH.Bukit Keramu Alam Desa Pemayungan Kec.Sumay		55,500,000	55,500,000	100.00	3000 kg		
				KT.Bina Karya Desa Semambu Kec.Sumay		18,500,000	18,500,000	100.00	1000 kg		
				KT. Sumber Rezeki Desa Napal Putih Kec.Serai Serumpun		18,500,000	18,500,000	100.00	1000 kg		
				KT.Puding emas Desa Pagar Puding Lamo Kec.Serai Serumpun		18,500,000	18,500,000	100.00	1000 kg		
				KT.Mekar sari Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah		27,750,000	27,750,000	100.00	1500 kg		
				KT.Sialang Pulai Desa Bedaro Rampak Kec.Tebo Tengah		23,125,000	23,125,000	100.00	1250 kg		
				KT. Sepakat Desa Teluk Rendah Ilir Kec.Tebo Ilir		13,875,000	13,875,000	100.00	750 kg		
				KT.Maju Bersama Kel.Sungai Bengkal Kec.Tebo Ilir		18,500,000	18,500,000	100.00	1000 kg		
				KT. Sumber Rezeki Desa Olak Kemang Kec.Ma.Tabir		46,250,000	46,250,000	100.00	2500 kg		
				KT.Mulya Jaya Desa Sungai Jernih Kec.Ma.Tabir		46,250,000	46,250,000	100.00	2500 kg		
				KT.Mekar Maju Desa Sungai Jernih Kec.Ma.Tabir		46,250,000	46,250,000	100.00	2500 kg		
				KT. Utama I Desa Rimbo Mulyo Kec.Rimbo Bujang		27,750,000	27,750,000	100.00	1500 kg		



				KT. Sumber Mulya Desa Purwoharjo Kec.Rimbo Bujang		37,000,000	37,000,000	100.00	2000 kg		
				KT.Kedung berkah Desa Tirta Kencana Kec.Rimbo Bujang		9,250,000	9,250,000	100.00	500 kg		
				KT.Mekar Sari Desa Sumber Sari Kec.Rimbo Ulu		27,750,000	27,750,000	100.00	1500 kg		
				KT.Pandan harum Desa Suka Damai Kec.Rimbo Ulu		18,500,000	18,500,000	100.00	1000 kg		
				KT. Nusa Jaya Desa Suka Damai Kec.Rimbo Ulu		18,500,000	18,500,000	100.00	1000 kg		
				KT.Hamparan II Desa Suka Damai Kec.Rimbo Ulu		18,500,000	18,500,000	100.00	1000 kg		
				KT. Taman Indah Desa Giriwinangun Kec.Rimbo Ilir		13,875,000	13,875,000	100.00	750 kg		
				GP.Margo Mulyo Desa Sidorejo Kec.Rimbo Ilir		13,875,000	13,875,000	100.00	750 kg		
				KT.Bungo Jaya Desa Aur Cino Kec.VII Koto		18,500,000	18,500,000	100.00	1000 kg		
				KT. Maju Jaya Desa Cermin Alam Kec.VII Koto Ilir		9,250,000	9,250,000	100.00	500 kg		
				KT. Mekar Sari 2 Desa Sumber Sari Kec.Rimbo Ulu		9,250,000	9,250,000	100.00	500 kg		
				KT.Daya Guna Desa Giriwinangun Kec.Rimbo Ilir		13,875,000	13,875,000	100.00	750 kg		
				KT.Suka Makmur Desa Sari Mulya Kec.Rimbo Ilir		13,875,000	13,875,000	100.00	750 kg		
				-Bantuan Pupuk NPK		1,342,000,000	1,342,000,000	100.00	122000 kg		
				KT.Tani Makmur Desa Dusun Baru Kec.VII Koto		55,000,000	55,000,000	100.00	5000 kg		
				KT.Harapan Makmur Desa Dusun Baru Kec.VII Koto		55,000,000	55,000,000	100.00	5000 kg		



				KT.Harapan Mulya Desa Dusun Baru Kecamatan VII Koto		132,000,000	132,000,000	100.00	12000 kg		
				KT. Harapan Jaya Mandiri Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec.VII Koto		27,500,000	27,500,000	100.00	2500 kg		
				KT.Sentano Maju Desa Balai Rajo Kec.VII Koto Ilir		55,000,000	55,000,000	100.00	5000 kg		
				KT.Klumpang Jaya Lestari Desa Balairajo Kec.VII Koto Ilir		55,000,000	55,000,000	100.00	5000 kg		
				KT. Bukit Limau Maju Jaya Desa Balairajo Kec.VII Koto Ilir		66,000,000	66,000,000	100.00	6000 kg		
				KT. Langgas Maju Sejahtera Desa Balai Rajo Kec.VII Koto Ilir		55,000,000	55,000,000	100.00	5000 kg		
				KT.Sungai Tembang Desa Pulau Panjang Kec.Tebo Ulu		16,500,000	16,500,000	100.00	1500 kg		
				KT. Suka Jaya Desa Suo-Suo Kec.Sumay		110,000,000	110,000,000	100.00	10000 kg		
				KT. Bersatu Desa Pemayungan Kec.Sumay		22,000,000	22,000,000	100.00	2000 kg		
				KTH.Bukit Keramu Alam Desa Pemayungan Kec.Sumay		66,000,000	66,000,000	100.00	6000 kg		
				KT.Bina Karya Desa Semambu Kec.Sumay		22,000,000	22,000,000	100.00	2000 kg		
				KT. Sumber Rezeki Desa Napal Putih Kec.Serai Serumpun		22,000,000	22,000,000	100.00	2000 kg		
				KT.Puding emas Desa Pagar Puding Lamo Kec.Serai Serumpun		22,000,000	22,000,000	100.00	2000 kg		
				KT.Mekar sari Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah		33,000,000	33,000,000	100.00	3000 kg		
				KT.Sialang Pulai Desa Bedaro Rampak Kec.Tebo Tengah		27,500,000	27,500,000	100.00	2500 kg		



				KT. Sepakat Desa Teluk Rendah Ilir Kec.Tebo Ilir		16,500,000	16,500,000	100.00	1500 kg		
				KT.Maju Bersama Kel.Sungai Bengkal Kec.Tebo Ilir		22,000,000	22,000,000	100.00	2000 kg		
				KT. Sumber Rezeki Desa Olak Kemang Kec.Ma.Tabi r		55,000,000	55,000,000	100.00	5000 kg		
				KT.Mulya Jaya Desa Sungai Jernih Kec.Ma.Tabi r		55,000,000	55,000,000	100.00	5000 kg		
				KT.Mekar Maju Desa Sungai Jernih Kec.Ma.Tabi r		55,000,000	55,000,000	100.00	5000 kg		
				KT. Utama I Desa Rimbo Mulyo Kec.Rimbo Bujang		33,000,000	33,000,000	100.00	3000 kg		
				KT. Sumber Mulya Desa Purwoharjo Kec.Rimbo Bujang		44,000,000	44,000,000	100.00	4000 kg		
				KT.Kedung berkah Desa Tirta Kencana Kec.Rimbo Bujang		11,000,000	11,000,000	100.00	1000 kg		
				KT.Mekar Sari Desa Sumber Sari Kec.Rimbo Ulu		33,000,000	33,000,000	100.00	3000 kg		
				KT.Pandan harum Desa Suka Damai Kec.Rimbo Ulu		22,000,000	22,000,000	100.00	2000 kg		
				KT. Nusa Jaya Desa Suka Damai Kec.Rimbo Ulu		22,000,000	22,000,000	100.00	2000 kg		
				KT.Hampara n II Desa Suka Damai Kec.Rimbo Ulu		22,000,000	22,000,000	100.00	2000 kg		
				KT. Taman Indah Desa Giriwinangu n Kec.Rimbo Ilir		16,500,000	16,500,000	100.00	1500 kg		
				GP.Margo Mulyo Desa Sidorejo Kec.Rimbo Ilir		16,500,000	16,500,000	100.00	1500 kg		
				KT.Bungo Jaya Desa Aur Cino Kec.VII Koto		22,000,000	22,000,000	100.00	2000 kg		
				KT. Maju Jaya Desa		11,000,000	11,000,000	100.00	1000 kg		



				Mermin Alam Kec.VII Koto Ilir							
				KT. Mekar Sari 2 Desa Sumber Sari Kec.Rimbo Ulu		11,000,000	11,000,000	100.00	1000 kg		
				KT.Daya Guna Desa Giriwinangu n Kec.Rimbo Ilir		16,500,000	16,500,000	100.00	1500 kg		
				KT.Suka Makmur Desa Sari Mulya Kec.Rimbo Ilir		16,500,000	16,500,000	100.00	1500 kg		
			- Bantuan Herbisida			107,360,000	107,360,000	100.00	1220 liter		
				KT.Tani Makmur Desa Dusun Baru Kec.VII Koto		4,400,000	4,400,000	100.00	50 liter		
				KT.Harapan Makmur Desa Dusun Baru Kec.VII Koto		4,400,000	4,400,000	100.00	50 liter		
				KT.Harapan Mulya Desa Dusun Baru Kecamatan VII Koto		10,560,000	10,560,000	100.00	120 liter		
				KT. Harapan Jaya Mandiri Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec.VII Koto		2,200,000	2,200,000	100.00	25 liter		
				KT.Sentano Maju Desa Balai Rajo Kec.VII Koto Ilir		4,400,000	4,400,000	100.00	50 liter		
				KT.Klumpang Jaya Lestari Desa Balairajo Kec.VII Koto Ilir		4,400,000	4,400,000	100.00	50 liter		
				KT. Bukit Limau Maju Jaya Desa Balairajo Kec.VII Koto Ilir		5,280,000	5,280,000	100.00	60 liter		
				KT. Langgas Maju Sejahtera Desa Balai Rajo Kec.VII Koto Ilir		4,400,000	4,400,000	100.00	50 liter		
				KT.Sungai Tembang Desa Pulau Panjang Kec.Tebo Ulu		1,320,000	1,320,000	100.00	15 liter		
				KT. Suka Jaya Desa Suo-Suo Kec.Sumay		8,800,000	8,800,000	100.00	100 liter		
				KT. Bersatu Desa Pemayungan Kec.Sumay		1,760,000	1,760,000	100.00	20 liter		



				KTH. Bukit Keramu Alam Desa Pemayungan Kec. Sumay		5,280,000	5,280,000	100.00	60 liter		
				KT. Bina Karya Desa Semambu Kec. Sumay		1,760,000	1,760,000	100.00	20 liter		
				KT. Sumber Rezeki Desa Napal Putih Kec. Serai Serumpun		1,760,000	1,760,000	100.00	20 liter		
				KT. Puding emas Desa Pagar Puding Lamo Kec. Serai Serumpun		1,760,000	1,760,000	100.00	20 liter		
				KT. Mekar sari Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah		2,640,000	2,640,000	100.00	30 liter		
				KT. Sialang Pulai Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah		2,200,000	2,200,000	100.00	25 liter		
				KT. Sepakat Desa Teluk Rendah Ilir Kec. Tebo Ilir		1,320,000	1,320,000	100.00	15 liter		
				KT. Maju Bersama Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir		1,760,000	1,760,000	100.00	20 liter		
				KT. Sumber Rezeki Desa Olak Kemang Kec. Ma. Tabir		4,400,000	4,400,000	100.00	50 liter		
				KT. Mulya Jaya Desa Sungai Jernih Kec. Ma. Tabir		4,400,000	4,400,000	100.00	50 liter		
				KT. Mekar Maju Desa Sungai Jernih Kec. Ma. Tabir		4,400,000	4,400,000	100.00	50 liter		
				KT. Utama I Desa Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang		2,640,000	2,640,000	100.00	30 liter		
				KT. Sumber Mulya Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang		3,520,000	3,520,000	100.00	40 liter		
				KT. Kedung berkah Desa Tirta Kencana Kec. Rimbo Bujang		880,000	880,000	100.00	10 liter		
				KT. Mekar Sari Desa Sumber Sari		2,640,000	2,640,000	100.00	30 liter		



				Kec.Rimbo Ulu							
				KT.Pandan harum Desa Suka Damai Kec.Rimbo Ulu		1,760,000	1,760,000	100.00	20 liter		
				KT. Nusa Jaya Desa Suka Damai Kec.Rimbo Ulu		1,760,000	1,760,000	100.00	20 liter		
				KT.Hamparan II Desa Suka Damai Kec.Rimbo Ulu		1,760,000	1,760,000	100.00	20 liter		
				KT. Taman Indah Desa Giriwinangun Kec.Rimbo Ilir		1,320,000	1,320,000	100.00	15 liter		
				GP.Margo Mulyo Desa Sidorejo Kec.Rimbo Ilir		1,320,000	1,320,000	100.00	15 liter		
				KT.Bungo Jaya Desa Aur Cino Kec.VII Koto		1,760,000	1,760,000	100.00	20 liter		
				KT. Maju Jaya Desa Cermin Alam Kec.VII Koto Ilir		880,000	880,000	100.00	10 liter		
				KT. Mekar Sari 2 Desa Sumber Sari Kec.Rimbo Ulu		880,000	880,000	100.00	10 liter		
				KT.Daya Guna Desa Giriwinangun Kec.Rimbo Ilir		1,320,000	1,320,000	100.00	15 liter		
				KT.Suka Makmur Desa Sari Mulya Kec.Rimbo Ilir		1,320,000	1,320,000	100.00	15 liter		
				- Bantuan Pupuk Hayati Cair		237,823,140	237,823,140	100.00	3660 liter		
				KT.Tani Makmur Desa Dusun Baru Kec.VII Koto		9,746,850	9,746,850	100.00	150 liter		
				KT.Harapan Makmur Desa Dusun Baru Kec.VII Koto		9,746,850	9,746,850	100.00	150 liter		
				KT.Harapan Mulya Desa Dusun Baru Kecamatan VII Koto		23,392,440	23,392,440	100.00	360 liter		
				KT. Harapan Jaya Mandiri Desa Tanjung Pucuk Jambi Kec.VII Koto		4,873,425	4,873,425	100.00	75 liter		
				KT.Sentano Maju Desa Balai Rajo		9,746,850	9,746,850	100.00	150 liter		



				Kec.VII Koto Ilir							
				KT.Klumpang Jaya Lestari Desa Balairajo Kec.VII Koto Ilir		9,746,850	9,746,850	100.00	150 liter		
				KT. Bukit Limau Maju Jaya Desa Balairajo Kec.VII Koto Ilir		11,696,220	11,696,220	100.00	180 liter		
				KT. Langgas Maju Sejahtera Desa Balai Rajo Kec.VII Koto Ilir		9,746,850	9,746,850	100.00	150 liter		
				KT.Sungai Tembang Desa Pulau Panjang Kec.Tebo Ulu		2,924,055	2,924,055	100.00	45 liter		
				KT. Suka Jaya Desa Suo-Suo Kec.Sumay		19,493,700	19,493,700	100.00	300 liter		
				KT. Bersatu Desa Pemayungan Kec.Sumay		3,898,740	3,898,740	100.00	60 liter		
				KTH.Bukit Keramu Alam Desa Pemayungan Kec.Sumay		11,696,220	11,696,220	100.00	180 liter		
				KT.Bina Karya Desa Semambu Kec.Sumay		3,898,740	3,898,740	100.00	60 liter		
				KT. Sumber Rezeki Desa Napal Putih Kec.Serai Serumpun		3,898,740	3,898,740	100.00	60 liter		
				KT.Puding emas Desa Pagar Puding Lamo Kec.Serai Serumpun		3,898,740	3,898,740	100.00	60 liter		
				KT.Mekar sari Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah		5,848,110	5,848,110	100.00	90 liter		
				KT.Sialang Pulai Desa Bedaro Rampak Kec.Tebo Tengah		4,873,425	4,873,425	100.00	75 liter		
				KT. Sepakat Desa Teluk Rendah Ilir Kec.Tebo Ilir		2,924,055	2,924,055	100.00	45 liter		
				KT.Maju Bersama Kel.Sungai Bengkal Kec.Tebo Ilir		3,898,740	3,898,740	100.00	60 liter		
				KT. Sumber Rezeki Desa Olak Kemang		9,746,850	9,746,850	100.00	150 liter		



				Kec.Ma.Tabir							
				KT.Mulya Jaya Desa Sungai Jernih Kec.Ma.Tabir		9,746,850	9,746,850	100.00	150 liter		
				KT.Mekar Maju Desa Sungai Jernih Kec.Ma.Tabir		9,746,850	9,746,850	100.00	150 liter		
				KT. Utama I Desa Rimbo Mulyo Kec.Rimbo Bujang		5,848,110	5,848,110	100.00	90 liter		
				KT. Sumber Mulya Desa Purwoharjo Kec.Rimbo Bujang		7,797,480	7,797,480	100.00	120 liter		
				KT.Kedung berkah Desa Tirta Kencana Kec.Rimbo Bujang		1,949,370	1,949,370	100.00	30 liter		
				KT.Mekar Sari Desa Sumber Sari Kec.Rimbo Ulu		5,848,110	5,848,110	100.00	90 liter		
				KT.Pandan harum Desa Suka Damai Kec.Rimbo Ulu		3,898,740	3,898,740	100.00	60 liter		
				KT. Nusa Jaya Desa Suka Damai Kec.Rimbo Ulu		3,898,740	3,898,740	100.00	60 liter		
				KT.Hamparan II Desa Suka Damai Kec.Rimbo Ulu		3,898,740	3,898,740	100.00	60 liter		
				KT. Taman Indah Desa Giriwinangun Kec.Rimbo Ilir		2,924,055	2,924,055	100.00	45 liter		
				GP.Margo Mulyo Desa Sidorejo Kec.Rimbo Ilir		2,924,055	2,924,055	100.00	45 liter		
				KT.Bungo Jaya Desa Aur Cino Kec.VII Koto		3,898,740	3,898,740	100.00	60 liter		
				KT. Maju Jaya Desa Cermin Alam Kec.VII Koto Ilir		1,949,370	1,949,370	100.00	30 liter		
				KT. Mekar Sari 2 Desa Sumber Sari Kec.Rimbo Ulu		1,949,370	1,949,370	100.00	30 liter		
				KT.Daya Guna Desa Giriwinangun Kec.Rimbo Ilir		2,924,055	2,924,055	100.00	45 liter		



				KT.Suka Makmur Desa Sari Mulya Kec.Rimbo Ilir		2,924,055	2,924,055	100.00	45 liter		
				Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan		566,000,000	566,000,000	100.00			
				Output : Melaksanakan Penyaluran Benih Padi Bersertifikat		440,000,000	440,000,000	100.00			
				Rincian Kegiatan : Bantuan Benih Padi Inbrida		440,000,000	440,000,000	100.00	4000 kg		
				KT.Lingkar Nago Desa Cermin Alam Kec.VII Koto Ilir		3,300,000	3,300,000	100.00	300 kg		
				KT.Payo Sialit Desa Cermin Alam Kec.VII Koto Ilir		2,750,000	2,750,000	100.00	250 kg		
				KT.Telago Putri Desa Cermin Alam Kec.VII Koto Ilir		4,950,000	4,950,000	100.00	450 kg		
				KT.Sungai Lais Desa Mangupeh Kec.Tengah Ilir		13,750,000	13,750,000	100.00	1250 kg		
				KT.Usaha Karya Desa Mangupeh Kec.Tengah Ilir		13,750,000	13,750,000	100.00	1250 kg		
				KT.Sinar Harapan Desa Semabu Kec. Tebo Tengah		5,500,000	5,500,000	100.00	500 kg		
				KT> Cahaya Sempurna Desa Semabu Kec. Tebo Tengah		13,750,000	13,750,000	100.00	1250 kg		
				KT. Sumber Rezeki Desa Semabu Kec.Tebo Tengah		13,750,000	13,750,000	100.00	1250 kg		
				KT. Sekintang Dayo Desa Semabu Kec.Tebo Tengah		13,750,000	13,750,000	100.00	1250 kg		
				KT. Karya Maju Desa Semabu Kec.Tebo Tengah		11,275,000	11,275,000	100.00	1025 kg		
				KT.Sungai Baung Desa Sungai Keruh Kec.Tebo Tengah		20,350,000	20,350,000	100.00	1850 kg		
				KT. Sepakat Mandiri Desa Mangun		12,650,000	12,650,000	100.00	1150 kg		



				Jayo Kec.Tebo Tengah							
				KT.Sumber Makmur Desa Mangun Jayo Kec.Tebo Tengah		3,850,000	3,850,000	100.00	350 kg		
				KT. Lopak Sialang I Desa Mangun Jayo Kec.Tebo Tengah		5,500,000	5,500,000	100.00	500 kg		
				GP.Tunas Muda Desa Melako Intan Kec. Tebo Ulu		45,375,000	45,375,000	100.00	4125 kg		
				GP.Lingkar Nago Desa Bungo Tanjung Kec.Tebo Ulu		15,400,000	15,400,000	100.00	1400 kg		
				GP.Tani Makmur Desa Pulau Jelmu Kec.Tebo Ulu		9,075,000	9,075,000	100.00	825 kg		
				KT. Telago Makmur Desa Tanjung Aur Kec. Tebo Ulu		5,500,000	5,500,000	100.00	500 kg		
				KT. Maju Bersama Desa Tanjung Aur Kec.Tebo Ulu		8,800,000	8,800,000	100.00	800 kg		
				KT.Renah Permai Desa Rantau Langkap Kec.Tebo Ulu		11,000,000	11,000,000	100.00	1000 kg		
				KT. Danau Panjang Desa Teluk Kasai Rambahan Kec.Tebo Ulu		3,025,000	3,025,000	100.00	275 kg		
				KT.Titian Makmur Desa Teluk Pandan Rambahan Kec.Tebo Ulu		3,850,000	3,850,000	100.00	350 kg		
				KT.Payo Lebar Desa Teluk Kasai Rambahan Kec.Tebo Ulu		14,300,000	14,300,000	100.00	1300 kg		
				KT.Payo Lebar Desa Kuamang Kec.VII Koto		9,625,000	9,625,000	100.00	875 kg		
				KT.Tanah Kuning Desa		10,175,000	10,175,000	100.00	925 kg		



				Kuamang Kec.VII Koto							
				KT.Setia Usaha Desa Embacang Gedang Kec.Ma.tabir		22,000,000	22,000,000	100.00	2000 kg		
				KT.Lestari Desa Teluk Singkawang Kec.Sumay		11,000,000	11,000,000	100.00	1000 kg		
				KT. Karya Makmur Desa Teluk Singkawang Kec.Sumay		8,250,000	8,250,000	100.00	750 kg		
				KT.Karya Maju Desa Teriti Kec.Sumay		4,125,000	4,125,000	100.00	375 kg		
				KT.Kemang Makmur Desa Lebak Bungur Kec.Sumay		2,750,000	2,750,000	100.00	250 kg		
				KT.Sido Makmur Desa Puntikalo Kec.Sumay		5,500,000	5,500,000	100.00	500 kg		
				KT.Jelmu Jaya desa Sungai Keruh Kec.Tebo Tengah		27,500,000	27,500,000	100.00	2500 kg		
				KT.Pematan g Jering Desa Teluk Pandak Kec.Tebo Tengah		13,750,000	13,750,000	100.00	1250 kg		
				KT.Tunas Muda Kel.Tebing Tinggi Kec.Tebo Tengah		11,000,000	11,000,000	100.00	1000 kg		
				KT.Giat Tani Desa Mangun Jayo Kec.Tebo Tengah		13,750,000	13,750,000	100.00	1250 kg		
				KT.Puding Mas Desa Pagar Puding Seberang Kec.Serai Serumpun		22,000,000	22,000,000	100.00	2000 kg		
				Gp. Puding Indah Desa Pagar Puding Kec.Tebo Ulu		23,375,000	23,375,000	100.00	2125 kg		
				Output : Menyalurkan Penyaluran Benih Jagung Bersertifikat		126,000,000	126,000,000	100.00			
				Rincian Kegiatan : Bantuan Benih Jagung Hibrida		126,000,000	126,000,000	100.00	3000 kg	100	
				KT.Rimbo Panjang Desa Teluk Kayu Putih Kec.VII Koto		22,050,000	22,050,000	100.00	525 kg	100	



				KT.Alam Subur Desa Kuamang Kec.VII Koto		25,200,000	25,200,000	100.00	600 kg	100		
				KT.Mekar Tani Desa Pelayungan Kec.Sumay		12,600,000	12,600,000	100.00	300 kg	100		
				KT.Sumber Rezeki Desa Napal Putih Kec.Serai Serumpun		12,600,000	12,600,000	100.00	300 kg	100		
				KT.Unggul Tani Desa Aburan Batang Tebo Kec.Tebo Tengah		6,300,000	6,300,000	100.00	150 kg	100		
				KT.Harapan Makmur Desa Rantau Api Kec.Tengah Ilir		6,300,000	6,300,000	100.00	150 kg	100		
				KT.Mekar Maju Desa Sungai Jernih Kec. Muara Tabir		12,600,000	12,600,000	100.00	300 kg	100		
				KT.Hamparan II Desa Suka Damai Kec,Rimbo Ulu		12,600,000	12,600,000	100.00	300 kg	100		
				KT.Mekar Sari Desa Sumber Sari Kec.Rimbo Ulu		6,300,000	6,300,000	100.00	150 kg	100		
				KT.Serayu Makmur Desa Wanareja Kec.Rimbo Ulu		6,300,000	6,300,000	100.00	150 kg	100		
				KT. Kedung Berkah Desa Tirta Kencana Kec.Rimbo Bujang		3,150,000	3,150,000	100.00	75 kg	100		
				Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia Tanaman Pangan		3,509,800,000	3,509,800,000	100.00				
				Output : Penyaluran Sarana Produksi Padi Rawa		899,800,000	899,800,000	100.00				
				Rincian Kegiatan :Budidaya Padi Rawa		899,800,000	899,800,000	100.00	440 ha			
				- Bantuan Benih					22000 kg	100		
				KT. Melati Desa Jati Belarik Kec.Sumay					2350 kg	100		
				KT.Tunas Harapan Desa Teriti Kec.Sumay					2000 kg	100		
				GP.Jambu Indah Desa Teluk Kembang Jambu					2500 kg	100		



				Kec.Tebo Ulu							
				KT.Mandiri Makmur Desa Teluk Kuali Kec.Tebo Ulu						1000 kg	100
				KT.Lereng Jaya Desa Teluk Kuali Kec.Tebo Ulu						1250 kg	100
				GP. Benteng Jaya Desa Lubuk Benteng Kec.Tebo Ulu						2000 kg	100
				KT. Harapan Jaya Desa Teluk Kasai Rambahan Kec.Tebo Ulu						3450 kg	100
				KT.Payo Kendudung Desa Teluk Kasai Rambahan Kec.Tebo Ulu						600 kg	100
				KT.Rimbo Pulai Kel.Sungai Bengkal Kec.Tebo Ulu						850 kg	100
				KT.Petenangan Kel.Sungai Bengkal Kec.Tebo Ulu						1000 kg	100
				KT.Pancuran Gading Makmur Desa Balai Rajo Kec.VII Koto Ilir						1500 kg	100
				KT.Selincih Jaya Desa Teriti Kec.Sumay						1500 kg	100
				KT.Usaha Makmur Desa Pintas Tuo Kec.Tebo Ilir						2000 kg	100
				- NPK						44000 kg	100
				KT. Melati Desa Jati Belarik Kec.Sumay						4700 kg	100
				KT.Tunas Harapan Desa Teriti Kec.Sumay						4000 kg	100
				GP.Jambu Indah Desa Teluk Kembang Jambu Kec.Tebo Ulu						5000 kg	100



				KT.Mandiri Makmur Desa Teluk Kuali Kec.Tebo Ulu					2000 kg	100	
				KT.Lereng Jaya Desa Teluk Kuali Kec.Tebo Ulu					2500 kg	100	
				GP. Benteng Jaya Desa Lubuk Benteng Kec.Tebo Ulu					4000 kg	100	
				KT. Harapan Jaya Desa Teluk Kasai Rambahan Kec.Tebo Ulu					6900 kg	100	
				KT.Payo Kendudung Desa Teluk Kasai Rambahan Kec.Tebo Ulu					1200 kg	100	
				KT.Rimbo Pulai Kel.Sungai Bengkai Kec.Tebo Ulu					1700 kg	100	
				KT.Petenang an Kel.Sungai Bengkai Kec.Tebo Ulu					2000 kg	100	
				KT.Pancuran Gading Makmur Desa Balai Rajo Kec.VII Koto Ilir					3000 kg	100	
				KT.Selincih Jaya Desa Teriti Kec.Sumay					3000 kg	100	
				KT.Usaha Makmur Desa Pintas Tuo Kec.Tebo Ilir					4000 kg	100	
				- Pupuk Hayati Cair					660 liter	100	
				KT. Melati Desa Jati Belarik Kec.Sumay					70,5 liter	100	
				KT.Tunas Harapan Desa Teriti Kec.Sumay					60 liter	100	
				GP.Jambu Indah Desa Teluk Kembang Jambu Kec.Tebo Ulu					75 liter	100	
				KT.Mandiri Makmur Desa Teluk Kuali Kec.Tebo Ulu					30 liter	100	



				KT.Lereng Jaya Desa Teluk Kual Kec.Tebo Ulu					37,5 liter	100	
				GP. Benteng Jaya Desa Lubuk Benteng Kec.Tebo Ulu					60 liter	100	
				KT. Harapan Jaya Desa Teluk Kasai Rambahan Kec.Tebo Ulu					103,5 liter	100	
				KT.Payo Kendudung Desa Teluk Kasai Rambahan Kec.Tebo Ulu					18 liter	100	
				KT.Rimbo Pulai Kel.Sungai Bengkai Kec.Tebo Ulu					25,5 liter	100	
				KT.Petenang an Kel.Sungai Bengkai Kec.Tebo Ulu					30 liter	100	
				KT.Pancuran Gading Makmur Desa Balai Rajo Kec.VII Koto Ilir					45 liter	100	
				KT.Selinc h Jaya Desa Teriti Kec.Sumay					45 liter	100	
				KT.Usaha Makmur Desa Pintas Tuo Kec.Tebo Ilir					60 liter	100	
				- Pestisida					55000 gram	100	
				KT. Melati Desa Jati Belarik Kec.Sumay					5875 gram	100	
				KT.Tunas Harapan Desa Teriti Kec.Sumay					5000 gram	100	
				GP.Jambu Indah Desa Teluk Kembang Jambu Kec.Tebo Ulu					6250 gram	100	
				KT.Mandiri Makmur Desa Teluk Kuali Kec.Tebo Ulu					2500 gram	100	
				KT.Lereng Jaya Desa Teluk Kual Kec.Tebo Ulu					3125 gram	100	



				GP. Benteng Jaya Desa Lubuk Benteng Kec.Tebo Ulu					5000 gram	100	
				KT. Harapan Jaya Desa Teluk Kasai Rambahan Kec.Tebo Ulu					8625 gram	100	
				KT.Payo Kendudung Desa Teluk Kasai Rambahan Kec.Tebo Ulu					1500 gram	100	
				KT.Rimbo Pulai Kel.Sungai Bengkal Kec.Tebo Ulu					2125 gram	100	
				KT.Petenangan Kel.Sungai Bengkal Kec.Tebo Ulu					2500 gram	100	
				KT.Pancuran Gading Makmur Desa Balai Rajo Kec.VII Koto Ilir					3750 gram	100	
				KT.Selincih Jaya Desa Teriti Kec.Sumay					3750 gram	100	
				KT.Usaha Makmur Desa Pintas Tuo Kec.Tebo Ilir					5000 gram	100	
				Output : Pengembangan Budidaya Padi Lahan Kering/Gogo			2,610,000,000	2,610,000,000	100.00		
				Rincian Kegiatan : Budidaya Tanaman Padi Lahan Kering/Gogo			2,610,000,000	2,610,000,000	100.00	1500 ha	
				- Bantuan Benih						60000 kg	
				KT.Harapan Mulya Desa Dusun Baru Kec.VII Koto						20000 kg	
				KT.Rimbo Panjang Desa Teluk Kayu Putih Kec.VII Koto						5000 kg	
				GP.Bukit Limau Maju Jaya Desa Balairajo Kec.VII Koto Ilir						18000 kg	
				KT.Sentano Maju Desa Balairajo Kec.VII Koto Ilir						20000 kg	



				KT.Bersatu Desa Pemayungan Kec.Sumay					20000 kg		
				KT.Mekar Tani Desa Pemayungan Kec.Sumay					5000 kg		
				KT.Bina Karya Desa Semambu Kec.Sumay					5000 kg		
				KT.Suka Jaya Desa Suo- Suo Kec.Sumay					10000 kg		
				KT. Sejahtera Desa Muara Sekalo Kec.Sumay					5000 kg		
				KT.Makmur Mandiri Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir					10000 kg		
				KT.Karya Tani Desa Muara Kilis Kec.Tengah Ilir					5000 kg		
				KT.Brau Jaya Desa Tambun Arang Kec.Muara Tabir					5000 kg		
				KT.Sekintang Dayo Desa Tanah Garo Kec.Muara Tabir					7000 kg		
				KT.Sumber Rezeki Desa Olak Kemang Kec.Muara Tabir					5000 kg		
				KT. Mulya Jaya Desa Sungai Jernih Kec.Muara Tabir					10000 kg		
			- Pupuk NPK						150000 kg		
				KT.Harapan Mulya Desa Dusun Baru Kec.VII Koto					20000 kg		
				KT.Rimbo Panjang Desa Teluk Kayu Putih Kec.VII Koto					5000 kg		
				GP.Bukit Limau Maju Jaya Desa Balairajo Kec.VII Koto Ilir					18000 kg		
				KT.Sentano Maju Desa Balairajo Kec.VII Koto Ilir					20000 kg		



				KT.Bersatu Desa Pemayungan Kec.Sumay					20000 kg		
				KT.Mekar Tani Desa Pemayungan Kec.Sumay					5000 kg		
				KT.Bina Karya Desa Semambu Kec.Sumay					5000 kg		
				KT.Suka Jaya Desa Suo- Suo Kec.Sumay					10000 kg		
				KT. Sejahtera Desa Muara Sekalo Kec.Sumay					5000 kg		
				KT.Makmur Mandiri Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir					10000 kg		
				KT.Karya Tani Desa Muara Kilis Kec.Tengah Ilir					5000 kg		
				KT.Brau Jaya Desa Tambun Arang Kec.Muara Tabir					5000 kg		
				KT.Sekintang Dayo Desa Tanah Garo Kec.Muara Tabir					7000 kg		
				KT.Sumber Rezeki Desa Olak Kemang Kec.Muara Tabir					5000 kg		
				KT. Mulya Jaya Desa Sungai Jernih Kec.Muara Tabir					10000 kg		
				- Pestisida					9000 scahet		
				KT.Harapan Mulya Desa Dusun Baru Kec.VII Koto					1200 scahet		
				KT.Rimbo Panjang Desa Teluk Kayu Putih Kec.VII Koto					300 scahet		
				GP.Bukit Limau Maju Jaya Desa Balairajo Kec.VII Koto Ilir					1080 scahet		
				KT.Sentano Maju Desa Balairajo Kec.VII Koto Ilir					1200 scahet		

				KT.Bersatu Desa Pemayungan Kec.Sumay					1200 scahet		
				KT.Mekar Tani Desa Pemayungan Kec.Sumay					300 scahet		
				KT.Bina Karya Desa Semambu Kec.Sumay					300 scahet		
				KT.Suka Jaya Desa Suo- Suo Kec.Sumay					600 scahet		
				KT. Sejahtera Desa Muara Sekalo Kec.Sumay					300 scahet		
				KT.Makmur Mandiri Desa Lubuk Mandarsah Kec.Tengah Ilir					600 scahet		
				KT.Karya Tani Desa Muara Kilis Kec.Tengah Ilir					300 scahet		
				KT.Brau Jaya Desa Tambun Arang Kec.Muara Tabir					300 scahet		
				KT.Sekintang Dayo Desa Tanah Garo Kec.Muara Tabir					420 scahet		
				KT.Sumber Rezeki Desa Olak Kemang Kec.Muara Tabir					300 scahet		
				KT. Mulya Jaya Desa Sungai Jernih Kec.Muara Tabir					600 scahet		

3.2 Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan pada Tahun 2023, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Ketersediaan benih dengan jadwal tanam petani terkadang tidak sesuai, dimana petani ingin semai padi tetapi benih masih dalam proses pengadaan, sedangkan jika benih dari luar harus nunggu hasil uji;
2. Harga pupuk pada e-katalog yang tersedia tidak sesuai/pas dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA;



3. Ketersediaan benih Padi dan benih Jagung pada DIPA kg per hektarnya melebihi kebutuhan

3.3 Saran dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Menggiatkan petani penangkar benih agar dapat membuat dan menyediakan stok benih sesuai dengan jadwal tanam
2. Menyampaikan kepada pusat tentang standar harga barang agar harga satuan barang dalam DIPA dapat masuk dalam e-katalog sehingga penggunaan anggaran dapat lebih diefektifkan.
3. Menyampaikan kepada pusat anggaran dalam menganggarkan benih
4. disesuaikan dengan kebutuhan benih didaerah sehingga penggunaan anggaran dapat lebih diefektifkan.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat:

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tebo yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Kebudayaan serta pengelolaan sarana prasarana pendidikan, namun demikian dalam pelaksanaannya baru Pendidikan Dasar yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- Pendidikan anak usia dini (PAUD);
- Pendidikan Dasar (SD);
- Pendidikan Menengah Pertama (SMP); dan
- Pendidikan kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Tahun Pencapaian
	Indikator	Target	Satuan	
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	12.400	Orang	2023
2.	Pendidikan Dasar	41.070	Orang	2023
3.	Pendidikan Menengah Pertama	20.288	Orang	2023
4.	Pendidikan Kesetaraan	75.292	Orang	2023

4.1.3 Realisasi

No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Pendidikan Anak Usia Dini				
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	12.400	9.557	Orang	77.07
2.	Pendidikan Dasar				
	Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD	41.070	38.576	Orang	93.93
3.	Pendidikan Menengah Pertama				
	Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SMP	20.288	16.900	Orang	83.30
4.	Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar dan Menengah	75.292	3404	Orang	4.52



4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Tebo pada tahun 2023 sebesar **Rp.308.547.731.193,-** (*Tiga ratus delapan milyar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*) dari total belanja Langsung APBD sebesar **Rp.236.869.526.844,-** (*Dua ratus tiga puluh enam milyar delapan ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*) jika dikalkulasikan ada persentase sebesar **76,77%**, anggaran yang di alokasi kan untuk penerapan dan pencapaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tebo. Sedang total keseluruhan belanja langsung dan tidak langsung dengan rincian sebagai berikut:

APBD sebesar Rp. **308.547.731.193,-**

4.1.5 Dukungan Personil

Untuk pencapaian target SPM dinas Pendidikan dan kebudayaan memiliki dukungan personel terdiri dari tenaga fungsional guru **87 Guru PNS, PPK, dan Honorer di PAUD, 1.068 Guru PNS, 173 PPK, dan 1.501 Guru Honorer di Sekolah Dasar, 485 Guru PNS, 90 PPK dan 529 Guru Honorer di Sekolah Menengah Pertama**, Sedangkan satuan Pendidikan terdiri dari Paud berjumlah **288 unit negeri dan swasta**, Sekolah Dasar terdiri dari **251 unit negeri dan swasta** sedangkan smp terdiri dari **72 sekolah negeri dan swasta** dan PKBM terdiri dari **7 lembaga PKBM**.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tebo secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternative pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan

Acuan Data dari rapor mutu Pendidikan dan angka APK, APM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkendala terkait dengan rilis resmi dari pihak yang memiliki otoritas mengeluarkan data tersebut setelah tahun anggaran berakhir ini yang menjadi kendala dalam evaluasi dan laporan penerapan SPM di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten. Dan



selanjutnya permasalahan belum diterapkannya SPM yang berkaitan dengan biaya pribadi peserta didik bagi masyarakat yang tidak mampu.

b. Solusi

Solusi yang diharapkan pihak satuan Pendidikan, Pengawas, Penilik, LPMP, dan BPS agar dapat mempercepat mengeluarkan data rapormutu Pendidikan ataupun angka partisipasi sekolah, diharapkan bulan Februari tahun berikutnya setelah tahun anggaran berakhir dan terhadap permasalahan SPM yang berkaitan dengan biaya pribadi peserta didik yang tidak mampu akan dibuat program dan kegiatan di dalam DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja Pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) tiapTahun.

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Tahun Pencapaian
	Indikator	Target	Satuan	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.965	Orang	2023
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.649	Orang	2023
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5.921	Orang	2023
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	24.642	Orang	2023
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	55.075	Orang	2023



6.	Pelayanan Pada Usia Produktif	232.121	Orang	2023
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	36.354	Orang	2023
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi	80.274	Orang	2023
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)	2.416	Orang	2023
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	649	Orang	2023
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.978	Orang	2023
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya	6.197	Orang	2023

4.2.3 Realisasi

No	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	6.965	5.939	Orang	85,27
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	6.649	5.499	Orang	82,70
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				
	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan layanan kesehatan	5.921	5.462	Orang	92,25
4.	Pelayanan Kesehatan Balita				
	Jumlah balita usia 0-59 bulan mendapatkan layanan kesehatan	24.642	22.633	Orang	91,85
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
	Jumlah anak usia anak pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	55.075	55.075	Orang	100,00
6.	Pelayanan Pada Usia Produktif				
	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan layanan kesehatan	232.121	209.496	Orang	90,25
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				
	Jumlah warga negara usia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan skrining kesehatan	36.354	36.266	Orang	99,76
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi				
	Jumlah penderita hipertensi usia > 15 Tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan	80.274	66.223	Orang	82,50
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM)				
	Jumlah penderita diabetes militus usia > 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan	3.434	3.434	Orang	100,00
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				
	Jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	649	644	Orang	99,23
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				
	Jumlah oarng terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan sesuai dengan standar	2.828	2.828	Orang	100,00
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia				
	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6.197	5.062	Orang	81,68



4.2.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2023 Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saipuddin Kabupaten Tebo dialokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Tebo sebesar **Rp. 125.495.324.165 (Seratus Dua Puluh Lima milyar Empat ratus Sembilan puluh Lima juta Tiga Ratus Dua puluh Empat ribu Seratus Enam Puluh Lima rupiah)** yang terdiri dari program rutin, teknis, DAK dan BLUD.

4.2.5 Dukungan Personil

Personil yang melaksanakan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Ket
1	2	3	4
1.	Kondisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan: - SD - SMP - SMA Sederajat	- - 1	
	- Sarjana Muda (D.I-D.III)	17	
	- S-1 dan D-IV	29	
	- S2	8	
	- S3	-	
2.	Kondisi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan: - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV	- 5 42 9	
3.	Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan: - Eselon II - Eselon III - Eselon IV - Eselon V - Jabatan Fungsional - Staf (termasuk CPNS)	1 6 2 - 15 32	

No	Nama Puskesmas	Dokter umum	Dokter Gigi	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Gizi	Jumlah
1	Sungai Bengkal	2	1	3	23	25	0	0	51
2	Teluk Rendah	1	1	2	10	22	1	0	35
3	Pintas Tuo	1	1	2	15	21	1	1	40
4	Bangun Seranten	2	1	3	10	10	1	0	24
5	Muara Tebo	3	1	4	18	59	3	1	85
6	Teluk Singkawang	3	0	3	18	41	2	0	64
7	Suo - Suo	1	1	2	3	9	1	1	16
8	Mengupeh	2	1	3	10	20	2	2	37
9	Lubuk Mandarsah	1	1	2	8	13	1	2	26
10	Rimbo Bujang II	4	1	5	34	40	3	3	85
11	Tegal Arum	1	1	2	10	15	3	1	31
12	Rimbo Bujang IX	4	1	5	26	30	3	0	64
13	Sumber Sari	3	1	4	9	19	1	0	33
14	Alai Ilir	2	1	3	12	28	2	2	47
15	Pulau Temiang	2	1	3	34	38	2	2	79



16	Teluk Kembang Jambu	2	1	3	15	20	2	1	41
17	Sungai Abang	1	1	2	21	33	1	1	58
18	Teluk Lancang	2	1	3	7	14	2	2	28
19	SP II Sekutur Jaya	1	1	2	9	19	2	1	33
20	Tuo Pasir Mayang	1	1	2	21	39	2	1	65
Jumlah		39	19	58	313	515	35	21	942

Pesonil yang melaksanakan Urusan Kesehatan pada RSUD STS Kabupaten Tebo sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Ket
1	2	3	4
1.	Kondisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan: - SD - SMP - SMA Sederajat - Sarjana Muda (D.I-D.III) - S-1 dan D-IV - S2 - S3	- - 15 121 51 17 -	
2.	Kondisi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan: - Golongan I - Golongan II - Golongan III - Golongan IV	1 44 151 8	
3.	Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan: - Eselon II - Eselon III - Eselon IV - Eselon V - Jabatan Fungsional - Staf (termasuk CPNS)	- 4 7 - 193 -	
Jumlah		204	

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Masih kurangnya kesadaran pada ibu hamil untuk melakukan kunjungan ulangan K4.
- Masih adanya daerah yang memiliki akses jalan yang rusak menuju fasilitas Kesehatan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melahirkan di Fasyankes.
- Pada masa pandemic membatasi kunjungan kepada kelompok Resti.
- Dikarenakan Masa Pandemi mengakibatkan Kunjungan Balita ke Posyandu jadi Berkurang.
- Masih dalam situasi Pandemi sehingga kegiatan belajar dan mengajar tidak seperti biasanya sehingga Pelayanan kesehatan pada Pendidikan Dasar tidak mencapai 100%.



- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan.
- Masa Pandemi mengakibatkan Kunjungan lansia ke Posyandu jadi Berkurang.
- Belum semua penderita dilayani di masa pandemi dan penderita akan mengunjungi faskes bila ada gejala yang dirasakan.
- Belum semua penderita dilayani di masa pandemi dan penderita akan mengunjungi faskes dan masih kurangnya pengadaan stik untuk pemeriksaan gula darah.
- Belum semua sasaran dapat di temukan dan masih terbatasnya jumlah tenaga Laboratorium yang ada di Puskesmas.
- Belum semua kelompok resiko dilakukan skrining HIV di karenakan sulitnya menemukan sasaran orang yang beresiko HIV.

b. Solusi

- Mengajukan untuk melengkapi Sarana dan Prasarana, melakukan Penyuluhan kepada ibu akan pentingnya untuk memeriksakan Kehamilannya.
- Mengajukan untuk melengkapi Sarana dan Prasarana, melakukan Penyuluhan kepada ibu akan pentingnya melahirkan di Fasyankes dan membentuk kader siaga untuk membantu ibu hamil bersalin ke Fasyankes.
- Melakukan kunjungan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
- Petugas akan melakukan kunjungan rumah untuk mengatasi Masalah tersebut dengan tetap menerapkan Protokol kesehatan.
- Melakukan Pemantauan kesehatan secara Online.
- Seksi P2PTM akan membuat kesepakatan dengan pemegang program yang ada di Puskesmas untuk melaksanakan dan lebih aktif untuk melakukan kegiatan kepada sasaran Usia Produktif.
- Petugas akan melakukan kunjungan rumah untuk mengatasi Masalah tersebut dengan tetap menerapkan Protokol kesehatan.
- Petugas akan melakukan kegiatan posbindu secara rutin sehingga semua penderita dapat terlayani sesuai dengan standar.
- Melakukan bimbingan Teknis kepenanggungjawab program Puskesmas sehingga sasaran tercapai dan mengajukan pengadaan untuk alkes pemeriksaan Gula darah.
- Meningkatkan bimbingan teknis pelaporan TB kepada Petugas TB Puskesmas dan Rumah Sakit dan Mengadakan pelatihan bagi petugas pengelola Program Puskesmas dan RumahSakit.
- Melakukan penyuluhan tentang penyakit HIV terutama Penularannya, akan melakukan skinning terpadu pada semua kelompok beresiko terinfeksi HIV dan akan melakukan pendekatan kepada Tokoh Masyarakat Agar Penderita tidak di diskriminasikan.



4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik

4.3.2 Target Pencapaian SPM Daerah

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) tiap Tahun.

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Tahun Pencapaian
	Indikator	Target	Satuan	
1.1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100,00	%	2023
2.2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	100,00	%	2023

4.3.3 Realisasi

Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Satuan
	Indikator	Target	Realisasi	
1.1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100.00	68.60	%
2.2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	100.00	87.97	%

4.3.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2023 Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tebo dialokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Tebo sebesar **Rp.40.490.286.773 (Empat puluh milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga Rupiah)** yang bersumber dari:

- APBD;
- APBN; dan
- Sumber dana lain yang sah.

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

- Jumlah Pegawai Keseluruhan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR TA 2021



No	Bidang	Eselon			StafPNS	Honor	TKS	Jumlah
		II	III	IV				
1	Cipta Karya	-	1	-	7	5	-	13

b. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Teknik	Non Teknik	Jumlah	Ket.
1	S2	2	-	2	
2	S1	2	2	4	
3	D.3.	3	-	3	
4	SLTA	-	4	4	
5	SLTP	-	-	-	
6	SD	-	-	-	
J U M L A H		7	6	13	

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh Secara umum permasalahan yang dihadapi Bidang Cipta Karya terkait implementasi kebijakan standar pelayanan minimal antara lain:

1) *Permasalahan Internal*

- a) Sumber daya personil belum memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas untuk focus penanganan pelayanan air minum dan sanitasi/limbah domestik
- b) Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatasnya alokasi anggaran/APBD

2) *Permasalahan Eksternal*

a) Belum sinerginya upaya implementasi SPM

Salah satu permasalahan pokok yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan sektor air minum dan sanitasi/limbah domestik di Kabupaten Tebo adalah belum adanya sinergi dari seluruh komponen masyarakat dalam penanganan penyediaan air minum dan sanitasi. Seluruh komponen pemangku kepentingan baik ditingkat eksekutif dan legislative disemua level harus memiliki pemahaman yang sama serta berkomitmen penuh dalam upaya penanganan. Penuntasan SPM dua sub sector tersebut sangat tidak memadai apabila hanya bertumpu pada Bidang Cipta Karya saja.

b) Akurasi ketersediaan data

Sebagai salah satu komponen paling menentukan maka data penyediaan air minum dan air limbah domestik menjadi faktor penentu peningkatan capaian pelayanan. Kebijakan yang tepat hanya dapat dilakukan apabila didasari data yang valid dan *up to date*. Personil Bidang Cipta Karya yang hanya 13 orang



sangat tidak memadai untuk penyediaan data sebagaimana diharapkan. Keterlibatan berbagai komponen masyarakat khususnya penyelenggara Pemerintahan sampai level terendah ditingkat desa/kelurahan sangat menentukan akurasi penyiapan data. Komitmen bersama menjadi kata kunci dalam upaya tersebut.

c) Alokasi Pendanaan belum memadai

Meskipun bukan satu-satunya faktor penting, aspek pendanaan memegang peran utama dalam pelaksanaan penuntasan pelayanan sector air minum dan air limbah. Alokasi pendanaan yang bahkan setelah ada tambahan pendanaan yang ditopang melalui Dana Alokasi Khusus(DAK), Hibah dan HID belum mencukupi dari kebutuhan pendanaan yang diproyeksikan diawal penyusunan Renstra turut berakibat pada belum terpenuhinya target pelayanan SPM Bidang Air Minum dan Air Limbah. Belum lagi ditambah kondisi bahwa asumsi-asumsi serta beberapa parameter yang ditetapkan pada saat penyusunan Renstra tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya serta ketersediaan rincian data yang tidak memadai.

b. Solusi

Dari berbagai permasalahan yang ada, komitmen bersama untuk bersama-sama melakukan langkah besar untuk mengupayakan pemenuhan target pelayanan air minum dan air limbah menjadi kunci pokok pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana ketentuan yang ada.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.



4.4.2 Target Pencapaian SPM Daerah

Adapun Indikator Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			TahunPencapaian
	Indikator	Target	Satuan	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	%	2023
2.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100	%	2023

4.4.3 Realisasi

Realisasi SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah KabupatenTebotahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Target Nasional	Capaian Daerahan Th. 20202	Ket
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			
	Jumlahwarga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	80%	--	--
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik			
	Jumlah warga negara yang terken arelokasi akibat program Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	80%	--	--

4.4.4 Alokasi Anggaran

Jumlah total keseluruhan belanja Langsung dan Tidak Lansung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo pada Tahun 2023 sebesar **Rp.45.521.513.833.00,- (Empat puluh lima milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga Rupiah)** yang bersumber dari APBD.

4.4.5 Dukungan Personil

Adapun personil dan pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo tahun 2023 adalah sebanyak 14 orang, sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP.	JABATAN
1.	HENDRY NORA, S.T. NIP. 19720307 200012 1 001	Kepala Dinas
2.	MAKARIMUL ACHLAK, SE.MM NIP. 19720618 199403 1 006	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.	AHMAD IKHSAN, SE NIP. 19810421 201101 1 003	Teknik Tata Bangunan Ahli Muda



4.4.6

4.	SOFIAN HADI, SE NIP. 19781103 200012 1 002	Teknik Tata Bangunan Ahli Muda
5.	SUWARDYOYO, S.T. NIP. 19851025 200902 1 004	Teknik Tata Bangunan Ahli Muda
6.	KHOLIDI, SY, A.Md NIP. 19850713 201101 1 004	Staf Pelaksana
7.	BUSTAN RINDA, S.Kom NIP. 1919870314 201903 1 002	Staf Pelaksana
8.	MASHURI NIP. 19780603 200212 1 006	Staf Pelaksana
9.	HELI APROZI NIP. 19800327 200604 1 005	Staf Pelaksana
10.	KHOIRUL IHSAN NIP. 19760225 200212 1 005	Staf Pelaksana
11.	M. KOMI NIP. 1820224 200101 1 007	Staf Pelaksana
12.	EDI SUHENDRA NIP. 19860115 201001 1 013	Staf Pelaksana
13.	YONA FITRIA, A.Md NIP. 19860608 202012 2 007	Staf Pelaksana
14.	APRIANTO NIP. 19820411 201001 1 017	Staf Pelaksana

masalah dan Solusi

a. Permasalahan

Dalam melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo tahun 2023, ada beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala, diantaranya sebagai berikut :

- Banyaknya masyarakat yang tinggal dipinggiran sungai khususnya sungai batanghari.
- Rendahnya alokasi anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo.

b. Solusi

Adapun solusi yang ditempuh guna menghadapi permasalahan tersebut diatas diantaranya :

- Segera melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat yang tinggal disempadan sungai.
- Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) agar menaikkan alokasi anggaran untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo dimasa yang akan datang.

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

- a. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja adalah:



- Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
- b. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah:
 - Pelayanan informasi Rawan Bencana
 - Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana
 - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- c. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah:
 - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian SPM Daerah

- a. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Tahun Pencapaian
	Indikator	Target	Satuan	
1.	Terlaksananya Pengamanan dalam Kegiatan Masyarakat	100	%	2023
2.	Meningkatkan Trantibum dan Tranmas	98	%	2023
3.	Terlaksananya Sosialisasi Bagi Linmas	100	%	2023

- b. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah:

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Tahun Pencapaian
	Indikator	Target	Satuan	
1.	Pelayanan informasi Rawan Bencana	100	Persen	2023
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan	100	Persen	2023
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Persen	2023

- c. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah:

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Tahun Pencapaian
	Indikator	Target	Satuan	
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	%	2023

4.5.3 Realisasi

- a. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Tahun Pencapaian
	Indikator	Target	Realisasi	
1.	Terlaksananya Pengamanan dalam Kegiatan Masyarakat	100	100	2023
2.	Meningkatkan Trantibum dan Tranmas	98	98	2023
3.	Terlaksananya Sosialisasi Bagi Linmas	100	100	2023

- b. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah:

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Tahun Pencapaian
	Indikator	Target	Realisasi	
1.	Pelayanan informasi Rawan Bencana			
	Persentase masyarakat yang mengetahui informasi rawan bencana	100%	98%	2023
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan			
	Persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100%	95%	2023
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
	Persentase masyarakat yang terselamatkan	100%	84%	2023

- c. Jenis Pelayanan Dasar untuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah:

No	Jenis Standar Pelayanan Minimal			Tahun Pencapaian
	Indikator	Target	Realisasi	
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
	Tingkat waktut anggap (respon time rate)	100%	86.67%	2023

4.5.4 Alokasi Anggaran

- a. Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Jumlah total keseluruhan belanja Langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo pada Tahun 2023 sebesar **Rp.849.840.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)** yang bersumber dari APBD.
- b. Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah total keseluruhan belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo pada Tahun 2023 sebesar **Rp.2.298.533.509,- (Dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sembilan Rupiah)** yang bersumber dari APBD.
- c. Organisasi Perangkat Dearah Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Jumlah total keseluruhan belanja Langsung dan Tidak Lansung pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tebo pada Tahun 2023 sebesar **Rp.2,402,341,400,- (Dua milyar empat ratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah)** yang bersumber dari APBD.



4.5.5 Dukungan Personil

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Sampai dengan tahun 2023 personil aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo berjumlah **105 orang** yang terdiri dari **28 orang PNS** dan **77 orang pegawai honorer/tidak tetap**. bila dilihat dari golongan ruang dan kepangkatan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dapat disampaikan sebagai berikut:

No	Golongan	Eselon	Jumlah
1	IV.c	II.b	1
2	IV.a	III.b	2
3	III.d	IV.a	5
4	III.c	IV.a	2
5	III.b	-	2
6	III.a	-	5
7	II.d	-	10
8	II.b	-	1
9	Tenaga Kontrak	-	77
Total Keseluruhan			105

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sampai dengan tahun 2023 personil aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo berjumlah **60 orang** yang terdiri dari **17 orang PNS** dan **39 orang pegawai honorer/tidak tetap**.

No	Jabatan	Kalsifikasi Pendidikan					Jumlah
		S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	
1	Struktural	2	8		7		17
2.	Honorer/PTT		5		34		39

c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sampai dengan tahun 2023 personil aparatur pemadam kebakaran berjumlah **143 orang** yang terdiri dari **13 orang PNS** dan **130 orang pegawai honorer/tidak tetap**, bila dilihat dari golongan ruang dan kepangkatan aparatur pemadam kebakaran dapat disampaikan sebagai berikut:

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) OPD Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Beberapa permasalahan yang umum dihadapi OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:



- Lemahnya koordinasi dan sinergi antar lembaga/instansi terkait mengenai penanggulangan bencana.
- Kendala Pemadaman KARHUTLA, karena lokasi sulit dijangkau
- Minimnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar
- Rendahnya kepedulian masyarakat secara sukarela terhadap bahaya KARHUTLA
- Lambatnya upaya Mitigasi bencana
- Kurangnya tenaga ahli dalam pengoperasian sarana dan prasarana pengendalian KARHUTLA

3) OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Beberapa permasalahan yang umum dihadapi unit kerja pemadam kebakaran Kabupaten Tebo pada saat kinerja baik oleh sebagian masyarakat memang cukup klasik, diantara lain:

- Kesulitan mencapai lokasi kebakaran yang disebabkan jauhnya jarak tempuh dan kondisi wilayah yang rural.
- Volume kendaraan / lalu lintas makin padat dan perilaku pengguna jalan
- Kondisi lingkungan yang tidak menunjang operasional pemadam kebakaran, seperti minimnya reservoir, penataan bangunan dan budaya masyarakat.
- Kurangnya peralatan pemadam kebakaran.

b. Solusi

- 1) OPD Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam mengatasi permasalahan yang ada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya meningkatkan pelayanan dengan berbagai cara diantaranya:

- Menjalin koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga/instansi mengenai penanggulangan bencana.
- Mengadakan kerjasama dengan masyarakat disekitar pelaku usaha.
- Memberikan sosialisasi tentang menangani KARHUTLA.
- Membentuk dan memberikan binaan kepada masyarakat peduli api.
- Meningkatkan sosialisasi mitigasi dan upaya penanggulangan bencana.
- Memberikan pelatihan pengoperasian sarana dan prasarana pengendalian KARHUTLA.

3) OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Dalam mengatasi permasalahan yang ada pada UPT pemadam kebakaran telah berupaya meningkatkan pelayanan dengan berbagai cara diantaranya:

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan kebakaran.
- Menambah armada pemadam kebakaran volume 5000 liter sesuai yang dipersyaratkan dalam standar SPM.
- Rekrutmen dan pendidikan pelatihan petugas pemadam kebakaran.
- Menekankan strategi pencegahan melalui himbauan poster /spanduk, leflet, koran, radio tv lokal, melakukan penyuluhan, pembentukan satlakar dan inspeksi bangunan.

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang social adalah sebagai berikut :

- Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti;
- Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- Rehabiliasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- Perlindungan dan Jaminan social pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana.

4.6.2 Target Pencapaian SPM Daerah

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) tiapTahun.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100 %	Tahun 2023
2.	Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100 %	Tahun 2023
3.	Rehabilitasi social dasar	Jumlah warga negara lanjut usia	100 %	Tahun



	lanjut usia terlantar di luar panti	yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti		2023
4.	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social di luar panti	100 %	Tahun 2023
5.	Perlindungan dan Jaminan social pada saattanggap dan pascabencana bagi korban bencana	Jumlahwarga Negara korban bencanakab/kota yang memperolehperlindungan dan jaminansosial	100 %	Tahun 2023

4.6.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Tebo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (Jiwa)	Realisasi Capaian (Jiwa)	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	63	127	Tahun 2023
2.	Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	50	80	Tahun 2023
3.	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	50	100	Tahun 2023
4.	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social di luar panti	-	-	Tahun 2023
5.	Perlindungan dan Jaminan social pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	200	140	Tahun 2023

4.6.4 Alokasi Anggaran

Jumlah keseluruhan anggaran yang dipergunakan dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tebo pada tahun 2023 sebesar **Rp. 7.151.688.731,-** dari Anggaran sebesar **Rp. 7.365.327.399,-** atau sebesar 97,09 % yang bersumber dari APBD Kabupaten Tebo. Anggaran yang dialokasikan untuk urusan sosial sebesar 27,27 % atau sebesar Rp. 2.008.892.644,- dengan realisasi 95,52 % atau sebesar Rp. 1.918.912.320,-. Anggarn untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



sebesar Rp. 643.033.786,- dan terealisasi Rp. 626.819.481,- atau sebesar 97.48%.

4.6.5 Dukungan Personil

- a. Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang Sosial sejumlah **162 orang** dengan Mitra Kerjabaikdari Kementerian Sosial maupun dari masyarakat seperti Pendamping PKH sebanyak **43 Orang**, Pendamping BPNT **1 Orang**, Sakti Peksos **1 orang**, **12 TKSK**, **58 TAGANA**, **39 PSM** , **Pendampingan Komunitas Adat Terpencil 8**, Dalam pelayanan pengaduan/laporan masyarakat Kabupaten Tebo yang menangani Orang Terlantar, Orang dengan Tempat Tinggal Tidak Tetap, Permintaan pengusulan Basis Data Terpadu, Pengaduan Bantuan Sosial dan layanan kesejahteraan sosial lainnya.
- b. Pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak **42 Orang**.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan
 - Pola Hidup Suku Anak Dalam (SAD) yang tidak menetap/Nomaden, sehingga mempengaruhi pemberdayaan SAD di Kabupaten Tebo.
 - Akurasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kurang valid, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan.
 - Belum adanya Panti Resmi Pemerintah Kabupaten Tebo, sehingga kegiatan rehabilitasi sosial hanya bisa di luar panti.
 - Rendahnya alokasi anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo.
 - Belum semua PMKS/ PPKS dapat menerima bantuan karena masih terbenturnya dengan aturan yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan penerima bantuan harus memiliki badan hukum seperti data Disdaldukcapil Kabupaten Tebo, maupun panti sosial lainnya serta penerima bantuan harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG Kemensos RI.
- b. Solusi



- Menyediakan tempat dan lokasi khusus pemukiman Suku Anak Dalam, sehingga SAD dapat menetap di suatu tempat.
- Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan bagi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), serta meningkatkan kesejahteraan TKSK di Kab. Tebo.
- Membangun Panti Resmi Pemerintah Kabupaten Tebo.
- Mengajak Masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) agar menabuh alokasi anggaran untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dimasa yang akan datang.
- Menunggu aturan yang jelas sehingga dapat mengakomodir penerima bantuan .
- Calon penerima bantuan yang belum masuk Basis Data Terpadu /Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di usulkan melalui mekanisme pemutahiran /Pendataan kembali /Verifikasi dan validasi DTKS ulang, yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.
- Melakukan pendataan dan Sosialisasi kepada lembaga Kesejahteraan Sosial /Anak untuk mendaftarkan dan mengajukan ijin.
- Dengan permasalahan tersebut, maka perlu diadakannya pertemuan atau koordiansi kembali membahas terkait dengan target maupun definisi operasional SPM. Dalam menyusun pembaruan Standar Pelayanan Minimal itu perlu melibatkan Instansi yang berkompeten di dalamnya agar target capaiannya relevan dengan realitanya.

4.7 Program dan Kegiatan

4.7.1 Bidang Urusan Pendidikan

Program kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	
	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Persen (%)
URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	308.547.731.193	236.869.526.844	76,77%



URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	308.547.731.193	236.869.526.844	76,77%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	194.036.378.855	181.973.972.449	93,78%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	895.000.000	892.495.748	99,72%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000	199.750.000	99,88%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35.000.000	34.886.000	99,67%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.000.000	34.719.600	99,20%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	35.000.000	33.991.448	97,12%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	35.000.000	34.806.000	99,45%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000.000	499.983.700	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000	54.359.000	98,83%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	189.118.987.568	177.160.930.954	93,68%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	189.068.987.568	177.110.930.954	93,68%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50.000.000	50.000.000	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	100.000.000	100,00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000	100.000.000	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.000.000	89.761.000	99,73%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	90.000.000	89.761.000	99,73%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.198.599.777	1.197.859.941	99,94%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	93.600.000	93.600.000	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.999.777	144.274.650	99,50%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	145.000.000	145.000.000	100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000	150.000.000	100,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	80.000.000	80.000.000	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	135.000.000	135.000.000	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000	449.985.291	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.068.791.510	1.997.029.788	96,53%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.103.791.955	1.040.742.200	94,29%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.659.555	119.443.588	95,82%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	840.340.000	836.844.000	99,58%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	565.000.000	535.895.018	94,85%



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	365.000.000	335.895.018	92,03%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	200.000.000	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	110.360.852.338	50.910.220.021	46,13%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	76.305.848.788	25.134.254.030	32,94%
Penambahan Ruang Kelas Baru	6.257.970.000	6.134.208.388	98,02%
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3.000.000	3.000.000	100,00%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	14.794.769.959	14.405.999.867	97,37%
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	100.574.559	100.420.559	99,85%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.871.937.500	1.823.259.876	97,40%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	499.999.870	499.134.000	99,83%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	175.000.000	173.562.500	99,18%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	340.000.000	339.920.000	99,98%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	895.000.000	881.155.240	98,45%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	86.712.100	86.712.100	100,00%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	50.545.740.000	-	0,00%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	158.800.000	158.800.000	100,00%
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	190.077.500	160.051.500	84,20%
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	352.979.400	350.947.800	99,42%
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	33.287.900	17.082.200	51,32%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17.258.467.650	16.696.934.080	96,75%
Penambahan Ruang Kelas Baru	1.040.270.000	1.039.408.545	99,92%
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	14.125.100	13.895.100	98,37%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	14.009.510.000	13.593.254.874	97,03%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	649.985.100	581.457.361	89,46%
Pengadaan Mebel Sekolah	520.800	520.800	100,00%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	335.468.750	334.753.500	99,79%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	75.000.000	62.639.700	83,52%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.000.000	42.611.200	85,22%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	250.000.000	249.553.500	99,82%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	300.000.000	281.073.600	93,69%



Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	59.530.200	59.530.200	100,00%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	193.756.000	193.456.000	99,85%
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	156.544.000	126.531.000	80,83%
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	123.757.700	118.248.700	95,55%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13.232.600.000	7.966.198.675	60,20%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.676.276.100	3.634.213.775	98,86%
Pengadaan Mebel PAUD	470.000.000	469.988.800	100,00%
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	370.000.000	360.873.400	97,53%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	450.000.000	439.187.200	97,60%
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	187.693.000	187.069.000	99,67%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	150.000.000	76.337.994	50,89%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.152.350.000	2.095.812.360	97,37%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	215.000.000	180.642.600	84,02%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	591.480.900	522.073.546	88,27%
Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.969.800.000	-	0,00%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.563.935.900	1.112.833.236	31,22%
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	80.000.000	74.961.590	93,70%
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	25.232.200	25.208.000	99,90%
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	49.790.850	99,58%
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	220.498.200	220.498.200	100,00%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	446.635.500	434.716.866	97,33%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	94.784.000	86.684.000	91,45%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000	63.730.550	63,73%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	209.086.000	157.243.180	75,21%
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.337.700.000	-	0,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	275.000.000	251.980.300	91,63%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	150.000.000	148.896.000	99,26%
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	150.000.000	148.896.000	99,26%



Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	125.000.000	103.084.300	82,47%
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	75.000.000	63.421.100	84,56%
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	50.000.000	39.663.200	79,33%
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.815.500.000	2.691.826.000	95,61%
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.815.500.000	2.691.826.000	95,61%
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.815.500.000	2.691.826.000	95,61%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.060.000.000	699.400.074	65,98%
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	710.000.000	699.400.074	98,51%
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	460.000.000	449.568.474	97,73%
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	410.000.000	399.598.724	97,46%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50.000.000	49.969.750	99,94%
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100,00%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	50.000.000	50.000.000	100,00%
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	199.831.600	99,92%
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	50.000.000	50.000.000	100,00%
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	150.000.000	149.831.600	99,89%
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	255.000.000	249.408.000	97,81%
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	255.000.000	249.408.000	97,81%
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	205.000.000	205.000.000	100,00%
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	50.000.000	44.408.000	88,82%
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	25.000.000	23.151.200	92,60%
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	23.151.200	92,60%
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	25.000.000	23.151.200	92,60%
PROGRAM PELESTARIAN DAN	50.000.000	49.683.600	99,37%



PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	50.000.000	49.683.600	99,37%
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	25.000.000	24.879.200	99,52%
Penetapan Cagar Budaya	25.000.000	24.804.400	99,22%
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	20.000.000	19.885.200	99,43%
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	20.000.000	19.885.200	99,43%
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	20.000.000	19.885.200	99,43%
J U M L A H	308.547.731.193	236.869.526.844	76,77%

4.7.2 Bidang Urusan Kesehatan

Program kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

DINKES DAN KB TOTAL		PAGU	REALISASI	%
		125.495.324.165	113.222.359.735	90,2%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		117.790.098.857	107.437.882.088	91%
Urusan :				
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		56.328.916.680	55.001.492.666	98%
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.270.700	73.393.477	98%
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.000.000	64.218.377	99%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.270.700	9.175.100	89%
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.985.691.653	51.216.790.943	99%
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.486.724.053	50.721.556.443	99%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	485.982.000	483.065.000	99%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	12.985.600	12.169.500	94%
Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	125.840.000	121.687.368	97%
Sub Kegiatan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	125.840.000	121.687.368	97%
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.244.800	21.574.000	89%
Sub Kegiatan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24.244.800	21.574.000	89%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0%
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	451.693.450	399.740.949	88%
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.700	-	0%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.686.700	41.398.300	0%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.650	9.704.050	97%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.999.300	4.643.800	31%
	Penyediaan Bahan/Material	50.008.100	39.021.700	78%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	-	0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	320.000.000	304.973.099	95%



	Konsultasi SKPD			
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.481.222.723	2.252.850.964	91%
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	508.433.925	446.060.964	88%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.822.788.948	1.806.790.000	99%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	149.999.850	-	
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.184.953.354	915.454.965	77%
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.128.217.354	879.660.965	78%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.994.000	34.594.000	99%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.742.000	1.200.000	6%
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	58.096.342.298	50.405.757.599	87%
Kegiatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.925.907.351	11.623.021.643	97%
Sub Kegiatan	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	900022700	894288000	99%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	841347151	834030080	99%
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	229339680	227832634	99%
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3828526400	3688659000	96%
	Pengadaan Obat, Vaksin	2704562000	2700074115	100%
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3064466700	3027675504	99%
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	224637720	133140360	59%
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	133005000	117321950	88%
Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.815.415.730	38.544.118.532	84%
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.523.359.700	1.378.232.400	90%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	232.950.200	193.353.250	83%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	66.999.800	47.775.700	71%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	728.018.000	648.854.000	89%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	715.899.120	703.458.600	98%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	494.424.360	484.216.150	98%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	496.090.900	476.392.200	96%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	52.039.910	40.949.000	79%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	381.054.800	348.621.700	91%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	149.323.550	147.592.450	99%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	425.180.000	367.116.000	86%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	332.292.000	302.611.560	91%



	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	150.376.300	86.859.700	58%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.921.071.100	3.274.784.220	67%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	602.888.800	512.311.950	85%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	683.409.400	615.590.221	90%
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	686.070.400	631.209.500	92%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	7.401.550	7.225.600	98%
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	359.646.700	287.185.700	80%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	60.781.250	40.760.000	67%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	75.726.500	72.804.550	96%
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.989.881.700	2.472.946.777	83%
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22.725.874.030	21.879.153.240	96%
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	50.960.000	41.770.000	82%
	Operasional Pelayanan Puskesmas	6.181.426.610	2.833.181.464	46%
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	89.309.050	52.979.000	59%
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	150.000.000	148.083.600	99%
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	150.940.000	150.020.000	99%
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	11.340.000	8.280.000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	320.680.000	289.800.000	
Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	59.240.700	52.572.027	89%
Sub Kegiatan	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	59.240.700	52.572.027	89%
Kegiatan	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	295.778.517	186.045.397	63%
Sub Kegiatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	295.778.517	186.045.397	63%
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.250.110.080	411.578.023	33%
Kegiatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	71.224.600	63.857.300	90%
Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	71.224.600	63.857.300	90%
Kegiatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	188.491.800	127.444.723	68%
Sub Kegiatan	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	55.000.100	50.196.523	91%
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	133.491.700	77.248.200	58%
Kegiatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	990.393.680	220.276.000	22%
Sub Kegiatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	990.393.680	220.276.000	22%
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	473.916.329	350.930.200	74%
Kegiatan	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	89.591.979	61.010.750	68%



Sub Kegiatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30.869.579	24.023.050	78%
Sub Kegiatan	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	58.722.400	36.987.700	63%
Kegiatan	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	167.882.950	140.538.550	84%
Sub Kegiatan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	167.882.950	140.538.550	84%
Kegiatan	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	216.441.400	149.380.900	69%
Sub Kegiatan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	216.441.400	149.380.900	69%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.640.813.470	1.268.123.600	77%
Kegiatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.543.400	17.323.400	99%
Sub Kegiatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17.543.400	17.323.400	99%
Kegiatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	263.000.000	252.625.900	96%
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	263.000.000	252.625.900	96%
Kegiatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.360.270.070	998.174.300	73%
Sub Kegiatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.360.270.070	998.174.300	73%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.705.225.308	5.784.477.647	75%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.705.225.308	5.784.477.647	75%
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	543.115.900	174.105.302	32%
Kegiatan	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	62.916.100	57.534.900	91%
Sub Kegiatan	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	35.623.800	30.684.200	86%
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	27.292.300	26.850.700	98%
Kegiatan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	480.199.800	116.570.402	24%
Sub Kegiatan	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	480.199.800	116.570.402	24%
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.194.645.808	2.768.148.745	66%



Kegiatan	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.825.854.514	1.428.086.648	51%
Sub Kegiatan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	421.200.000	421.200.000	100%
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	64.242.400	58.526.000	91%
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	149.961.700	88.653.400	59%
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	236.000.000	219.100.000	93%
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.874.450.414	561.320.048	30%
	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	79.287.200	99%
Kegiatan	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	527.591.127	505.141.047	96%
Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	513.260.000	490.958.600	96%
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	14.331.127	14.182.447	99%
Kegiatan	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	538.207.322	534.050.050	99%
Sub Kegiatan	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	49.507.235	48.118.350	97%
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	416.058.457	414.052.200	100%
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	25.863.300	25.850.400	100%
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	46.778.330	46.029.100	98%
Kegiatan	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	302.992.845	300.871.000	99%
Sub Kegiatan	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	17.886.845	17.706.200	99%
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	43.606.000	43.164.800	99%
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	241.500.000	240.000.000	99%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.967.463.600	2.842.223.600	96%
Kegiatan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.967.463.600	2.842.223.600	96%
Sub Kegiatan	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	61.453.600	61.453.600	100%
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.382.250.000	1.257.210.000	91%



	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.467.900.000	1.467.700.000	100%
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	55.860.000	55.860.000	100%

4.7.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

PROGRAM KEGIATAN	PENDANAAN (Juta)	PENDANAAN (Juta)	%
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	10,500	11,617	110.6%
Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum	10,000	11,617	116.2%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Jaringan Air Bersih/ Air Minum	500	-	0.0%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	4,000		
Pembangunan Sumur-sumur air tanah	750	-	0.0%
Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku	3,000	-	0.0%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	250	-	0.0%
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	13,000	3,666	28.2%
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan Rendah	2,000	1,494	74.7%
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	3,000	-	0.0%
Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah	750	71	9.5%
Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum	1,200	1,909	159.1%
Pengembangan distribusi air minum	5,000	-	0.0%
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	750	192	25.6%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	150	-	0.0%
Pengembangan sistem distribusi air limbah	150	-	0.0%
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	1,350	937	69.4%
Pembangunan/peningkatan infrastruktur	1,200	937	78.1%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	150	-	0.0%



PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	4,150	-	0.0%
Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	1,200	-	0.0%
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	1,800	-	0.0%
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	1,000	-	0.0%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	150	-	0.0%
PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG AIR MINUM;	6,339	6,339	100.0%
PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG SANITASI	3,334	3,334	100.0%
JUMLAH	42,673	25,893	60.7%

4.7.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tebo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
1.	Program Pengembangan Perumahan			
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	49.996.100,00,-	7.596.500,00,-	15.19
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	58.336.575,00,-	46.813.700,00,-	80.25
2.	Program Kawasan Permukiman			
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	541.725.400,00,-	488.262.959,00,-	90.13
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha/Permukiman	1.136.072.540,00,-	1.110.684.840,00,-	97.77
3.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	24.790.596.238,00,-	24.695.158.384,00,-	99.62
4.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	18.944.786.980,00,-	18.441.187.484,00,-	97.34
	JUMLAH TOTAL	45.521.513.833,00,-	44.789.703.867,00,-	98.39



4.7.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

No	URAIAN	Jumlah Anggaran
1.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	9.754.300
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Personal Komputer	26.246.100
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Alat Kantor Lainnya	77.477.800

b. Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program / Kegiatan	Pagu Dana
1	Program Penanggulangan Bencana	
	• Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	35.089.899
	• Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	1.406.889.490
	• Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	896.433.100

c. Program Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Program/ kegiatan/sub kegiatan	Pagu Dana
1	2	3
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	
01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	28,843,800
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
	Investigasi Kejadian Kebakaran	
01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	15,000,000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	58,767,600



02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	3,000,000
JUMLAH		2,402,341,400

4.7.6 Bidang Urusan Sosial

Program kegiatan Urusan Sosial Kabupaten Tebo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6
	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.365.327.399	7.151.688.731	213.638.668	97,10%
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	4.713.400.969	4.605.956.930	107.444.039	97,72%
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.610.569	33.240.614	369.955	98,90%
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.610.569	33.240.614	369.955	98,90%
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.171.321.936	3.078.412.280	92.909.656	97,07%
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.058.223.536	2.965.313.880	92.909.656	96,96%
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	113.098.400	113.098.400	-	100,00%
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	46.802.250	46.801.450	800	100,00%
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	46.802.250	46.801.450	800	100,00%
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	619.992.800	617.291.126	2.701.674	99,56%
1.06.01.2.06.01	Penyediaan kpmponem Instalasi Listrik/peneragan Bangunan Kantor	4.985.800	4.985.800	-	100,00%
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.247.900	131.146.200	1.101.700	99,17%
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.000.000	62.000.000	-	100,00%
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	24.289.900	24.284.850	5.050	99,98%
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.309.200	4.827.400	1.481.800	76,51%
1.06.01.2.06.08	Fasilitas Kujungan Tamu	20.160.000	20.135.000	25.000	99,88%
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.000.000	369.911.876	88.124	99,98%
1.06.01.2	Penyediaan Jasa Penunjang	208.000.100			100%



.07	Urusan Pemerintah		207.928.060	72.040	
1.06.01.2 .07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	208.000.100	207.928.060	72.040	99,97%
1.06.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	175.943.259	171.831.032	4.112.227	97,66%
1.06.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.002.865	38.511.032	1.491.833	96,27%
1.06.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	135.940.394	133.320.000	2.620.394	98,07%
1.06.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	457.730.055	450.452.368	7.277.687	98,41%
1.06.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	49.511.155	42.504.200	7.006.955	85,85%
1.06.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	226.010.000	225.968.300	41.700	99,98%
1.06.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	182.208.900	181.979.868	229.032	99,87%
1.06	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN SOSIAL	2.008.892.644	1.918.912.320	89.980.324	95,52%
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	108.998.250	108.964.450	33.800	99,97%
1.06.02.2 .01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	105.000.000	104.966.200	33.800	99,97%
1.06.02.2 .01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	105.000.000	104.966.200	33.800	99,97%
1.06.02.2 .03	Pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/kota	3.998.250	3.998.250	-	100,00%
1.06.02.2 .03.05	Penigkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	3.998.250	3.998.250	-	100,00%
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	439.638.870	424.213.100	15.425.770	97,43%
1.06.04.2 .01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	354.638.820	345.524.200	9.114.620	97,43%
1.06.04.2 .01.01	Penyediaan Permakanan	199.277.220	197.517.100	1.760.120	99,12%
1.06.04.2 .01.03	Penyediaan Alat Bantu	155.361.600	148.007.100	7.354.500	95,27%
1.06.04.2 .02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti	85.000.050	78.688.900	6.311.150	92,58%
1.06.04.2 .02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	55.000.100	54.851.550	148.550	99,73%
1.06.04.2	Pemberian Pelayanan	29.999.950			79,46%



.02.11	Penelusuran Keluarga		23.837.350	6.162.600	
1.06.05	PRORAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	787.606.774	763.256.800	24.349.974	96,91%
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	787.606.774	763.256.800	24.349.974	96,91%
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	333.000.574	316.047.100	16.953.474	94,91%
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	454.606.200	447.209.700	7.396.500	98,37%
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	587.648.750	537.627.870	50.020.880	91,49%
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/kota	447.649.000	397.628.120	50.020.880	88,83%
1.06.06.2.01.04	Penyediaan Permakanan	377.052.000	329.745.220	47.306.780	87,45%
1.06.06.2.01.04	Penangan Khusus bagi Kelompok Rentan	70.597.000	67.882.900	2.714.100	96,16%
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota	139.999.750	139.999.750	-	100,00%
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga B	139.999.750	139.999.750	-	100,00%
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	85.000.000	84.850.100	149.900	99,82%
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	85.000.000	84.850.100	149.900	99,82%
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	85.000.000	84.850.100	149.900	99,82%
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	643.033.786	626.819.481	16.214.305	97,48%
2.08.02	PROGRAM PENGARUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	386.161.576	385.348.475	813.101	99,79%
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pangarutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/kota	215.261.576	215.114.475	147.101	99,93%
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kewewenangan Kabupaten/kota	100.000.000	99.893.900	106.100	99,89%
2.08.02.2.01.04	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	115.261.576	115.220.575	41.001	99,96%
2.08.02.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten. kota	80.000.000	79.776.800	223.200	99,72%
2.08.02.2.02.01	Advokasi kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan	80.000.000	79.776.800	223.200	99,72%



	ekonomi				
2.08.02.2 .03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	90.900.000	90.457.200	442.800	99,51%
2.08.02.2 .03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota	90.900.000	90.457.200	442.800	99,51%
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	132.353.250	127.692.806	4.660.444	96,48%
2.08.04.2 .01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota	132.353.250	127.692.806	4.660.444	96,48%
2.08.04.2 .01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota	132.353.250	127.692.806	4.660.444	96,48%
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	124.518.960	113.778.200	10.740.760	91,37%
2.08.06.2 .01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah , Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota	24.170.490	24.068.350	102.140	99,58%
2.08.06.2 .01.02	Koordinasi dan Singkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/kota	24.170.490	24.068.350	102.140	99,58%
2.08.06.2 .02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota	100.348.470	89.709.850	10.638.620	89,40%
2.08.06.2 .02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/kota	100.348.470	89.709.850	10.638.620	89,40%



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tebo merupakan gambaran kinerja pemerintah dalam pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun. Sistematika yang disesuaikan dalam laporan ini pada dasarnya melaporkan seluruh kegiatan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang. Laporan ini disajikan dalam rangka memenuhi amanah Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pencapaian keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran ini adalah merupakan cerminan adanya kerjasama yang baik antara Eksekutif, Legislatif dan Instansi vertical serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tebo. Diharapkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tebo ini dapat menjadi acuan atau tolak ukur bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tebo dalam peningkatan pencapaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Disadari bahwa laporan ini disusun masih terdapat kekurangan dan kelemahan, maka oleh sebab itu diharapkan pembinaan yang lebih intensif oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi yang pada akhirnya laporan ini dapat lebih sempurna dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih baik di masa – masa yang akan datang.

Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.